

SKRIPSI
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL UNTUK
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA



Oleh:

YESI NURALFIANI

NIM. 17602011005

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP
2022

SKRIPSI
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL UNTUK
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi

Oleh:

YESI NURALFIANI

NIM. 17602011005

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)

SKRIPSI
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL UNTUK
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh:

YESI NURALFIANI

NIM. 17602011005

Disetujui Untuk Ujian Skripsi Pada tanggal:

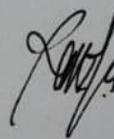
Pembimbing I

Pembimbing II



Rahmat Alhakim, S.Pt.,M.E

NIDN. 0608078104



Elok Ainur Latif, S.Pd.,M.M

NIDN. 0631109002

SKRIPSI
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL UNTUK
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh:

YESI NURALFIANI

NIM. 17602011005

Disetujui dan disahkan:

1. Rahmat Alhakim, S.Pt., M.E

NIDN. 0608078104

2. Hatta Setiabudhi, S.E., M.Ak

NIDN. 0631128201

Penilai ()

Penilai ()

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali


Mutia Pamikatsih, S.Pd, ME.Sv.,

NIDN. 0631058803

PENGESAHAN

Skripsi Saudara
Nama : YESI NURALFIANI
NIM : 17602011005
Judul : Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Purbalingga.

Telah disidang Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada hari / tanggal :

Senin, 21 Februari 2022

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata 1 (S.1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi pada Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

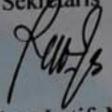
Cilacap, 21 Februari 2022

Dewan Sidang

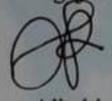
Ketua


Mutia Pamikytasih, M.E.Sy
NIK. 41230714160

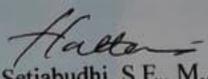
Sekretaris


Elok Ainur Latif, M.M
NIK. 41230714161

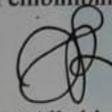
Penguji 1


Rahmat Alhakim, M.E
NIK. 41230714158

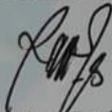
Penguji 2


Hatta Setiabudhi, S.E., M.Ak
NIK. 41230714194

Pembimbing

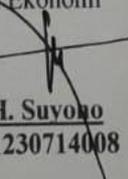

Rahmat Alhakim, M.E
NIK. 41230714158

Ass. Pembimbing


Elok Ainur Latif, M.M
NIK. 41230714161



Mengetahui,
Dekan Ekonomi


Drs. H. Suyono
NIK. 41230714008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yesi Nuralfiani
NIM : 17602011005
Jenjang : S-1
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali
Judul Skripsi : **"Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Purbalingga"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil karya dan penelitian sendiri. Tidak ada unsur plagiasi kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, serta yang tertulis dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi dari unsur tersebut di atas, maka penulis bersedia menerima sanksi dan diproses sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 21 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Yesi Nuralfiani

NIM. 17602011005

MOTTO

Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyempurnakan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad

Imam Al Ghazali

Ilmu itu seperti buruan dan tulisan itu seperti ikatannya, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah sikap yang bodoh ketika kau berhasil menangkap kijang, namun kemudian membiarkannya bebas tanpa diikat.

Imam Syafi'i

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Qs-Al Baqarah: 21

“Keep pray, dreams and action life goes on”

Yesina98

PERSEMBAHAN

Sembilan semester bukanlah waktu yang singkat dibangku perkuliahan, bukan pula proses yang mudah, pelajaran selalu menjadi bagian disetiap kemanapun kaki melangkah, pengorbanan, suka dan duka selalu menjadi kisah tanpa jeda dalam menemukan hikmahNya, dengan penuh rasa syukur atas RidhoNya, penulis persembahkan tugas akhir ini teruntuk mereka yang memiliki banyak arti di bumi ini:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Wahyu Sunandar dan Ibu Kartinah yang telah memberikan doa restu dan dukungannya, terimakasih untuk cinta kasihnya yang tidak terhingga.
2. Kedua adik penulis Ridho Yudi Setiawan dan Aulia Nur Rahmawati yang telah menjadi penyemangat bagi penulis semasa pendidikan.
3. Keluarga Besar Bani Stramunadi beserta Keluarga Besar Bani Miraji terimakasih untuk segala bentuk dukungan, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil.
4. Almamater tercinta Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Alloh Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul *“Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Purbalingga”* ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, atas kasih sayang dan perjuangannya telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan, sampai pada zaman yang peradabannya semakin berkembang dan teknologi semakin canggih.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik, guna memperoleh gelar strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan, doa, motivasi serta peran dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. KH. Nasrulloh, M.H., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Bapak Drs. H. Suyono selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
3. Ibu Mutia Pamikatsih, S.pd.,ME.Sy., selaku kepala program studi ekonomi pembangunan yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga akhir pendidikan.
4. Bapak Rahmat Alhakim, S.Pt.,M.E., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Elok Ainur Latif, S.Pd.,M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan arahan, kritik, saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Suwono, S.E.,M.Si., selaku penguji 1 dan Bapak Priyo Anggoro, S.Sos.,M.M., selaku penguji II seminar proposal yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang dengan ketulusan hati telah memberikan ilmunya dan pengetahuannya, sehingga dapat digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan membina serta memberikan informasi mengenai ke fakultasan.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2017 yang bersedia menjadi tempat untuk bersama menikmati suka duka selama pendidikan, serta memberikan banyak catatan pengalaman dan pelajaran bagi penulis.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan (HMPS- EP) kalian terbaik, salam *I See*.
10. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga beserta seluruh staff yang telah memberikan izin, baik akses maupun kemudahan pengambilan data, terutama kepada Bapak Indra yang telah memberikan informasi terkait data penelitian.
11. Teruntuk seseorang yang berinisial IZ terimakasih telah menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, *god bless youre*.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta seluruh pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat membantu penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

Cilacap, 21 Februari 2022

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keunggulan kompetitif sektoral untuk pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Purbalingga. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; 1) analisis tipologi klassen; 2) analisis *Location Quotient* (LQ); 3) analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ); 4) analisis *Shift share* (SS); 5) analisis model rasio pertumbuhan (MRP) dan 6) analisis *overlay*. Berdasarkan alat analisisnya maka penelitian ini mampu menjelaskan sektor basis, sektor nonbasis, sektor potensial, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *time series* dengan rentang periode penelitian tahun 2016-2020 (5 tahun) berupa data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga (wilayah analisis/ wilayah studi) dan PDRB Provinsi Jawa Tengah (wilayah acuan/ wilayah referensi), yaitu dengan cara mengidentifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan perbandingan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Tengah menurut laju pertumbuhan dan kontribusinya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menggunakan analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga memiliki 6 sektor yang dapat dikembangkan sebagai sektor prioritas karena tergolong ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh. Hasil analisis LQ, DLQ, *Shift Share*, MRP dan *Overlay* menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 8 sektor basis/ penggerak perekonomian wilayah Kabupaten Purbalingga. Terdapat 9 sektor nonbasis/ sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Purbalingga. Terdapat 14 sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di wilayah Kabupaten Purbalingga. Terdapat 4 sektor yang kompetitif di wilayah kabupaten Purbalingga dan 1 sektor yang laju pertumbuhan dan kontribusinya cepat, baik di wilayah kabupaten Purbalingga maupun Provinsi Jawa Tengah.

Struktur ekonomi penyajian PDRB 17 sektor ekonomi lapangan usaha masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor utama penopang perekonomian dengan sub kategori pertanian berupa; sub

tanaman pangan yaitu ketela pohon dan sub hortikultura yaitu wortel, bawang daun, kentang, jamur dan sawi. Kategori buah-buahan yaitu nanas, durian dan pisang. Kategori biofarmaka yaitu kapulaga dan kencur. Sub kategori perkebunan yaitu kelapa dalam, kelapa deres dan tebu. Sub peternakan yaitu kambing dan ayam ras. Sub kategori perikanan yaitu ikan lele, ikan nila dan ikan bawal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal (PEL) Kabupaten Purbalingga masih bertumpu pada sektor primer yang mengandalkan produktivitas dari kekayaan alam secara langsung dengan keunggulan kompetitifnya, baik kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar lokal maupun pasar internasional (eksport).

Kata kunci: analisis tipologi klasen sektoral, analisis LQ, *DLQ*, *shift share*, MRP dan *overlay*, pengembangan ekonomi lokal (PEL).

SUMMARY

This study aims to examine sectoral competitive advantages for local economic development in Purbalingga Regency. The analytical tools used in this research consist of; 1) classification typology analysis; 2) Location Quotient (LQ) analysis; 3) Dynamic Location Quotient (DLQ) analysis; 4) Shift share (SS) analysis; 5) growth ratio model analysis (MRP) and 6) overlay analysis. Based on the analysis tool, this research is able to explain the basic sector, non-base sector, potential sector, sector that has a competitive advantage in the Purbalingga Regency area.

The data used in this study is time series data with a research period spanning 2016-2020 (5 years) in the form of 2010 ADHK GRDP data in Purbalingga Regency (analysis area/study area) and Central Java Province GRDP (reference area/reference area), namely by identifying the economic sector in Purbalingga Regency using a comparison of the same sector in the Central Java Province according to its growth rate and contribution. The approach used in this research is descriptive quantitative.

The results of the research using Klassen typology analysis show that Purbalingga Regency has 6 sectors that can be developed as priority sectors because they are classified as advanced and fast-growing sectors. The results of the analysis of LQ, DLQ, Shift Share, MRP and Overlay show that in Purbalingga Regency there are 8 basic sectors / economic drivers of the Purbalingga Regency area. There are 9 non-base sectors / service sectors that provide goods and services in the Purbalingga Regency area. There are 14 sectors that have competitive advantages in the Purbalingga Regency area. There are 4 competitive sectors in the Purbalingga district and 1 sector with a fast growth rate and contribution, both in the Purbalingga district and Central Java province.

The economic structure of the presentation of GRDP in the 17 economic sectors of the business sector still relies on the agriculture, forestry and fishery sectors as the main sectors that support the economy with the sub-categories of agriculture in the form of; food sub crops namely cassava and sub horticulture namely carrots, leeks, potatoes, mushrooms and mustard greens. The fruit categories are pineapple, durian and banana. The biopharmaceutical categories are cardamom and kencur. Plantation sub-categories are deep coconut, deres coconut and sugar cane. Sub-breeding is goat and chicken. Fisheries sub-categories are catfish, tilapia and pomfret.

This shows that the local economic development (PEL) of Purbalingga Regency still relies on the primary sector which relies on the productivity of natural resources directly with its competitive advantages, both the ability to meet the needs of the community in local and international markets (exports).

Keywords: *sectoral classification typology analysis, LQ analysis, DLQ, shift share, MRP and overlay, local economic development.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN	xi
SUMMARY.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Ruang Lingkup Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Telaah Pustaka	21
1. Tinjauan Pustaka.....	21
a. Definisi Keunggulan Kompetitif.....	21
b. Definisi Sektor Perekonomian	24
c. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah	27

d. Pentingnya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah dan Daya Saing Daerah	28
e. Urgensi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Bagi Nasional	30
f. Urgensi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Bagi Daerah	31
g. Perkembangan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah	33
h. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal	34
i. Definisi Pembangunan Ekonomi.....	36
j. Teori Pembangunan Ekonomi Menurut Para Ahli Ekonomi	38
l. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	48
m. Konsep Produk Domestik Regional Bruto.....	55
n. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto.....	58
B. Penelitian Terdahulu	60
C. Kerangka Berpikir	64
D. Pengembangan Hipotesis.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	67
1. Metodologi Penelitian	67
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	68
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian.....	69
4. Teknik Pengumpulan Data	70
B. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	71
C. Teknik Analisis Data	72
1. Analisis Tipologi Klasen Sektoral.....	72
2. Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>	74
3. Analisis <i>Dynamic Locationt Quotient (DLQ)</i>	75
4. Analisis <i>Shift Share</i>	76
5. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	78
6. Analisis <i>Overlay</i>	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga.....	82
1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga.....	82
2. Pusat Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.....	83
3. Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga	83
4. Motto Kabupaten Purbalingga	83

5. Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Purbalingga	84
6. Topografi Wilayah Kabupaten Purbalingga.....	85
7. Penduduk Kabupaten Purbalingga	86
8. Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.....	87
9. Sosial lainnya Kabupaten Purbalingga.....	89
10. Perekonomian Kabupaten Purbalingga.....	89
B. Hasil Analisis.....	94
1. Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektoral.....	94
2. Hasil Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>	99
3. Hasil Analisis <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i>	102
4. Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	104
5. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	109
6. Hasil Analisis <i>Overlay</i>	111
C. Pembahasan	114
1. Pembahasan Analisis Tipologi Klasen Sektoral.....	114
2. Pembahasan Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>	115
3. Pembahasan Analisis <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i>	116
4. Pembahasan Analisis <i>Shift Share</i>	117
5. Pembahasan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	118
6. Pembahasan Analisis <i>Overlay</i>	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Administrasi Wilayah Menurut Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	12
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	14
Tabel 1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga 2020.....	15
Tabel 2.1	Penyajian dan Klasifikasi Sektor Perekonomian.....	25
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	59
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	66
Tabel 3.2	Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	69
Tabel 3.3	Kuadran Tipologi Klassen.....	71
Tabel 4.1	Penduduk menurut status Pekerjaan Utama Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	86
Tabel 4.2	Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purbalingga dan PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	94
Tabel 4.3	Klasifikasi Tipologi Klassen PDRB Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.....	96
Tabel 4.4	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) PDRB ADHK Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.....	99
Tabel 4.5	Hasil Analisis <i>Dynamic Location Quotient</i> (DLQ) PDRB ADHK Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.....	101
Tabel 4.6	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> (SS) PDRB ADHK Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.....	106
Tabel 4.7	Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	109
Tabel 4.8	Hasil Analisis <i>Overlay</i>	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga.....	11
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	64
Gambar 4.1	Gedung Pemerintahan.....	81
Gambar 4.2	Luas Kecamatan (Hektar) di Kabupaten Purbalingga 2020..	82
Gambar 4.3	Topografi Wilayah (Mdpl) Kabupaten Purbalingga 2020...	83
Gambar 4.4	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Purbalingga 2020.....	84
Gambar 4.5	Pendapatan rill PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	89
Gambar 4.6	Pendapatan Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	91
Gambar 4.7	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	121
Gambar 4.8	Produktivitas Komoditi Sayuran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	123
Gambar 4.9	Produktivitas Komoditi Buah dan Sayur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	124
Gambar 4.10	Produktivitas Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	125
Gambar 4.11	Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	126
Gambar 4.12	Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	127
Gambar 4.13	Produksi Ikan Menurut Komoditas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	128

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
<i>DLQ</i>	: <i>Dynamic Locationt Quotient</i>
<i>LQ</i>	: <i>Locatint Quotient</i>
MRP	: Model Rasio Pertumbuhan
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
PDRN	: Pendapatan Domestik Regional Neto
PEL	: Pengembangan Ekonomi Lokal
PELD	: Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
RPr	: Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi
RPs	: Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Lampiran 1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020
- Lampiran 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu) Tahun 2016-2020
- Lampiran 3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
- Lampiran 4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)
- Lampiran 5 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)
- Lampiran 6 Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klasen Sektoral Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020
- Lampiran 7 Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klasen Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
- Lampiran 8 Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ)
- Lampiran 9 Hasil Perhitungan Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)
- Lampiran 10 Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* (SS)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan total dan peningkatan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah penduduk, disertai dengan perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara, serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economy growth*); pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi (*production capacity*) suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (*national income*).

Suatu negara dikatakan mendapati pertumbuhan ekonomi bilamana terjadi peningkatan GNP (*gross national product*) riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan GNP tahun yang sedang berjalan dengan GNP (*gross national product*) tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan ekonomi menggambarkan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif artinya bukan hanya penambahan produksi barang dan jasa, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi/ hubungan pekerjaan dalam pembuatan suatu produk akhir (*output*), dan alokasi *input*/ anggaran yang ada di pemerintah baik negara maupun daerah untuk membiayai permodalan, gaji/ upah pekerja pada berbagai sektor perekonomian seperti pada lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Sedangkan pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif artinya terjadi peningkatan pada standar pendapatan dan *output* produksi yang dihasilkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, namun pada prinsipnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi diantaranya yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, keahlian dan kewirausahaan.

1. Sumberdaya alam mencakup lahan dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, iklim atau cuaca, hasil hutan, hasil tambang dan hasil laut sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara.
2. Sumberdaya manusia merupakan faktor ekonomi yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas

penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk menjajakan hasil-hasil produksi, di samping itu kualitas penduduk dapat menentukan tingkat produktivitas yang tersedia (barang dan jasa, tenaga kerja, bahan baku dan uang).

3. Sumberdaya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengelola kekayaan.

4. Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi atau sering disebut dengan proses produksi (menciptakan barang dan jasa). (Putra, 2018: 39-41).

Faktor nonekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mencakup lembaga dan budaya, sumberdaya manusia, faktor politik dan administrasi.

1. Lembaga dan budaya berarti bahwa pendidikan dan kebudayaan barat telah membawa arah penalaran dan *skeptisme*, menumbuhkan semangat baru serta membangun kelas pedagang baru (kelas borjuis) yang menghasilkan perubahan cara pandang, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

2. Sumber daya manusia menurut para ahli ekonomi menyebutkan bahwa pembentukan modal insani merupakan proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan. Jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan faktor penghambat bagi proses

pembangunan negara-negara berkembang. Pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitasnya di dalam proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

3. Faktor politik dan administrasi memiliki arti bahwa stabilitas politik dan administrasi yang kokoh sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi, dibandingkan dengan kondisi struktur politik dan administrasi yang lemah dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang. (Welianto, 2020). Sejalan dengan pendapat Smith (1776) dalam Kuncoro (2012:5) yang menyatakan bahwa ekonomi harus memayungi dirinya sendiri dari hambatan asing.

Seseorang tidak mungkin dapat membuat rencana masa depannya apabila keberadaan negara, keamanan masyarakat dan kepemilikannya diragukan. Dengan kata lain langkah investasi, inovasi dan usaha penelitian yang penting bagi pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat berjalan optimal dengan ketiadaan keamanan nasional. Oleh karena itu pemerintah memiliki tiga fungsi umum yaitu melindungi masyarakat dari segala bentuk kekerasan dan serangan masyarakat atau negara lain, melindungi setiap anggota dari ketidakadilan atau tekanan yang berasal dari setiap anggota yang lain, membangun dan merawat pekerjaan publik tertentu serta institusi publik tertentu yang tidak pernah menarik bagi individu/ sekelompok

kecil masyarakat untuk mengusahakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan adalah melalui otonomi daerah.

Menurut Fahmi (2018:193-198) otonomi daerah memiliki arti bahwa adanya hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan azas otonomi daerah. Konsep lahirnya otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, artinya dengan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur keuangannya sendiri.

Lebih jauh lagi dengan wewenang tersebut kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, baik dilihat dari segi sosial maupun ekonomi. Persoalan otonomi daerah muncul dari kerangka terjadinya distorsi hubungan antara pusat dan daerah. Pusat selalu mendominasi sebagai sumberdaya baik ekonomi, hukum maupun politik, maka pada saat ini daerah diberi kebebasan dalam mengaplikasikan aspirasi politiknya dalam bentuk ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah (PERDA). Selain itu dilihat dari sisi kepentingan pemerintahan daerah di dalam otonomi daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah hendaknya mampu mewujudkan apa yang disebut *potential equality* atau daerah lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik, baik ditingkat lokal maupun daerah.

2. Pemerintah daerah hendaknya mampu menciptakan *local accountability* atau meningkatkan kemampuan dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.

3. Pemerintah hendaknya mampu mewujudkan *local responsiveness* yaitu mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah-masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi daerah.

Pada ketiga sisi kepentingan tersebut terlihat jelas bahwa tujuan pembangunan sosial dan ekonomi daerah menjadi bagian yang difokuskan. Kesuksesan daerah dalam membujuk dan menjelaskan kepada rakyat di daerah dapat memberi pengaruh, bagi menurunnya beban pemerintah pusat dalam mengurus daerah jika pembangunan secara jelas dilakukan dengan tepat sasaran, maka untuk mewujudkannya tentu pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi di daerahnya. Penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pembangunan sebenarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi wilayah.

Menurut Suparmoko (2002:99) dalam Husna dkk (2013) potensi ekonomi wilayah didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada di suatu daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah yang secara keseluruhan mampu berkembang dengan sendirinya dan

berkesinambungan. Menurut Gulo (2012) dalam Pradana (2019) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menitikberatkan pada daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah, dengan hal tersebut akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi dan secara tidak langsung kemajuan daerah akan berpengaruh terhadap masyarakat dalam mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai suatu pengembangan potensi ekonomi wilayah adalah melalui pendekatan pembangunan ekonomi sektoral, kemudian pembangunan regional dan selanjutnya pembangunan ekonomi lokal.

Pembangunan ekonomi sektoral dianggap perlu untuk mendekatkan pembangunan nasional melalui kegiatan usaha, demi kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya kedalam sektor-sektor dan sub-sub sektor. Adapun dasar pijakannya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun kelompok kegiatan-kegiatan usaha, sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha.

Tujuan ataupun sasaran dari pembangunan ekonomi sektoral yang hendak dicapai adalah hasilnya akan terungkap secara sektoral yaitu hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi dan kredit yang digunakan, semuanya diungkapkan menurut sektor-sektor baik sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor konstruksi atau bangunan, sektor perindustrian, sektor perdagangan,

sektor perhubungan, sektor keuangan, sektor perbankan dan sektor jasa.

Pendekatan pembangunan ekonomi sektoral dapat dilakukan dalam lingkup wilayah seperti daerah tingkat I Provinsi dan daerah tingkat II Kabupaten atau Kotamadya. Keduanya hanya tampil sebagai indeks untuk melokalisasi sektor-sektor ke dalam daerah.

Pembangunan nasional yang diuraikan kedalam pembangunan daerah meskipun hanya menampilkan program sektoral secara umum telah diklasifikasikan kedalam pendekatan regional, disini ditekankan pada perencanaan dengan sebanyak mungkin partisipasi dari bawah (daerah) dalam memberikan aksentuasi keterpaduan antar sektor, agar masing-masing sektor dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, dengan berfungsinya sektor-sektor secara baik maka daerah yang bersangkutan akan berkembang dengan baik, namun betapapun baiknya hasil yang dicapai semuanya itu masih tergolong pada pendekatan sektoral.

Sedangkan pada pendekatan regional harusnya bertolak pada kenyataan bahwa setiap usaha terkait pada wilayah, setiap usaha selalu memanfaatkan ruang wilayah, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak dalam ruang wilayah tertentu. Semua terjadi karena setiap wilayah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.

Upaya untuk meningkatkan pembangunan di daerah tidak semata-mata menekankan pada peranan kekuatan luar (*external force*), tetapi sudah pada saatnya untuk mengutamakan kekuatan dari dalam (*internal force*), yang dilakukan melalui upaya untuk mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumberdaya ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan untuk menunjang lapangan pekerjaan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau pengembangan ekonomi lokal.

Terdapat pemahaman dan perhatian yang semakin besar antara para penentu kebijaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, yaitu berusaha untuk melanjutkan strategi ekonomi nasional untuk membangkitkan perekonomian lokal. Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas (nasional) maupun masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil dan terbatas (lokal). Walaupun kepentingan ekonomi nasional dan motivasi perusahaan besar seringkali tidak bersesuaian, bahkan berbeda secara nyata dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal.

Misalnya para pekerja lokal yang tidak memiliki ketrampilan atau golongan masyarakat yang termasuk kelompok yang berpendapatan rendah dan perusahaan kecil yang tersebar di seluruh

daerah yang modalnya, ketrampilanya, kemampuan manajemennya dan pemasarannya masih lemah, maka di dalam proses pembangunan ekonomi lokal masyarakat harus memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, sumberdaya sosial, sumberdaya kelembagaan dan sumberdaya fisik yang dimiliki untuk menciptakan suatu sistem perekonomian yang mandiri, dalam arti berkecukupan dan berkelanjutan.

Sedangkan di dalam sistem ekonomi pasar pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan diarahkan untuk mencapai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya usaha yang ada sekarang dan perusahaan baru serta mempertahankan basis ekonomi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. (Adisasmita, 2005:12-17).

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 32.800,69 km². Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk total sebanyak 36.516,035 ribu/jiwa yang terbagi kedalam 35 Kabupaten atau Kota (BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2021). Salah satu Kabupaten Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah sekitar 2,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah atau 3.254 ha. Kabupaten Purbalingga memiliki jumlah penduduk total sebanyak 998.561

ribu/jiwa yang terbagi kedalam 18 Kecamatan, termasuk 224 merupakan Desa dan 15 Kelurahan.

Gambar 1.1 menyajikan peta wilayah Kabupaten Purbalingga berdasarkan batas administrasi Kecamatan dan jumlah Desa/ Kelurahan.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga



(Sumber: BPS, 2021).

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan Kemangkong, Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Mrebet. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Purbalingga. Selain itu kepadatan penduduk terjadi di Kecamatan

Bukateja, Kecamatan Mrebet dan Rembang. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Administratif Wilayah Menurut Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Bobotsari	16	-	53 319
2	Bojongsari	13	-	63 095
3	Bukateja	14	-	78 114
4	Kaligondang	18	-	65 548
5	Kalimanah	14	3	57 667
6	Karanganyar	13	-	40 091
7	Karangjambu	6	-	28 078
8	Karangmoncol	11	-	58 543
9	Karangreja	7	-	46 640
10	Kejobong	13	-	50 738
11	Kemangkong	19	-	63.622
12	Kertanegara	11	-	36 926
13	Kutasari	14	-	65 235
14	Mrebet	19	-	77 869
15	Padamara	13	1	46 533
16	Pengadegan	9	-	41 046
17	Purbalingga	2	11	57 580
18	Rembang	12	-	67 917
Kabupaten Purbalingga		224	15	998 561

(Sumber: BPS, 2021)

Potensi ekonomi Kabupaten Purbalingga diantaranya yaitu dalam bidang industri dan pariwisata. Pada bidang industri yang menjadi icon Purbalingga adalah industri knalpot, bulu mata dan sejenisnya. Tercatat bidang industri pada tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga yaitu terdiri dari jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 43.358 unit, industri menengah sebanyak 115 unit dan industri besar 58 unit. (LKJIP Dinperindag, 2019:18-19). Sedangkan

pada bidang pariwisata ditandai dengan banyaknya wisata alam, baik itu wisata buatan, wisata edukasi, wisata religi, wisata alam maupun wisata sejarah.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga berdasarkan struktur ekonomi sektoral lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2016-2020 memiliki peran yang semakin menurun, diketahui nilai laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2020 mencapai angka -1,23%. Sektor ekonomi yang tumbuh negatif di tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan (-0,24%), sektor konstruksi atau bangunan (-2,19%), sektor perdagangan besar dan eceran (-4,08%), sektor transportasi dan pergudangan (-30,09%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-1,81%), sektor real estate (-0,01%), sektor jasa perusahaan (-2,83%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0,23%), sektor jasa pendidikan (-0,22%). (BPS Kabupaten Purbalingga dalam angka 2021).

Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha, yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produktivitas dari setiap lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah secara langsung membawa pengaruh terhadap corak kegiatan ekonomi masyarakat, baik itu pada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, serta membawa pengaruh tidak langsung terhadap struktur lapangan pekerjaan.

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 didominasi oleh pekerja pada bidang jasa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 195.192 ribu/ jiwa (laki-laki 106.035 ribu/ jiwa dan perempuan 89.157 ribu/ jiwa). Penduduk yang bekerja dalam bidang manufaktur sebanyak 153.996 ribu/ jiwa (laki-laki 85.513 ribu/ jiwa dan perempuan 68.483 ribu/ jiwa) dan penduduk yang bekerja dalam bidang pertanian sebanyak 120.560 ribu/ jiwa (laki-laki 86.762 ribu/ jiwa dan perempuan 33.798 ribu/ jiwa). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga 2020

Lapangan Kerja Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jasa	106 035	89 157	195 192
Manufaktur	85 513	68 483	153 996
Pertanian	86 762	33 798	120 560
Jumlah	278 310	191 438	469 748

(Sumber:BPS, 2021)

Tercatat angkatan kerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berjumlah 500.261 ribu/jiwa dengan jumlah total yang bekerja 469.748 ribu/ jiwa. Bukan angkatan kerja 215.498 ribu/jiwa yang terbagi kedalam kelompok atau kategori bersekolah (36.723 ribu/ jiwa), mengurus rumah tangga (150.685 ribu/ jiwa) dan lain-lain (28.090 ribu/ jiwa). Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Purbalingga didominasi oleh angkatan kerja laki-laki

dengan prosentase 85,11% dan angkatan kerja perempuan dengan prosentase 55.26%. Sementara itu angka pengangguran terbuka sebanyak 30,513 ribu/jiwa dengan prosentase tingkat pengangguran 6,10%. Secara umum masyarakat yang belum bekerja disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja, persyaratan yang tidak dapat dipenuhi angkatan kerja, penawaran tenaga kerja yang minim, permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek yang menyebabkan angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	298 683	201 578	500 261
Bekerja	278 310	191 438	469 748
Bukan Angkatan Kerja	52 274	163 224	215 498
Jumlah	350 957	364 802	715 759
Lainnya	17 637	10 417	28 090
Mengurus Rumah Tangga	15 678	135 007	150 685
Pengangguran Terbuka	20 373	10 140	30 513
Sekolah	18 923	17 800	36 723
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,11	55 26	69 89
Tingkat Pengangguran	6,82	5,03	6,10

(Sumber:BPS, 2021)

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 secara keseluruhan yaitu masih menduduki posisi ke-8 (delapan) Kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi yaitu

mencapai 149,5 ribu jiwa. Masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi di Kabupaten Purbalingga. Persoalan kemiskinan ini juga berkaitan erat dengan adanya keterbatasan dunia lapangan pekerjaan. Adanya keterbatasan lapangan pekerjaan ini membuat masyarakat Kabupaten Purbalingga tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Priambodo et.al, 2021). Selain itu tingkat kesejahteraan juga berkaitan dengan indeks pembangunan manusia.

Persentase indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 68,97% atau menduduki peringkat ke 3 (tiga) dibandingkan dengan 4 (empat) wilayah sekitarnya seperti; Banyumas dengan indeks IPM 71,98%. Cilacap dengan indeks IPM 69,95%. Banjarnegara dengan indeks IPM 67,45% dan Pemalang dengan indeks IPM 66,32%. (BPS Kabupaten Purbalingga dalam angka 2021).

Indeks pembangunan manusia merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan kapabilitas manusia dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitas tersebut. (Putra, 2018:218).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka identifikasi analisis pembangunan ekonomi yaitu melalui

pengembangan ekonomi sektoral, gambaran, pola pergeseran, dan struktur perekonomian sangat diperlukan di Kabupaten Purbalingga.

Menurut Ariastuti (2014:2) di dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Purbalingga Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB Periode 2007-2011*". Hasil penelitian menggunakan analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor bangunan, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa tergolong ke dalam sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, sektor jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa tergolong kedalam sektor basis/penggerak perekonomian. Hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tergolong ke dalam sektor yang kompetitif. Hasil analisis dari ketiga teknik analisis yang digunakan menunjukkan bahwa sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga.

Guna meningkatkan kinerja perekonomian sebagai arah kebijakan pembangunan ekonomi melalui PDRB 17 sektor lapangan usaha, yang secara umum digunakan untuk melihat posisi

perekonomian dan indikator pertumbuhan ekonomi, maka penting dilakukan suatu penelitian lebih lanjut untuk menggali keunggulan/potensi wilayah Kabupaten Purbalingga yang nantinya dapat membawa pengaruh secara internal (daerah) dan pengaruh secara eksternal (tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional). Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan tipologi klassen, sektor apa saja yang berpotensi untuk di kembangkan sebagai sektor prioritas di Kabupaten Purbalingga ?.
2. Sektor ekonomi apa yang menjadi sektor basis, nonbasis dan potensial yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Purbalingga ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hasil analisis berdasarkan tipologi klassen, berupa sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor prioritas di Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor basis, nonbasis dan potensial yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Purbalingga.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka untuk menghindari perluasan pembahasan pada penelitian, fokus penelitian dibatasi pada *“Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Purbalingga”*. Indikator dan variabel yang digunakan adalah PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Purbalingga dan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Tengah. Kajian analisis tersebut juga dibatasi pada rentang periode data pada tahun 2016- 2020 (5 tahun).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi sektoral sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal daerah, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk dikembangkan pada penelitian dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada penulis tentang teori-teori ekonomi yang dipelajari selama masa kuliah, kemudian diterapkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi sektoral untuk pengembangan lokal daerah Kabupaten Purbalingga.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi sektoral dalam usahanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian mahasiswa fakultas ekonomi, khususnya prodi ekonomi pembangunan dengan fokus studi ekonomi regional Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Tinjauan Pustaka

a. Definisi Keunggulan Kompetitif

Menurut Porter dalam bukunya "*Competitive Advantages Creating And Sustaining Superior Performance*" (1998:1-5) menyatakan bahwa keunggulan kompetitif tumbuh secara fundamental dari nilai yang mampu diciptakan perusahaan untuk pembelinya melebihi biaya perusahaan untuk menciptakannya. Nilai adalah harga yang mampu dibayar oleh pembeli dan nilai superior (*superior customer value*) berasal dari penawaran harga yang lebih rendah dari pesaing untuk manfaat yang setara/ atau memberikan manfaat dari mengimbangi harga yang lebih tinggi. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan kelayakan aktivitas perusahaan. Perusahaan merupakan sekumpulan aktivitas untuk merancang, memproduksi, menyerahkan dan mendukung produknya.

Menurut Porter strategi keunggulan kompetitif sangat diperlukan karena dapat digunakan untuk mencari posisi yang menguntungkan bagi suatu industri dalam arena fundamental dimana persaingan terjadi, selain itu merupakan daya tarik bagi industri untuk menciptakan profitabilitas jangka panjang.

Menurut Porter dalam Gunawan (2019) menyatakan bahwa suatu negara atau daerah yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage of nations*) dapat bersaing dalam pasar internasional apabila memiliki 4 (empat) faktor utama dan 2 (dua) faktor pendukung.

Faktor utama yang menentukan daya saing suatu komoditi yaitu kondisi faktor (*factor condition*), kondisi permintaan (*demand condition*), industri terkait atau industri pendukung yang kompetitif (*related and supporting industry*) serta kondisi struktur, persaingan dan strategi industri (*firm strategy, structure and rivalry*).

Faktor pendukung atau faktor yang berpengaruh terhadap interaksi faktor utama di atas yaitu kesempatan dan faktor pemerintah. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing atau dikenal dengan *Porter's diamond theory*.

Menurut Ariyanto (2010) konsep keunggulan kompetitif lebih cocok digunakan untuk mengukur kelayakan finansial pada kondisi daya saing perekonomian secara aktual. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat daya saing sebagai berikut:

a. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan produksi perkapita dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan

ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang maupun jasa di suatu wilayah.

b. Kontribusi sektor ekonomi

Kontribusi sektor ekonomi adalah peranan sektor ekonomi yang menunjukkan struktur ekonomi dalam bentuk prosentase yang menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Kontribusi tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap satu atau beberapa sektor ekonomi.

Menurut Tarigan (2015:8-82) keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu wilayah untuk memasarkan produk ke luar wilayahnya, atau luar negeri atau pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti dengan cara melihat apakah produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah dapat dijual di luar wilayahnya secara menguntungkan, atau tidak perlu lagi membandingkan potensi komoditi yang sama disatu wilayah dengan wilayah lainnya melainkan membandingkan potensi komoditi disatu wilayah dengan semua wilayah pesaingnya di pasar global.

Menurut Kotler (2008) dalam Setiawan (2013) menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mewujudkan sektor ekonomi atau industri yang mampu dispesialisasikan ke dalam sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Sehingga setiap wilayah memiliki sektor yang dapat

digunakan untuk meningkatkan pembangunan serta penyeimbang bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang melebihi pesaing atau keunggulan yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen daripada tawaran pesaing yang lain. Dalam hal ini suatu daerah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki baik sumberdaya alam, maupun sumberdaya manusia, serta lokasi suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Berdasarkan beberapa definisi keunggulan kompetitif tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keunggulan kompetitif dapat digunakan untuk melihat daya saing komoditi suatu wilayah yang memiliki prospek ekonomi menguntungkan untuk dikembangkan baik dalam wilayah lokal maupun di luar wilayah. Keunggulan kompetitif dapat digunakan untuk melihat laju perekonomian dan kontribusi sektor ekonomi antara wilayah satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui apakah sektor perekonomian suatu daerah berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata wilayah lainnya.

b. Definisi Sektor Perekonomian

Sektor perekonomian adalah pembagian kedalam beberapa kelompok atau unit ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Unit-unit ekonomi terdiri dari seluruh sektor-sektor atau sub-sub

sektor ekonomi. Adapun pengelompokan sektor-sektor ekonomi adakalanya menjadi 3 (tiga) sektor, 9 (sembilan) sektor dan 17 (tujuh belas) sektor, tergantung pada konsepsi ekonomi yang digunakan dan berlaku di masing-masing negara atau daerah maupun dalam skala internasional. (Prasetyani dan Sumardi, 2020:2). Sedangkan pengelompokan sektor perekonomian menurut faktor produksi dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

- 1) Sektor primer adalah sektor ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam secara langsung. Sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian.
- 2) Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor sekunder berdasarkan proses produksinya dapat dibagi menjadi 2 yaitu industri ringan dan industri berat. Industri pada sektor ini secara umum mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, memerlukan pabrik dan mesin, disamping itu menghasilkan limbah. Sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang.
- 3) Sektor tersier adalah sektor yang menghasilkan suatu jasa pada produk akhir seperti sektor sekunder. Sektor tersier yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan

komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah dan jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya (Saifulloh, 2020). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Penyajian dan Klasifikasi Sektor Perekonomian

Klasifikasi	PDRB 9 Sektor	PDRB 17 Sektor
Sektor Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pertambangan dan penggalian 2. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pertambangan dan penggalian 2. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Sektor Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor industri pengolahan 2. Sektor konstruksi 3. Sektor listrik, gas dan air bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor industri pengolahan 2. Sektor konstruksi 3. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 4. Sektor pengadaan listrik dan gas
Sektor Tersier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor angkutan dan komunikasi 2. Sektor jasa-jasa 3. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 2. Sektor transportasi dan pergudangan 3. Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum 4. Sektor informasi dan komunikasi 5. Sektor jasa keuangan dan asuransi 6. Real estate 7. Jasa perusahaan 8. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 9. Jasa pendidikan 10. Jasa kesehatan, dan kegiatan sosial 11. Jasa lainnya

(Sumber: Prasetyani dan Sumardi, 2020:27)

c. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

Menurut Blakely (1989) dalam Hernadianto dkk (2016) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses kegiatan ekonomi antara pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat yang berperan aktif mengelola sumber daya alam yang dimiliki, melalui pola kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya untuk menciptakan lapangan kerja, serta memberikan stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomian suatu wilayah. Pengembangan ekonomi lokal sebagai suatu proses peran kerjasama lembaga pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian lokal suatu wilayah/ daerah.

Menurut Canzanelli (2001) dalam Rojaul Huda (2020) pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan suatu proses partisipatif, yang mendorong dan memberikan jalan kepada *stakeholder* lokal untuk meningkatkan daya saing lokal, tujuannya membuka lapangan pekerjaan yang layak dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut *ILO/ International labour organization* (2005) mendefinisikan pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan di suatu wilayah, untuk melakukan pembangunan bersama dengan memanfaatkan sumberdaya

lokal, guna menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang kegiatan ekonomi. (Rojaul Huda, 2020).

Menurut Harsono (2015:1) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah (*local and regional economic development*) pendekatannya berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah, diantaranya untuk mengatasi persoalan kemiskinan, masalah pengangguran, menciptakan pembangunan berkelanjutan, serta menemukan momentumnya ditengah arus ekonomi global. Strategi pengembangan ekonomi lokal daerah yaitu untuk menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif dan berdaya saing (*knowledge based economic*) sekaligus berbasis sumberdaya daerah (*local resources based economic*).

Berdasarkan beberapa definisi pengembangan ekonomi lokal tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, keahlian dan teknologi yang tersedia.

d. Pentingnya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah dan Daya Saing Daerah

Pengembangan ekonomi lokal daerah dan daya saing daerah diperlukan mengingat globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya.

Globalisasi saat ini berlangsung secara terus menerus disemua bidang kehidupan seperti politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Salah satu bentuk nyata yaitu globalisasi dibidang ekonomi yaitu terkait dengan Indonesia yang telah menandatangani keikutsertaan dalam pasar bebas diantaranya CAFTA (*China ASEAN free trade Assosiation*), ACFTA (*ASEAN China Free trade Assosiation*), AIFTA (*ASEAN India Free Trade Assosiation*), AEC (*ASEAN economy community*), MEA (*ASEAN Economy Society*). Oleh karena itu ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi arus barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil. Di samping itu secara agregat ekonomi nasional ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah dan cara untuk menyikapi hal tersebut yang dapat ditempuh pemerintah daerah adalah melalui pengembangan ekonomi lokal daerah yaitu mengelompokkan potensi ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar global.

Menurut Meyer-Stamer (2003) daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan penghidupan masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut pada standar kehidupan yang lebih tinggi.

Menurut Lengyel (2007) dalam modifikasi piramida daya saing menyatakan bahwa daya saing daerah ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor-faktor

pembangunan merupakan faktor langsung yang secara jangka pendek dapat mempengaruhi output ekonomi (PDRB), produktivitas tenaga kerja/ laju penduduk yang bekerja. Sedangkan pengaruh tidak langsung yang mempengaruhi daya saing daerah dalam jangka panjang adalah faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan proses budaya.

e. Urgensi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Bagi Nasional

Perekonomian daerah adalah bagian integral dari perekonomian nasional, sehingga apabila kinerja perekonomian daerah baik maka secara agregat kinerja perekonomian nasional juga baik. Pentingnya pembangunan ekonomi lokal daerah bagi nasional sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal merupakan kebutuhan atau strategi nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing daerah maupun nasional. Pengembangan ekonomi lokal menggunakan pendekatan kewilayahan dapat menjadi koreksi atas pendekatan sektoral.
2. Sesuai dengan kerangka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bahwa pengembangan ekonomi lokal daerah adalah urusan pilihan daerah.
3. Wilayah Indonesia luas dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang beragam, oleh karena itu potensi ekonomi lokal akan lebih efektif dan efisien jika dikelola oleh daerah. Keberagaman akan menciptakan mozaik yang indah jika dikelola dengan baik.

f. Urgensi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Bagi Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup, untuk mencapai hal tersebut tentu membutuhkan strategi pengelolaan kegiatan atau usaha perekonomian pada tingkat daerah yang mendekati pada kekhasan daerah/ lokalitas daerah. Oleh karena itu pentingnya pengembangan ekonomi lokal bagi daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan basis pajak dari dunia usaha dan masyarakat

Adanya peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dunia usaha yang disebabkan oleh pengembangan ekonomi dan peningkatan perekonomian, oleh karena itu peningkatan basis pajak dari dunia usaha sangat di perlukan untuk memelihara infrastruktur lokal bagi suatu wilayah/ daerah.

2. Diversifikasi ekonomi

Diversifikasi ekonomi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan basis ekonomi yang beragam, dengan hal tersebut maka akan sangat membantu memperluas pengembangan ekonomi lokal dan mengurangi kerentanan masyarakat untuk satu bidang usaha.

3. Pengakuan produk lokal

Pembangunan ekonomi lokal yang sukses sering terjadi ketika barang yang diproduksi secara lokal dikonsumsi dipasar lokal,

nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa produk lokal suatu wilayah diakui dalam sistem pasar.

4. Peningkatan kualitas hidup

Peningkatan basis pajak yang lebih lanjut akan meningkatkan pajak lokal dan peningkatan kesempatan bekerja akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat, termasuk standar kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup akan mempengaruhi kesejahteraan individu suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan peningkatan standar hidup yang lebih baik.

5. Peningkatan daya saing

Peningkatan daya saing yaitu pengembangan ekonomi lokal dengan fokus melalui pengembangan komoditi unggulan daerah dalam bentuk klaster yang dapat meningkatkan daya saing. Daya saing suatu produk mampu meningkatkan pendapatan regional suatu wilayah.

6. Peningkatan kesempatan berusaha

Peningkatan kesempatan berusaha yaitu dapat dilakukan dengan cara mengembangkan perekonomian lokal (PEL) dan daerah (PELD) yang berbasis kepada komoditas unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal maupun investor.

7. Penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja yaitu dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi lokal dan daerah harapannya mampu memberikan nilai tambah terutama upah yang lebih baik, beban kerja yang diterima, kepuasan kerja, manfaat dan peluang untuk maju bagi para pekerja.

8. Retensi bisnis

Retensi bisnis yaitu agar bisnis merasa dihargai oleh masyarakat yang pada gilirannya masyarakat akan memilih tinggal di daerah sendiri dan akan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerahnya.

9. Swasembada

Swasembada dapat dilakukan dengan cara memperkuat basis ekonomi, hal ini berarti pelayanan publik tidak terlalu bergantung pada pengaruh antar pemerintah dan aliansi yang dapat berubah kebijakan pada setiap pemilihan daerah.

g. Perkembangan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah

Pengembangan ekonomi lokal daerah yang ada saat ini masih berbasis ideologi ekonomi tradisional. Pengembangan ekonomi daerah yang baik seyogyanya mengadopsi pengembangan ekonomi lokal yaitu pendekatannya kewilayahan, pendekatan dari bawah, kemitraan dengan memanfaatkan potensi lokal dan fokus pada maksimalisasi potensi ekonomi setempat.

Menurut Rodriguez dan Pose (2002) terdapat perbedaan antara PELD dan pengembangan ekonomi tradisional yaitu pembangunan ekonomi lokal (PEL) menggunakan pendekatan sektoral, pembangunan secara *top-down*, pemerintah pusat yang memutuskan bagaimana dan dimana dilakukan intervensi, dikelola oleh pemerintah pusat, fokus pada industri besar dan insentif finansial untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan pengembangan ekonomi tradisional menggunakan pendekatan kewilayahan, pembangunan dilakukan secara *botton-up*, terdesentralisasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha serta berfokus pada maksimalisasi potensi ekonomi setempat.

h. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Munir (2004) dalam Prasetyaningsih dan Widjonarko (2015) yang juga mengacu pada pengertian pengembangan ekonomi lokal menurut “*World Bank*” mengemukakan bahwa pendekatan pengembangan ekonomi lokal meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kuantitas maupun kualitas perkembangan itu sendiri. Agar perkembangan teknologi dapat dikuasai dengan baik maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam konteks proses produksi. Adanya penguasaan teknologi yang baik akan mendorong terjadinya

inovasi teknologi. Inovasi teknologi dapat menciptakan penemuan produk-produk baru dengan cara produksi yang lebih efisien sehingga akan mempermudah proses produksi.

2. Penguasaan teknologi

Kemajuan teknologi oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan merupakan faktor penentu keberhasilan. Penguasaan teknologi adalah bagaimana faktor-faktor produksi dikombinasikan untuk merealisasikan tujuan produksi. Menggunakan kemampuan teknologi yang semakin canggih dapat membuat sebuah inovasi terhadap sebuah produk agar memberikan input yang lebih besar.

3. Pengembangan klaster

Klaster industri sering disebut sebagai mesin dari ekonomi lokal. Suatu klaster memiliki dimensi yang berhubungan dengan produsen pengeksport, pemasok dan perantara, serta institusi dasar yang memberikan input (ide, inovasi, modal dan prasarana). Hubungan keterkaitan antar industri dan meningkatnya pendapatan daerah dapat merangsang kebutuhan atau permintaan akan jasa dan produk lokal yang lebih luas (*multiplier effects*). Klaster industri dapat mendorong perkembangan sistem industri daerah melalui fokus pada dukungan terhadap industri sejenis yang potensial sebagai basis ekspor keluar daerah.

4. Pengembangan daya saing

Menurut “*World Economic Forum Competitiveness Report*” tahun 1996 daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDRB perkapita yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing adalah suatu cara dasar untuk meningkatkan standar hidup dengan cara menyediakan kerja bagi pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemampuan daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh faktor komoditas yang dikembangkan. Pemilihan komoditas dalam menentukan daya saing bersifat krusial mengingat yang meningkatkan daya saing adalah komoditas yang mampu mempertahankan posisi wilayah. Daya saing bukanlah tujuan akhir maupun sebuah sasaran melainkan suatu cara untuk mencapai tujuan akhir.

i. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi identik dengan istilah pembangunan (*development*), modernisasi (*modernization*), pemberdayaan (*empowering*), industrialisasi (*industrialization*), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan perubahan politik (*political change*). Identifikasi pembangunan dengan beberapa terminologi tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang bisa ditafsirkan ke banyak arti (*multi-interpretable*) sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan terminologi lain yang berlainan arti. Penjelasan dari setiap terminologi di atas sebagai berikut:

1. Industrialisasi (*industrialization*) artinya perubahan atau peralihan orientasi mata pencaharian dari agraris ke bentuk pekerjaan industri.
2. Modernisasi (*modernization*) artinya melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional menuju kondisi yang lebih baik secara fisik.
3. Pembangunan (*development*) artinya serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau Negara dengan konsep tertentu.
4. Pemberdayaan (*empowering*) artinya upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya atau penambahan kemampuan pada objek pembangunan.
5. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) artinya kemakmuran dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.
6. Perubahan politik (*political change*) artinya perubahan kondisi politik akan membawa dampak pada arah pembangunan suatu wilayah atau Negara.

Berdasarkan terminologi di atas maka dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mengandung makna proses artinya terdapat tahapan yang harus dilalui ketika pembangunan dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik yang lain.

2. Pembangunan mengandung makna suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik, terjadi penambahan nilai (*value*) guna (*utility*) dari objek pembangunan serta terdapat tujuan dan target tertentu dalam pembangunan.
3. Terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Terdapat subyek yang melakukan pembangunan, terdapat rangkaian langkah yang menjadi panduan dan terdapat sasaran pembangunan.

j. Teori Pembangunan Ekonomi Menurut Para Ahli Ekonomi

Banyaknya konsep dan definisi mengenai pembangunan ekonomi maka penulis menyajikan teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli ekonomi, baik yang berasal dari aliran klasik, neo klasik maupun setelah aliran-aliran tersebut.

Secara umum teori yang dikemukakan pada sekitar tahun 1950 dan setelahnya dikenal dengan aliran klasik dan neoklasik. Sedangkan teori yang dikemukakan pada tahun 1936 dan setelahnya dikenal dengan aliran Keynesian. Secara singkat teori-teori tersebut sebagai berikut:

1) Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang paling terkemuka. Bukunya yang terkenal berjudul "*An Inquiry Into The Nature And Cause Of The Wealth Of Nation*" tahun 1776. Konsep pembangunan menurut Smith adalah meyakini tentang adanya doktrin hukum alam, pembagian kerja, proses akumulasi modal,

investasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi pada persoalan-persoalan ekonomi.

Pertama, doktrin hukum alam bahwa Smith menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri, dan sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan demi keuntungannya sendiri untuk memaksimalkan kesejahteraan secara agregat. Smith menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri maupun perdagangan. Ia penganut paham bebas dan penganut kebijaksanaan pasar bebas atau pasar persaingan sempurna.

Kedua, bahwa pembagian kerja dibutuhkan agar mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada gilirannya meningkatkan ketrampilan pekerjaan, penghematan waktu dalam memproduksi barang dan jasa, namun demikian pembagian kerja tergantung pada luasnya pasar.

Ketiga, proses akumulasi modal merupakan syarat utama pembangunan ekonomi, dengan demikian masalah pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Pada saat laju pemupukan modal meningkat maka persaingan antar pemilik modal meningkat dengan sendirinya, tingkat upah juga akan meningkat dan pada gilirannya akan

menurunkan keuntungan pemilik modal. Oleh karena itu modal diperoleh dari bangsawan dan para pengusaha atau kaum kapitalis yang mengembangkan modal tersebut.

Keempat, tingkat suku bunga yaitu apabila modal dalam perekonomian sudah berkembang maka akan terjadi peningkatan kemakmuran dan meningkatkan jumlah penduduk, sebaliknya dalam kondisi ini tingkat suku bunga akan menurun dan persediaan modal akan meningkat, akan tetapi jika suku bunga turun terlalu rendah, modal akan cenderung menurun dan para pemilik modal cenderung memilih investasi daripada meminjamkan uang, sekalipun suku bunga menurun pada akhirnya tetap terjadi pemupukan modal dan kemajuan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila timbul kemakmuran dari kemajuan bidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan. Kemakmuran tersebut akan menarik pemupukan modal, kemajuan teknis, meningkatkan penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. situasi yang progresif ini akan mensejahterakan masyarakat.

2) David Ricardo

David Ricardo dalam bukunya yang berjudul "*The Principles Of Political Economy And Taxation*" tahun 1823-1912. Asumsi Ricardo yaitu membagi masyarakat dalam 3 golongan;

masyarakat pekerja atau buruh, masyarakat pengusaha atau kapitalis, tuan tanah atau bangsawan.

Analisisnya pada saat terjadi peningkatan jumlah penduduk maka tenaga kerja akan meningkat yang berpengaruh terhadap produktivitas dan meningkatkan keuntungan pengusaha, dalam keadaan tersebut mengakibatkan para pekerja menuntut tingkat upah yang tinggi. Upah yang tinggi meningkatkan pertumbuhan penduduk pada luas tanah yang tetap, dengan demikian mutu tanah dan sewa tanah menurun yang berdampak pada penurunan keuntungan dan pada akhirnya modal juga menjadi berkurang, tenaga kerja dan upah berkurang/ kondisi ini disebut *stationary state* atau perekonomian pada keadaan statis (pertumbuhan berhenti). Jadi menurut Ricardo pertumbuhan ekonomi dapat terjadi sebagai akibat adanya produksi yang dihasilkan oleh masyarakat berupa pemupukan modal, pembagian pendapatan berdasarkan tuan tanah yang berupa sewa, pengusaha berupa keuntungan dan buruh berupa upah.

3) John Stuart Mill

Pada intinya teori pembangunan ekonomi John Stuart Mill sependapat dengan Smith dan Ricardo. Sumbangan yang penting dari Mill dalam pembangunan ekonomi adalah mengenai faktor-faktor nonekonomi yang tidak sedikit peranannya dalam pembangunan ekonomi. Faktor-faktor non ekonomi tersebut

antara lain kepercayaan masyarakat, kebiasaan berfikir masyarakat, adat istiadat dan corak institusi dalam masyarakat

4) Karl Marx

Karl Marx dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul "*Das Capital*" sumbanganya terhadap pembangunan ekonomi menitikberatkan pada masalah kapitalis. Ajarannya terkenal dengan sebutan Marxisme. Menurut Marx pembangunan ekonomi dapat ditinjau dari 3 sudut pandang yaitu:

- a. Sejarah perkembangan masyarakat meliputi masyarakat primitif komunal, perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis dan masyarakat sosialis.
- b. Perkembangan dan kehancuran kapitalis meliputi masa konsentrasi, masa akumulasi, masa kesengsaraan dan masa krisis.
- c. Pengembangan ekonomi terencana adalah nilai lebih yang diperoleh dari tenaga kerja yang menjual tenaganya ke kaum kapitalis.

5) Schumpeter

Josep Alois Schumpeter dalam bukunya yang berjudul "*Theory Of Economic Development*" pada tahun 1911. Asumsinya terhadap pembangunan ekonomi ditentukan oleh adanya inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif/ golongan pengusaha (*entrepreneur*) yaitu golongan masyarakat yang

mengorganisir dan mengembangkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Mereka adalah golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian. Inovasi atau pembaharuan itu dapat berupa:

- a. Memperkenalkan produk baru
- b. Penggunaan cara baru dalam memproduksi suatu barang
- c. Memperluas pasar
- d. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru
- e. Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri.

Pembangunan ekonomi Schumpeter menunjukkan perbedaan antara pimpinan perusahaan dan pemilik modal. Masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pimpinan perusahaan hanya memimpin kegiatan memproduksi dalam suasana struktur organisasi dan teknik produksi yang tidak berubah, sedangkan pemilik modal adalah mereka yang menyediakan modal untuk digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan dan melahirkan adanya satu inovasi.

6) Teori Neo-Klasik

Asumsi kaum Neo-Klasik adalah tingkat bunga dan pendapatan menentukan tingginya tabungan. Tingkat bunga

menentukan tingkat investasi. Tambahan investasi ini akan menyebabkan suku bunga naik, dengan demikian harga-harga barang kapital juga naik. Investasi selanjutnya dapat menurun dan hanya dilakukan pada proyek-proyek yang dianggap menguntungkan saja. Apabila proyek tersebut terlaksana dan memberikan keuntungan maka permintaan investasi menjadi menurun, dengan demikian tingkat bunga yang begitu rendah menyebabkan tidak ada masyarakat yang mau menabung. Pada saat akumulasi kapital tidak mengalami kemajuan atau statis maka kesempatan kerja penuh (*full employment*) harus tetap dijaga dengan cara pemerintah memberikan atau mengadakan proyek-proyek pekerjaan umum.

7) Keynes

Teori Keynes ini lebih banyak ditunjukkan untuk negara kapitalis maju daripada negara berkembang, bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional semakin besar volume pengerjaan yang dihasilkan dan sebaliknya. Volume pengerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan tergantung pada pertemuan antara permintaan dan penawaran barang. Permintaan efektif ini terdiri dari permintaan untuk konsumsi dan investasi, sedangkan permintaan konsumsi sangat tergantung pada

kecenderungan untuk berkonsumsi (MPC) yang kenaikannya tidak secepat kenaikan pendapatan.

8) Harrod-Domar

Inti analisis Harrod dan Domar berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus menerus tanpa adanya gangguan apa-apa. Penekanan pada pentingnya akumulasi modal pada proses pertumbuhan bahwa akumulasi modal akan menimbulkan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar persediaan kapital. Asumsinya sebagai berikut:

- a. Bahwa perekonomian sudah ada dalam tingkat pengerjaan penuh (*full employment income*).
- b. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam perdagangan luar negeri.
- c. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*) atau dengan kata lain ada penyesuaian dengan cepat.
- d. Hasrat menabung marjinal (*marginal propensity to save*) dan hasrat menabung rata-rata (*average propensity to save*) adalah sama.
- e. Perbandingan antara kapital dan output atau (*marginal propensity to save dan capital coefficient*) adalah tetap. (Hasan dan Aziz, 2018: 43-68).

Berdasarkan perkembangan pemikiran ahli ekonomi tersebut di atas baik itu aliran klasik, neo-klasik dan keynesian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penekanan terhadap pembangunan ekonomi terletak pada proses yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dari masyarakat yang masih tradisional menuju ke masyarakat modern searah dengan perubahan teknologi. Keuntungan ekonomi dimiliki oleh golongan kaum kapital dengan kepemilikan modalnya. Campuran pemerintah dalam pembangunan ekonomi belum dilibatkan secara penuh. Pemupukan modal, investasi, tabungan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan pendapatan masyarakat.

k. Teori Pembangunan Ekonomi Regional

Menurut Nashar dan Ridwan (2017:56).Pembangunan daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja, sumberdaya manusia, investasi, modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi, perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan/ pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor di atas penting tetapi masih dianggap terpisah-pisah satu sama lain dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan secara komprehensif.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Segi pembangunan sektoral yaitu pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilakukan daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
2. Segi pembangunan wilayah yaitu wilayah pembangunan meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah.
3. Segi pemerintahan yaitu agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik, oleh karena itulah pembangunan sebagai usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah dalam rangka otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Tjokrowidjoyo (1995: 112) dalam Susanti dkk (2013).

Pembangunan daerah sebagai suatu proses antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, untuk membentuk suatu pola kemitraaan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah. Arsyad (1999:108) dalam Hasan dan Aziz (2018:108).

Menurut Arsyad (1999) dalam Ariastuti (2014) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana masyarakat dan pemerintah daerah mengelola sumber daya yang ada, serta membentuk

hubungan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai tolak ukur dan cara yaitu pendekatan ekonomi yang didasarkan dari aspek pendapatan.

Pembangunan daerah merupakan integritas dari pembangunan nasional yang dilakukan melalui otonomi daerah serta pengarahannya sumber daya yang dapat memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dan demokrasi sehingga berguna dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut secara merata.

I. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. (Tarigan, 2015:46). Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi regional yang lazim dikenal diantaranya:

1. Teori basis ekspor

Teori basis ekspor (*export base theory*) dipelopori oleh Douglas C. North (1995) dan kemudian dikembangkan oleh Tibout (1956). Teori ini membagi sektor produksi atau pekerjaan yang

terdapat di suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* atau pelayanan (non-basis).

Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong timbulnya jenis pekerjaan lainnya (*exogeneous*). Sedangkan sektor non-basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi yaitu asumsi pertama bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap pendapatan dan hanya meningkatkan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, sedangkan sektor lainnya hanya meningkat apabila pendapatan daerah lainnya juga meningkat.

Asumsi kedua, bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan. Beberapa penekanan pada model teori basis ekspor yaitu antara lain:

1. Suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan daerah adalah keuntungan komparatif atau keuntungan yang diperoleh dari setiap barang dan jasa yang memiliki nilai kegunaan tentu saja memiliki nilai pertukaran.

2. Pertumbuhan ekonomi daerah akan dapat dimaksimalkan apabila daerah yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan komparatif yang dimiliki menjadi kekuatan basis ekspor.
3. Ketimpangan antar daerah tetap sangat besar dipengaruhi oleh variasi potensi masing-masing wilayah.

2. Teori pertumbuhan jalur cepat

Teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Inti dari teori pertumbuhan jalur cepat adalah menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki keunggulan kompetitif artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, serta dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Sektor tersebut mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian atau agar pasarnya terjamin suatu produk harus bisa di ekspor ke luar daerah atau ke luar negeri. Perkembangan satu sektor akan mendorong sektor lain turut berkembang, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Mensinergikan sektor-sektor berarti bahwa membuat keterkaitan antar sektor dan saling mendukung atau menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang mampu membuat perekonomian cepat tumbuh.

3. Teori pusat pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan (*growth poles theory*) adalah salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi. Teori pusat perkembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Teori pusat pertumbuhan juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

Suatu wilayah tentu saja memiliki penduduk dan kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut dengan istilah seperti kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman dan daerah modal. Sebaliknya daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan daerah pedalaman/ wilayah terbelakang (*hinterland*) mencakup daerah pertanian dan daerah pedesaan. Keuntungan berlokasi pada teori pusat pertumbuhan yaitu pertama, adanya skala ekonomi (*economic of scale*) atau keuntungan karena dalam memproduksi sudah berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi lebih besar. Kedua, aglomerasi ekonomi (*economic of localization*) atau keuntungan karena di tempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan seperti jasa perbankan dan asuransi, perbengkelan,

perusahaan listrik, perusahaan air bersih, media untuk iklan, tempat pelatihan ketrampilan dan lain-lain. Hubungan antara kota (daerah maju) dengan daerah lain yang lebih terbelakang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Generatif adalah hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya.
2. Parasitif adalah hubungan yang terjadi di daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya.
3. *Enclave* atau tertutup adalah daerah kota (daerah yang lebih maju) seakan terpisah dengan daerah lain dibelakangnya yang lebih terbelakang.

Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya unsur pengganda (*multiplier effect*), adanya konsentrasi geografis dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah terbelakang.

4. Teori neoklasik

Teori neoklasik (*neo-classic theory*) dipelopori oleh Borts Stein (1964) kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman (1965) dan Siebet (1969). Menurutnya Pembangunan ekonomi negara yang

sedang berkembang yaitu pada saat proses pembangunan baru dimulai atau pada saat terjadi perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah yang cenderung menjadi tinggi (*divergence*), sedangkan apabila pembangunan sudah berjalan dalam waktu yang lama perbedaan tingkat kemakmuran akan semakin menurun (*convergence*). Hal tersebut disebabkan karena arus modal saat pembangunan masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi.

Teori ini mendasarkan analisisnya pada komponen fungsi produksi. Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja dan teknologi. Adapun kekhususan teori ini secara mendalam membahas pengaruh perpindahan penduduk (*migrasi*) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan regional.

5. Model kumulatif kausatif

Model kumulatif kausatif dipelopori oleh Gunar Myrdal (1975) dan kemudian di formulasikan lebih lanjut oleh Kaldor. Teori ini menyatakan bahwa adanya suatu keadaan berdasarkan kekuatan relatif dari *spread effect* dan *back wash effect*.

Spread effect adalah kekuatan yang menuju konvergensi antara daerah kaya ke daerah miskin, dengan timbulnya daerah kaya maka akan timbul pula permintaan terhadap produk daerah miskin dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertambahan permintaan

daerah kaya ke daerah miskin terutama pada barang-barang hasil pertanian dengan nilai permintaan yang rendah, sementara konsumsi daerah miskin terhadap produk daerah kaya mungkin terjadi.

Back wash effect adalah corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, secara umum masyarakat berpindah dan melakukan urbanisasi ke wilayah yang lebih maju, penduduk yang pindah merupakan golongan tenaga kerja yang masih ideal, potensial dan memiliki pendidikan yang tinggi, akibatnya daerah yang miskin tersebut kekurangan tenaga kerja dan menyulitkan desa untuk berkembang. Teori ini menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatasi perbedaan yang semakin menonjol. Myrdal menyatakan bahwa dampak *spread effect* ini lebih kecil daripada *back wash effect*.

6. Model interregional

Model ini merupakan perluasan dari teori basis ekspor dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga, namun model ini memasukan dampak dari daerah tetangga sehingga model ini dinamakan model interregional. (Tarigan, 2005:58). Model interregional mengasumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah juga bersifat eksogen. Suatu daerah terikat kepada sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

Sumber-sumber perubahan pendapatan regional (Tarigan, 2005:60) dapat berasal dari perubahan pengeluaran otonomi regional seperti investasi dan pengeluaran pemerintah, perubahan pendapatan suatu daerah/ beberapa daerah lainnya yang berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor, perubahan salah satu di antara parameter-parameter model meliputi hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional atau tingkat pajak marjinal. (Hasan dan Aziz, 2018:109-114).

m. Konsep Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator yang mewakili besarnya pendapatan regional suatu daerah. Indikator ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan sebaliknya. (Prasetyani dan Sumardi, 2020:1).

Pendapatan regional menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* atau bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah dan dana

masuk dari luar wilayah. (Hasan dan Aziz, 2018:108-109).

Pendapatan ekonomi wilayah diantaranya sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga pasar

Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi atau *output*. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas harga pasar.

2. Produk domestik regional neto (PDRN) atas dasar harga pasar

Produk domestik regional neto atas dasar harga pasar adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi biaya penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susut atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lainnya), karena barang modal tersebut terpakai dalam proses produksi atau karena faktor waktu.

3. Produk domestik regional neto (PDRN) atas dasar biaya faktor

Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor adalah pendapatan domestik regional neto atas harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan,

bea ekspor, bea cukai dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.

4. Pendapatan perorangan dan pendapatan yang siap dibelanjakan

Pendapatan perseorangan merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, namun ternyata tidak seluruh pendapatan regional diterima oleh rumah tangga. Pajak pendapatan perusahaan diterima oleh pemerintah, keuntungan yang tidak dibagikan ditahan di perusahaan-perusahaan dan dana jaminan sosial dibayar kepada instansi yang berwenang, akan tetapi sebaliknya rumah tangga masih menerima tambahan berupa *transfer payment* baik dari pemerintah maupun perusahaan dan bunga neto atas utang pemerintah dan dapat disebut dengan pendapatan perseorangan (*personal income*).

Apabila pendapatan perorangan dikenakan pajak yang langsung dibebankan kepada rumah tangga dan hibah yang diberikan oleh rumah tangga maka disebut dengan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

5. Pendapatan perkapita

Jumlah penduduk sangat menentukan besaran pendapatan yang diterima oleh suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut pada tahun yang sama. Pada pendapatan perkapita angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk, akan tetapi angka ini seringkali tidak diperoleh. Sehingga

diganti dengan total pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga pasar. Selain itu angka pendapatan perkapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan. (Tarigan, 2015:18-21).

n. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

1. Metode Langsung

Metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik sosial ekonomi setiap daerah, serta dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik yang lemah disebut dengan metode langsung. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan produksi

Pendekatan produksi atau nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan pada barang atau jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai tambah berasal dari seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto setiap sektor dan sub sektor.

b. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan yaitu merupakan nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa faktor-faktor produksi. Balas jasa tersebut yaitu upah atau

gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung, termasuk bunga, sewa tanah dan profit atau keuntungan.

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran yaitu penggunaan akhir dari barang dan jasa disuatu wilayah Kabupaten/ Kota. Pendekatan pengeluaran dimaksudkan untuk memperkirakan komponen permintaan akhir seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor.

2. Metode Tidak Langsung

Perhitungan nilai tambah melalui alokasi atau mengalokator angka pendapatan regional Provinsi untuk setiap angka pendapatan regional Kabupaten/ Kota dengan memakai berbagai macam indikator produksi ataupun indikator yang lain yang cocok digunakan sebagai alokator disebut dengan metode tidak langsung.

Hasil metode alokasi juga dapat digunakan sebagai kontrol terhadap perhitungan pendapatan regional masing-masing Kabupaten/ Kota. Salah satu asumsi yang digunakan didalam metode alokasi yaitu tersedianya data pendapatan regional Provinsi.

Alokator yang dapat digunakan diantaranya nilai produksi bruto, nilai produksi neto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk dan lain-lain dengan menggunakan salah satu atau kombinasi alokator tersebut maka dapat diketahui nilai tambah sektor maupun sub sektor ekonomi pada tingkat Kabupaten/ Kota.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi dasar ketika melaksanakan penelitian, baik itu sifatnya sebagai perbandingan maupun inspirasi penelitian, oleh karena itulah penulis rangkum penelitian terdahulu yang secara rinci dapat kita lihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian
1.	Hernadianto, Thansi dan Afri Erisman. (2016). <i>“Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Seluma”</i>	Berdasarkan perhitungan dan analisis PDRB Kabupaten Seluma tahun 2006-2013 serta pengembangan ekonomi masyarakat lokal Kabupaten Seluma diketahui; pola perekonomian Kabupaten Seluma didominasi oleh sektor pertanian, meski dengan persentase kontribusi yang semakin menurun. Kontribusi sektor pertanian masih sangat dominan dalam membentuk struktur perekonomian Kabupaten Seluma. Kontribusi sektor pertanian selama periode penelitian adalah rata-rata 53,94%. Peningkatan PDRB rill tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Seluma. Ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Seluma bertumpu pada sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), perdagangan dan buruh yang masih bersifat tradisional, selain itu budaya lokal sangat mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Seluma.

Lanjutan tabel 2.2

No	Nama/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian
2.	Irawaty Masloman. (2020) “ <i>Analisis Sektor Potensial dan Sektor Unggulan di Kota Tomohon</i> ”	<p>Hasil analisis tipologi klasen menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) sektor yang masih bisa berkembang atau potensial di Kota Tomohon. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib.</p> <p>Hasil analisis <i>locationt quotient (LQ)</i> menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) sektor tergolong sektor unggulan di Kota Tomohon. Sektor tersebut yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya, sektor pertambangan dan penggalian, real estate, kontruksi dan jasa pendidikan.</p>

Lanjutan tabel 2.2

No	Nama/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian
3.	Mira Hastin. (2021) <i>“Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Kerinci”</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor potensial dan berdaya saing untuk dikembangkan di Kabupaten Kerinci.</p> <p>Sektor tersebut yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi dan selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan potensi ekonomi lokal Kabupaten Kerinci.</p>
4.	Rismayanti. (2021). <i>“Analisis Potensi Sektoral Dalam Pengembangan Ekonomi”</i>	<p>Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa dari 17(tujuhbelas) sektor hanya 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor non-basis (tidak memiliki keunggulan komparatif). Sementara 14 (empat belas) sektor lainnya tergolong sebagai sektor basis ekonomi Kota Kendari. Sektor dengan indeks LQ terbesar adalah sektor jasa perusahaan dan yang terkecil adalah sektor pertambangan.</p> <p>Hasil analisis shift share dan tipologi klasen menunjukkan bahwa terdapat sektor ekonomi potensial dan memiliki keunggulan kompetitif (berdaya saing) yakni sektor pertanian, pertambangan, pengadaan listrik, administrasi pemerintahan dan jasa kesehatan. Sementara itu sektor maju tapi tertekan di Kota Kendari terdiri dari; sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya. Terdapat 3 (tiga) sektor yang tergolong sektor relatif tertinggal yakni sektor pengadaan air bersih, pengolahan sampah, penyediaan akomodasi dan real estate.</p>

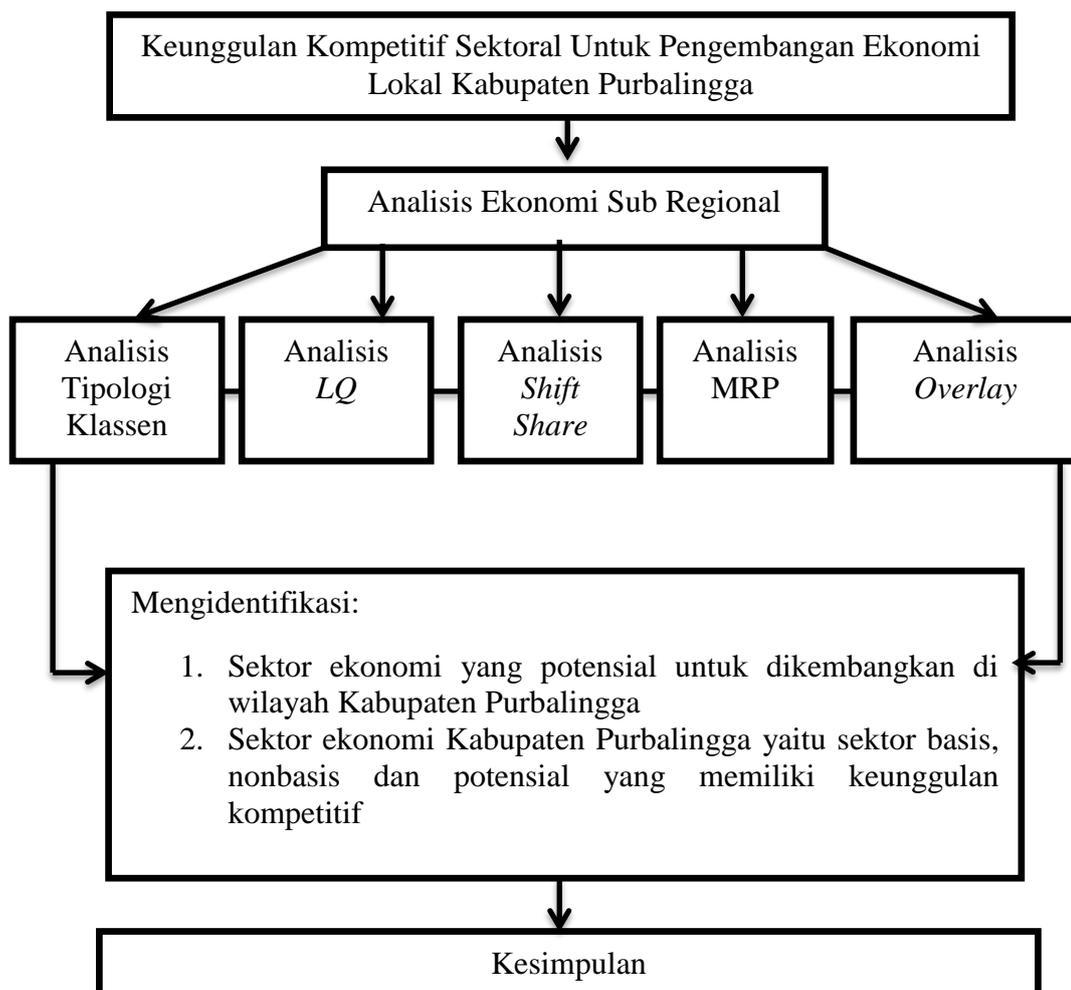
Lanjutan tabel 2.2

No	Nama/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian
5.	Agus Dwi Cahyono, Aisah Jumiati dan Duwi Yunitasari. (2021) <i>“Analisis Sektor Potensial Dalam Pengembangan Pembangunan Perekonomian Provinsi Gorontalo”</i>	<p>Hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo dari 17 (tujuhbelas) sektor ekonomi yang ada, terdapat 10 (sepuluh) sektor ekonomi yang memiliki nilai (>1) atau dikatakan basis yang menandakan sektor tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.</p> <p>Hasil analisis MRP diperoleh hasil bahwa dari 17 (tujuhbelas) sektor ekonomi dengan membandingkan antara wilayah studi dan wilayah referensi, terdapat 9 (sembilan) sektor ekonomi yang memiliki rasio pertumbuhan yang lebih menonjol pada wilayah studi dibandingkan wilayah referensi.</p> <p>Hasil analisis skalogram yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 17 (tujuh belas) sektor terdapat 4 (empat) sektor yang menjadi prioritas utama pengembangan pembangunan di Gorontalo.</p>

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada rumusan masalah, telaah pustaka dan penelitian terdahulu untuk memudahkan pemahaman model konseptual tentang gejala yang menjadi objek permasalahan, serta bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi maka dibuatlah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. (Sugiyono, 2015:60).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



D. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada telaah pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir, maka peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor prioritas di Kabupaten Purbalingga berdasarkan analisis tipologi klassen.
2. Diduga sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga memiliki 8 sektor penggerak/ basis ekonomi (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya). Terdapat 9 sektor non basis (sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate dan sektor jasa perusahaan) berdasarkan analisis

LQ. Terdapat 6 sektor potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya) berdasarkan analisis DLQ. Terdapat 14 sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa perusahaan; sektor real estate; sektor jasa pendidikan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa lainnya) berdasarkan analisis *shift share*. Terdapat 4 sektor yang kompetitif di Kabupaten Purbalingga (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan) berdasarkan analisis MRP dan terdapat 1 sektor yang kompetitif baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi berdasarkan analisis overlay (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional/ terbuka, empiris/ logis dan sistematis/ terpadu.

Peneliti menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif juga dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan atau sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode kuantitatif sebagai metode *positivistik* karena berlandaskan pada *filsafat positive*, disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. (Sugiyono, 2015:2-3).

Analisis data pada penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan/ menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2015:147).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah wilayah Kabupaten Purbalingga.

Waktu penelitian dihitung dari pengajuan judul, penyusunan proposal skripsi, seminar proposal skripsi, penelitian dan ujian skripsi yaitu selama 6 bulan. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1.	Pengajuan online dan rekomendasi pembimbing						
2.	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan						
3.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal						
4.	Seminar proposal skripsi						
5.	Revisi proposal skripsi dan persetujuan revisi						
6.	Pengumpulan dan pengolahan data						
7.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi						
8.	Ujian skripsi, revisi skripsi dan pengesahan skripsi						
9.	Ujian pendaran						

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas data dan realibilitas instrumen. Sementara itu kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Berdasarkan pengaturannya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*) yaitu pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi dan lain sebagainya.

Menurut sumber datanya ada 2 (dua) yaitu pertama, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kedua, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen. Selain itu teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya. (Sugiyono, 2015:137).

Jenis data dan sumber data yang digunakan peneliti yaitu pertama, data primer dengan berpedoman pada data *time series* periode tahun 2016-2020 berupa data PDRB yang diperoleh langsung

atau bersumber dari badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga.

Kedua, data sekunder yang diperoleh atau bersumber dari link resmi *Purbalinggakab.go.id*. dan badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1. Kabupaten Purbalingga dalam angka 2021
2. Produk domestik regional bruto (PDRB) lapangan usaha Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021
3. Kecamatan dalam angka (KDA) 2021
4. Peta wilayah Kabupaten Purbalingga
5. Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2015:138).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara melalui studi pustaka langsung ke kantor BPS Kabupaten Purbalingga. Selain itu data dari instansi pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan data pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui dokumentasi pada link resmi instansi terkait melalui akses internet.

B. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi konseptual merupakan definisi variabel berdasarkan teori yang digunakan. Sedangkan definisi operasional variabel menjelaskan cara peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang ditunjukkan secara relevan. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

No	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1.	PDRB Menurut badan pusat statistik PDRB menggambarkan nilai tambah atau kemampuan suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan proses produksi	PDRB yang dimaksud adalah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan wilayah Kabupaten Purbalingga sebagai wilayah studi/ wilayah analisis dan wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah acuan/ wilayah referensi
2.	Laju pertumbuhan ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan produksi perkapita dalam jangka waktu tertentu, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.	Laju pertumbuhan yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung dengan cara membandingkan nilai tambah tahun akhir dengan tahun awal baik tingkat Kabupaten/ Provinsi
3.	Kontribusi ekonomi Kontribusi ekonomi adalah peranan sektor-sektor ekonomi yang menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah, struktur ekonomi dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan besaran peran masing-masing sektor ekonomi dan kemampuan menciptakan nilai tambah. Kontribusi tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap satu maupun beberapa sektor tertentu.	Kontribusi yang dimaksud adalah peranan setiap sektor pada PDRB yang dinyatakan dalam nilai persentase, nilai yang muncul berasal dari perhitungan dengan menggunakan teknik analisis sub regional seperti tipologi klassen, <i>LQ</i> , <i>DLQ</i> , <i>Shift share</i> , <i>MRP</i> , <i>Overlay</i> dan lain sebagainya.

C. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tipologi Klasen Sektoral

Menurut Sjafrizal (1997) dalam Hajeri, dkk (2015) analisis tipologi klasen dapat digunakan untuk mengetahui pola dan gambaran Struktur perekonomian suatu wilayah atau daerah. Daerah yang diamati akan terbagi kedalam 4 (empat) klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high share*), daerah yang maju tapi tertekan (*high growth but low share*), daerah berkembang cepat (*high share and low growth*) dan daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low share*). Analisis tipologi klasen sektoral dilakukan dengan cara membandingkan perekonomian pada wilayah Kabupaten/ Kota dengan perbandingan variabel yang sama pada wilayah atasnya, setelah itu mengklasifikasikannya kedalam 4 (empat) kuadran yaitu:

- a. Kuadran I merupakan sektor ekonomi yang memiliki nilai laju pertumbuhan wilayah analisis dan nilai kontribusi wilayah analisis di atas rata-rata wilayah acuan ($r_{ik} > r_i$ dan $Y_{ik} > Y_i$).
- b. Kuadran II merupakan sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan di atas rata-rata wilayah acuan namun nilai kontribusinya di bawah rata-rata wilayah acuan ($r_{ik} > r_i$ dan $Y_{ik} < Y_i$).
- c. Kuadran III merupakan wilayah dengan sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan di bawah rata-rata wilayah acuan dan nilai kontribusinya di atas rata-rata wilayah acuan ($r_{ik} < r_i$ dan $Y_{ik} > Y_i$).

d. Kuadran IV merupakan wilayah dengan sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan dan nilai kontribusi di bawah rata-rata wilayah acuan ($r_{ik} < r_i$ dan $Y_{ik} < Y_i$). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.3 Kuadran Tipologi Klasen

Laju Pertumbuhan	Kontribusi	
	$Y_{ik} > Y_i$	$Y_{ik} < Y_i$
$r_{ik} > r_i$	Kuadran I Sektor Maju Dan Cepat Tumbuh ($r_{ik} > r_i$ dan $Y_{ik} > Y_i$)	Kuadran II Sektor Maju Tapi Tertekan ($r_{ik} > r_i$ dan $Y_{ik} < Y_i$)
$r_{ik} < r_i$	Kuadran III Sektor Potensial Tapi Masih Bisa Berkembang ($r_{ik} < r_i$ dan $Y_{ik} > Y_i$)	Kuadran IV Sektor Relatif Tertinggal ($r_{ik} < r_i$ dan $Y_{ik} < Y_i$)

Keterangan:

R_{ik} = Laju pertumbuhan sektor i pada daerah analisis Kabupaten

r_i = Laju pertumbuhan sektor i pada daerah acuan Provinsi

Y_{ik} = Rata-rata nilai kontribusi sektor i pada daerah analisis Kabupaten

Y_i = Rata-rata nilai kontribusi sektor i pada daerah acuan Provinsi

Untuk mengetahui nilai kontribusi sektor ekonomi dalam suatu wilayah maka digunakan rumus untuk mengetahui nilai atau persentase kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{E_i}{E_j} \times 100$$

Keterangan:

E_i = PDRB sektor i wilayah analisis atau wilayah acuan

E_j = Total PDRB wilayah analisis atau wilayah acuan

Untuk mengetahui nilai laju pertumbuhan sektor ekonomi dalam suatu wilayah maka digunakan rumus untuk menghitung persentase sektor ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{E_{i,j,t} - E_{i,j,t-1}}{E_{i,j,t}} \times 100$$

Keterangan:

$E_{i,j,t}$ = Pendapatan sektor i wilayah analisis atau wilayah acuan pada tahun t atau tahun sesudah tahun dasar.

$E_{i,j,t-1}$ = Pendapatan sektor i di wilayah analisis atau wilayah acuan pada tahun dasar atau tahun awal.

2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Menurut Atmanti dan Jopie (2018) analisis LQ dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan *leading* sektor. Teknik analisis LQ menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang analisis dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang menjadi acuan. (Arsyad, 2010; Tarigan, 2007). Rumus untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Keterangan:

LQ = *location quotients* dari sektor i di wilayah studi

v_i = pendapatan dari sektor i di wilayah kabupaten/kota

v_t = pendapatan total dari sektor i di wilayah kabupaten/kota

V_i = pendapatan dari sektor i di wilayah provinsi jawa tengah

V_t = pendapatan total dari sektor i di wilayah provinsi jawa tengah

Menurut Destiningsih (2017: 31-32) Kriteria yang digunakan dalam metode LQ adalah:

1. Bila $LQ > 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis, artinya daerah analisis lebih berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan sektor i daerah referensi.
2. Bila $LQ = 1$ maka disebut swasembada (*self-sufficient*), artinya memiliki derajat spesialisasi sama dalam memproduksi sektor i , kondisi tersebut jarang terjadi baik di daerah studi maupun daerah referensi
3. Bila $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis, artinya daerah analisis tidak berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan dengan sektor i komoditas daerah referensi

3. Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi disuatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis (sektor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saingnya), dan sektor nonbasis (sektor yang menyediakan barang maupun jasa untuk kebutuhan lokal tanpa

melakukan kegiatan ekspor ke wilayah lainnya). Menurut Suyatno (2000) dalam Hajeri, dkk (2015). Rumus dari DLQ sebagai berikut:

$$DLQ = \left[\frac{(1+Gi_j)/(1+gj)}{(1+Gi)/(1+G)} \right]^t$$

Kriteria keputusan nilai DLQ adalah:

- a. Nilai $DLQ > 1$ artinya sektor i masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.
- b. Nilai $DLQ < 1$ artinya sektor i tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.

4. Analisis *Shift Share*

Menurut Husna dkk (2013) analisis *shift share* dapat digunakan untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya, dengan cara membandingkan pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah analisis dengan sektor yang sama pada tingkat daerah referensi atau wilayah acuan. Analisis *shift share* memiliki 3 tiga komponen yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan peranan struktur ekonomi suatu wilayah/daerah. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut:

- a. *National share* (N) hasil perhitungan N akan menggambarkan peranan sektor i di wilayah analisis tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan rata-rata wilayah acuan berdasarkan tingkat teratas.

b. *Propotional* (P) hasil perhitungan menunjukkan jika P bernilai positif maka sektor i tumbuh lebih cepat di wilayah analisis, dibandingkan pada tingkat wilayah acuan. Sedangkan jika P bernilai negatif berarti sektor i tumbuh lebih lambat di wilayah analisis dibandingkan dengan pertumbuhan sektor i di wilayah acuan.

c. *Differential shift* (D) hasil perhitungan menunjukkan jika D bernilai positif maka sektor i lebih kompetitif di wilayah analisis dibandingkan dengan di wilayah acuan. Sedangkan jika D bernilai negatif artinya sektor i lebih kompetitif di wilayah acuan dibandingkan wilayah analisis.

Menurut Soepono dalam hajeri dkk (2015) persamaan komponen analisis shitt share sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

I = Sektor atau sub sektor ekonomi yang diteliti

J = Variabel wilayah yang diteliti

N = Variabel wilayah nasional

D_{ij} = Perubahan sektor i daerah acuan

N_{ij} = Pertumbuhan nasional sektor i daerah analisis

M_{ij} = Bauran industri sektor i daerah analisis

C_{ij} = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah analisis

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai tambah yang dinotasikan sebagai E sehingga persamaannya sebagai berikut:

$$D_{ij} = E_{ij} - E_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij}.r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in}-r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij}-r_{in})$$

Sehingga di dapat diperoleh persamaan shift share untuk sektor i di wilayah analisis sebagai berikut:

$$D_{ij} = E_{ij}.r_n = E_{ij}(r_{in}-r_n) - E_{ij}(r_{ij}-r_{in})$$

5. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model rasio pertumbuhan merupakan perbandingan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Alat analisis ini dapat digunakan untuk melihat deskripsi ataupun sektor ekonomi yang bersifat lebih makro dalam struktur ekonomi wilayah. (Destiningsih, 2017:43). Analisis model rasio pertumbuhan dibagi menjadi dua yakni rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) dan rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr). Penjelasannya sebagai berikut:

a. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr)

RPr adalah perbandingan antara laju pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi. Kriteria pengujian adalah jika $RPr > 1$ maka RPr dikatakan positif artinya pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB total wilayah referensi. Jika $RPr < 1$ maka RPr negatif artinya pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi lebih rendah daripada pertumbuhan PDRB total wilayah referensi. Rumus RPr sebagai berikut:

$$RPr = (\Delta E_{ir} / E_{ir}(t)) / (\Delta E_r / E_r(t))$$

Keterangan:

i = Sektor ekonomi

ΔE_{ir} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi

ΔE_r = Perubahan PDRB total di wilayah referensi

E_{ir} = PDRB sektor di wilayah referensi

E_r = PDRB total di wilayah referensi

t = Tahun tertentu

b. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs)

RPs adalah perbandingan PDRB sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi. Kriteria pengujian yaitu jika $RPs > 1$ maka RPs dikatakan positif artinya pertumbuhan sektor i di wilayah studi lebih tinggi daripada pertumbuhan sektor i di wilayah referensi. Jika $RPs < 1$ maka RPs dikatakan negatif artinya pertumbuhan sektor i di wilayah studi lebih rendah daripada pertumbuhan sektor i di wilayah referensi. Rumus RPs sebagai berikut:

$$RPs = (\Delta E_{ij} / E_{ij}(t)) / (\Delta E_{ir} / E_{ir}(t))$$

Keterangan:

i = Sektor ekonomi

ΔE_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah studi

ΔE_{ir} = Perubahan PDRB total di wilayah referensi

E_{ij} = PDRB sektor i di wilayah referensi

Eir = PDRB total di wilayah studi

t = Tahun tertentu

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan alat analisis model rasio pertumbuhan maka akan diperoleh nilai rill dan nilai nominal yang kemudian nilai nominal dari kedua perbandingan tersebut dikombinasikan, sehingga akan diperoleh deskripsi sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan.

Menurut Maulana dalam Destiningsih (2017:44) terdapat empat klasifikasi model rasio pertumbuhan yaitu:

- a. Klasifikasi 1 yaitu nilai RPr (+) dan nilai RPs (+) artinya sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi mempunyai pertumbuhan yang cepat dan demikian pula pada tingkat wilayah studi, sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang dominan dalam pertumbuhan.
- b. Klasifikasi 2 yaitu nilai RPr (+) dan nilai RPs (-) artinya sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi mempunyai pertumbuhan yang cepat, namun pada tingkat wilayah studi memiliki pertumbuhan yang lambat.
- c. Klasifikasi 3 yaitu nilai RPr (-) dan nilai RPs (+) artinya sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi mempunyai pertumbuhan yang lambat namun pada tingkat wilayah studi memiliki pertumbuhan yang cepat.
- d. Klasifikasi 4 yaitu nilai RPr dan RPs sama-sama memiliki nilai negatif artinya sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi memiliki

pertumbuhan yang lambat dan demikian pula pada tingkat wilayah studi. (Alifa dkk, 2019).

6. Analisis *Overlay*

Menurut Atmanti dan Jopie (2018) analisis *overlay* digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dikembangkan di tingkat Provinsi atau untuk mengetahui sektor yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Analisis *overlay* dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan hasil analisis *LQ* dan analisis MRP. Menurut Destingsih (2017:48) analisis *overlay* memiliki 4 (empat) penilaian yaitu:

- a. Pertumbuhan positif dan kontribusi positif merupakan klasifikasi 1 artinya menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari segi pertumbuhan maupun kontribusi.
- b. Pertumbuhan positif dan kontribusi negatif merupakan klasifikasi 2 artinya menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang pertumbuhannya cepat namun kontribusinya lambat.
- c. Pertumbuhan negatif dan kontribusi positif merupakan klasifikasi 3 artinya menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang pertumbuhannya lambat namun kontribusinya cepat.
- d. Pertumbuhan dan kontribusi sama-sama bernilai negatif merupakan klasifikasi 4 artinya menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang tidak berpotensi baik dari segi pertumbuhan maupun kriteria kontribusinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian Barat Daya, tepatnya pada posisi: 101011'-109035' Bujur Timur dan 7010'-7029' Lintang Selatan. Setiap wilayah memiliki batas administrasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan, baik itu pada lingkup Provinsi, Kabupaten/ Kotamadya, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan. Batas administratif Kabupaten Purbalingga dengan wilayah Kabupaten/ Kota sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pemasang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Jarak dari Purbalingga ke beberapa Kota sekitarnya sebagai berikut:

- a. Banjarnegara : 45 Km
- b. Cilacap : 60 Km
- c. Purwokerto : 20 Km
- d. Semarang : 191 Km
- e. Wonosobo : 75 Km

2. Pusat Pemerintahan Kabupaten Purbalingga

Pendopo Dipokusumo merupakan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang terletak Jalan Lingkar Alun-Alun Kabupaten Purbalingga, tepatnya Jalan Alun-Alun Utara, nomor 2 (dua) Purbalingga, Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Gambar 4.1 Gedung pemerintahan



(Sumber: www.purbalingganews.id)

3. Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga

a. Visi

Purbalingga yang informatif menuju Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera, berakhlak mulia atau berakhlaqul karimah

b. Misi

Menyelenggarakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel

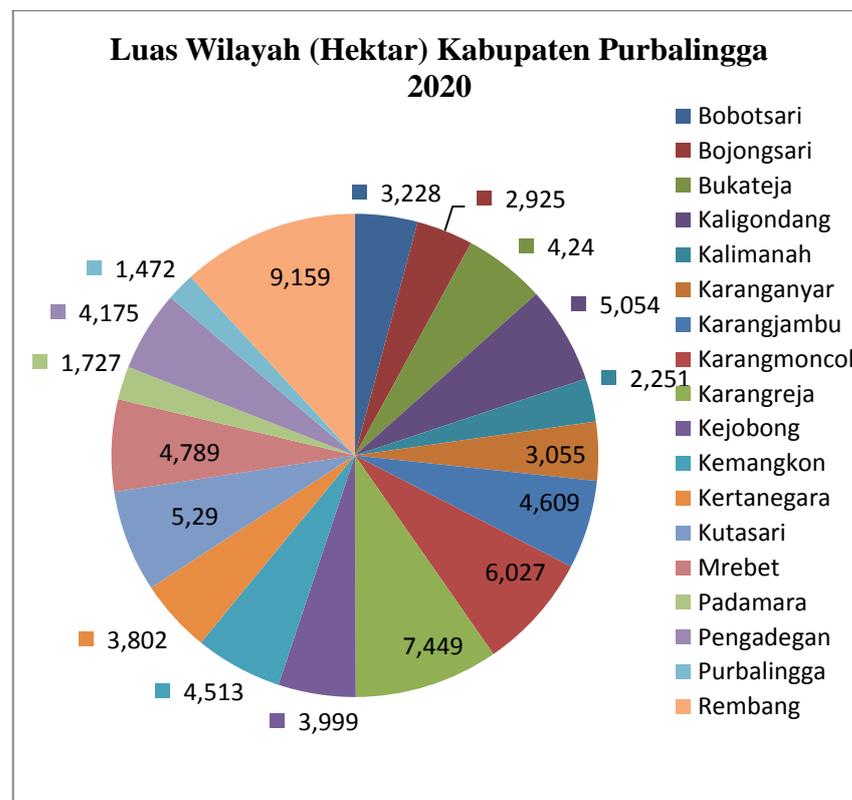
4. Motto Kabupaten Purbalingga

Membangun negeri dengan informasi

5. Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga saat ini memiliki luas wilayah keseluruhan berjumlah 77.764.122 hektar. Berdasarkan gambar 4.2 wilayah administratif Kabupaten Purbalingga memiliki tiga wilayah Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Rembang (9.159 ha), Kecamatan Karangreja (7.449 ha), dan Kecamatan Karang Moncol (6.027 ha). Selain itu terdapat tiga Kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Purbalingga (1.472 ha), Kecamatan Padamara (1.727 ha) dan Kecamatan Kalimanah (2.251 ha).

Gambar 4.2 Luas Kecamatan (hektar) di Kabupaten Purbalingga 2020



(Sumber: BPS, data diolah 2021)

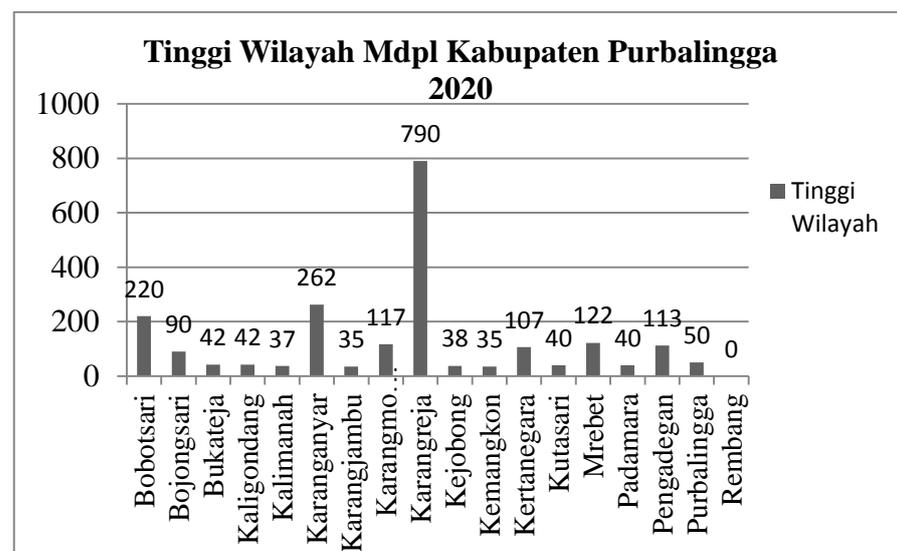
6. Topografi Wilayah Kabupaten Purbalingga

Topografi wilayah Kabupaten Purbalingga beraneka ragam yaitu meliputi daerah dataran tinggi atau perbukitan dan daerah dataran rendah.

Pertama, bagian Utara adalah wilayah dataran tinggi yang berbukit-bukit, dengan tingkat terbis/ kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi wilayah Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Kedua, bagian Selatan adalah wilayah yang relatif rendah dengan nilai tuding/ kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen, meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambar 4.3 Topografi wilayah (Mdpl) Kabupaten Purbalingga 2020

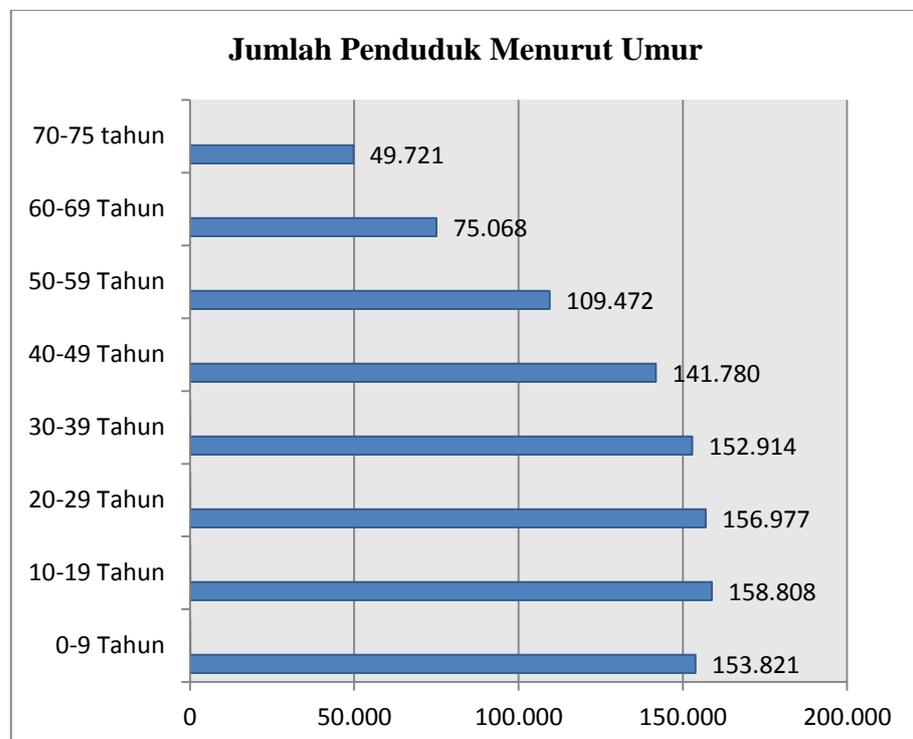


(Sumber: BPS, data diolah 2021)

7. Penduduk Kabupaten Purbalingga

Penduduk di Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur terdiri dari 0-14 tahun berjumlah 233.237 ribu/ jiwa dan kelompok 15 tahun keatas berjumlah 765.288 ribu/ jiwa. Gambar 4.4 menyajikan jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Purbalingga didominasi oleh penduduk berusia 10-19 tahun (158.808 ribu/ jiwa), kemudian penduduk berusia 20-29 tahun (156.977 ribu/ jiwa), penduduk berusia 0-9 tahun (153.821 ribu/ jiwa) dan penduduk berusia 30-39 tahun (152.914 ribu/ jiwa).

Gambar 4.4 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Purbalingga 2020



(Sumber: BPS, data diolah 2021)

8. Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja. Kesenjangan tenaga kerja salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah, ketrampilan yang minim dan ketidaksesuaian lapangan kerja yang tersedia. Pada poin a menjelaskan kondisi tenaga kerja menurut sekolah tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 yang didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD). Poin b menjelaskan struktur lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 yang didominasi oleh buruh/ karyawan/ pegawai.

a. Kondisi tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Pertama, lulusan sekolah dasar tercatat jumlah total angkatan kerja 359.925 ribu/ jiwa dengan rincian sebanyak 243.718 ribu/ jiwa penduduk bekerja. 9.476 ribu/ jiwa penduduk pengangguran dan bukan angkatan kerja sebanyak 106.731 ribu/ jiwa.

Kedua, lulusan sekolah menengah pertama tercatat jumlah total angkatan kerja 183.995 ribu/ jiwa dengan rincian sebanyak 107.145 ribu/ jiwa penduduk bekerja, sebanyak 6.880 ribu./ jiwa pengangguran, dan 69.970 ribu/ jiwa bukan angkatan kerja.

Ketiga, lulusan sekolah menengah atas tercatat jumlah total angkatan kerja 135.312 ribu/ jiwa dengan rincian sebanyak 89.378 ribu/ jiwa penduduk bekerja, sebanyak 10.564 ribu / jiwa pengangguran dan sebanyak 35.370 ribu/ jiwa bukan angkatan kerja.

Keempat, lulusan perguruan tinggi tercatat jumlah total angkatan kerja 36.527 ribu/ jiwa dengan rincian sebanyak 29.507 ribu/jiwa penduduk bekerja, sebanyak 3.593 ribu/ jiwa pengangguran dan 3.427 ribu/ jiwa bukan angkatan kerja.

b. Kondisi Tenaga Kerja Menurut Pekerjaan Utama di Kabupaten Purbalingga

Struktur tenaga kerja Kabupaten Purbalingga di dominasi oleh buruh atau karyawan atau pegawai dengan total angkatan kerja 157.236 ribu/ jiwa. Pekerja yang berusaha sendiri sebanyak 98.725ribu/ jiwa dan buruh tidak tetap sebanyak 85.012 ribu/ jiwa. Sedangkan struktur pekerjaan lainnya yaitu buruh tetap sebanyak 17.041 ribu/ jiwa, pekerja bebas sebanyak 55.768 ribu/ jiwa dan pekerja keluarga sebanyak 55.966 ribu/ jiwa. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Penduduk menurut status pekerjaan utama Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Berusaha Sendiri	61 028	37 697	98 725
Buruh Tetap	13 876	3 165	17 041
Buruh Tidak Tetap	57 898	27 114	85 012
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	86 801	70 435	157 236
Pekerja Bebas	44 954	10 814	55 768
Pekerja Keluarga/ tidak dibayar	13 753	42 213	55 966
Jumlah	278 310	191 438	469 748

(Sumber: BPS, data diolah 2021)

9. Sosial lainnya Kabupaten Purbalingga

Sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga terdapat sekolah TK/RA/BA sebanyak 507 sekolah dengan guru 898 orang, murid 17.134 siswa; SD/MI sebanyak 648 sekolah dengan guru 5.901 orang, murid 99.961 siswa; SMP/MTs sebanyak 116 sekolah dengan guru 1.044 orang, murid 44.087 siswa; SMA/MA/SMK sebanyak 60 sekolah dengan guru 563 orang, murid 18.428 siswa.

Fasilitas kesehatan Di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2018 jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga terdapat Rumah Sakit Umum 4 buah, Rumah Sakit Bersalin 2 buah, Puskesmas 22 buah, Puskesmas Pembantu 48 buah, Puskesmas Keliling 22 buah, dan Apotek 72 buah. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan dokter 319 orang, bidan 562 orang, dan paramedis lainnya 1.355 orang.

10. Perekonomian Kabupaten Purbalingga

a. Pertumbuhan ekonomi

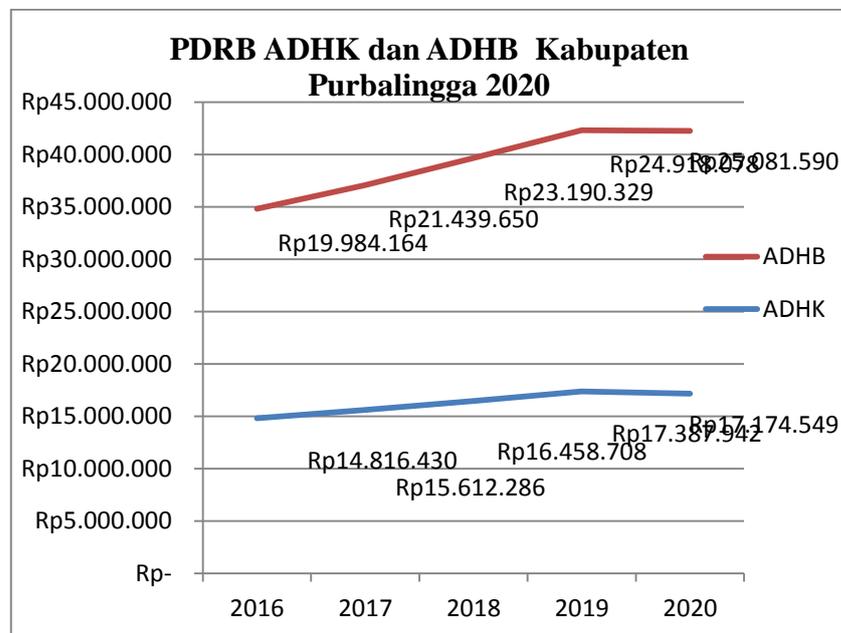
Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah/ daerah dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung dengan potensi yang tersedia, baik itu sumberdaya alam, sumber daya manusia (jumlah penduduk), modal dan keahlian yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan

produksi, kesempatan bekerja, tingkat pendapatan, kegiatan pemakaian barang atau jasa (konsumsi) serta penyaluran barang dan jasa (distribusi) dan akhirnya bermuara pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Gambar 4.5 menyajikan pendapatan domestik regional bruto ADHK dan ADHB Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020.

Pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Purbalingga atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 secara agregat ini cenderung fluktuatif. Tercatat pada tahun 2016 nilai PDRB Rp. 14.816.429,63,-. Pada tahun 2017 nilainya Rp. 15.612.285,90,- Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan nilainya sebesar Rp. 16.458.708,49,-. Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sehingga nilainya menjadi Rp. 17.387.941,84,- dan pada tahun 2020 mengalami penurunan nilainya menjadi Rp 17.174.549,06,-. Selain itu itu nilai pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Purbalingga secara agregat mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2016 memiliki nilai sebesar Rp.19.984,- miliar kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan nilai Rp. 21.440,- miliar, tahun 2018 nilainya Rp.23.190,- miliar dan terus mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020 dengan nilai Rp. 24.918,- dan Rp.25.082,-. Nilai tersebut tidak lepas dari peranan sektoral ekonomi pembentuk PDRB Kabupten Purbalingga. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.5 dibawah ini

Gambar 4.5 pendapatan rill PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Purbalingga tahun 2020



(Sumber:BPS, diolah 2021)

Berdasarkan pada gambar 4.5 maka dapat diketahui tren grafik secara agregat terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh kontraksi ekonomi Pandemi covid 19 sehingga seluruh sektor lapangan usaha mengalami penurunan produktivitas, dan penurunan tersebut terjadi bukan karena terjadinya kenaikan harga barang dan jasa (inflasi), melainkan arus perekonomian yang tidak stabil.

Sektoral pembentuk PDRB dengan penyajian 17 (tujuh belas sektor) yang tumbuh positif hanya 7 (tujuh) sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kehutanan dan peikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor

pengadaan air, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

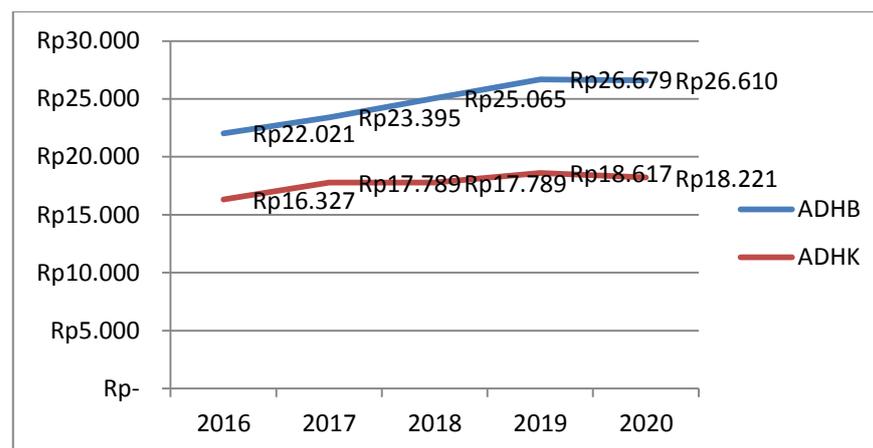
c. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah/ daerah. Selain itu nilai pendapatan perkapita secara tidak langsung berdampak pada nilai pengeluaran masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan primer (pokok) sub kategori kebutuhan pangan.

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut distribusi pengeluaran kriteria bank dunia adalah 40% penduduk berpendapatan rendah dengan pengeluaran rata-rata bulanan Rp. 434.753,-. 40% penduduk berpendapatan menengah dengan pengeluaran rata-rata perbulan Rp. 831.107,- dan 20% penduduk berpendapatan tinggi dengan pengeluaran rata-rata perbulan Rp. 1.918.053,-. Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok makanan Kabupaten Purbalingga (rupiah) tahun 2020 terdiri dari; padi-padian Rp. 52.098,-; minyak/lemak Rp. 11.005,-; sayuran Rp.35.935,-; konsumsi lainnya Rp. 7.736,-; tembakau/sirih Rp. 63.857,-; ikan, udang, kerang Rp. 10.143,-; telur dan susu Rp. 26.691,-; daging Rp.12.523,-; bumbu Rp.8.506,-; Kacang-kacangan Rp. 11.995,-; buah-buahan Rp. 20.843,-; bahan minuman Rp. 19.058,- dan umbi-umbian Rp. 2.974,-. Secara rinci

nilai pendapatan perkapita Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020 dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.6 Pendapatan perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Purbalingga (dalam juta rupiah) tahun 2016-2020.



(Sumber: BPS, data diolah 2021)

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa PDRB perkapita ADHK Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016-2020 tercatat nilai perkapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 16.327,-. Pada tahun 2017 meningkat dengan nilai Rp. 17.789,-. Pada tahun 2018 cenderung tetap/ tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 17.789,-. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 18.617 dan Rp. 18.221,- pada tahun 2020. Sementara itu nilai PDRB perkapita ADHB pada tahun 2016-2020 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2016 PDRB perkapita tercatat sebesar Rp 22,02,- juta. Empat tahun kemudian yaitu pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 26,61,- juta, kenaikan yang cukup tinggi selain perekonomian yang tumbuh juga karena inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) dalam masyarakat.

B. Hasil Analisis

1. Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektoral

Analisis tipologi klassen dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan gambaran struktur perekonomian wilayah/ daerah dalam hal ini Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan penyajian 17 (tujuh belas) sektor pembentuk PDRB sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor pengadaan listrik dan gas
5. Sektor pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Sektor konstruksi
7. Sektor perdagangan besar dan eceran
8. Sektor transportasi dan pergudangan
9. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Sektor informasi dan komunikasi
11. Sektor jasa keuangan dan asuransi
12. Sektor real estate
13. Sektor jasa perusahaan
14. Sektor administrasi pemerintah
15. Sektor jasa pendidikan
16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Sektor jasa lainnya.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis tipologi klasen berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor pembentuk PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor pembentuk PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Secara Kabupaten dapat diketahui bahwa terdapat sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling besar terhadap sektor ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Purbalingga yaitu sektor informasi dan komunikasi (12,63%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,80%) dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (5,81%). Selain itu sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga yaitu sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (25,80%), sektor industri pengolahan (26,11%) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (13,81%).

Secara Provinsi dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling besar terhadap PDRB Provinsi Jawa tengah adalah sektor informasi dan komunikasi (13,23%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,08%) dan sekor jasa pendidikan (5,52%). Selain itu sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan (34,31%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi

mobil dan sepeda motor (14,49%) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (12,99%) dan sektor konstruksi atau bangunan (10,37%).

Tabel 4.2 Hasil Analisis Tipologi Klasen Sektor PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purbalingga dan PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sektor	Kabupaten Purbalingga		Provinsi Jawa Tengah		Kuadran
	2016	2020	2016	2020	
1	2.48	25.80	2.07	12,99	I
2	2.76	4.12	2.53	2,23	I
3	4.55	26.11	2.53	34,31	II
4	4.57	0.06	4.46	0,11	II
5	4.93	0.12	4.51	0,07	I
6	4.81	6.26	3.60	10,37	II
7	3.61	13.81	3.45	14,49	II
8	-2.39	3.57	-2.70	3,28	III
9	5.81	2.59	3.92	3,24	II
10	12.63	2.62	13.23	4,91	IV
11	3.51	2.21	3.57	2,74	IV
12	4.42	1.25	4.33	1,89	II
13	6.75	0.19	5.39	0,38	II
14	2.26	2.65	2.14	2,58	I
15	5.63	5.37	5.52	3,86	I
16	7.80	1.12	8.08	0,87	III
17	5.48	2.14	4.86	1,67	I

(Sumber: BPS, data diolah 2022)

Berdasarkan pada tabel 4.2 sektor ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Purbalingga selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam matrik tipologi klasen sektoral. Matrik tipologi klasen sektoral menunjukkan pola atau gambaran sektoral ekonomi Kabupaten Purbalingga berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusinya yaitu dengan cara membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat Provinsi Jawa tengah.

Tabel 4.3 menyajikan matrik tipologi klasen sektor ekonomi PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020.

Hasil analisis menunjukkan pada kuadran I kategori sektor maju dan cepat tumbuh (*high growth and high share*) terdiri dari; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Kuadran II kategori sektor maju tapi tertekan (*high growth but low share*) terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor perdagangan listrik dan gas; sektor kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor real estate dan sektor jasa perusahaan. Kuadran III kategori sektor potensial tapi masih bisa berkembang (*high share and low growth*) terdiri dari sektor transportasi dan pergudangan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kuadran IV kategori sektor relatif

tertinggal (*low growth and low share*) yaitu sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 4.3 klasifikasi tipologi klasen sektor PDRB wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan	Kontribusi		
	Yik>Yi	Yik<Yi	
rik>ri	<p>Kuadran I Kategori sektor maju dan cepat tumbuh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 2. Sektor pertambangan dan penggalan 3. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang 4. Sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 5. Sektor jasa pendidikan 6. Sektor jasa lainnya 	<p>Kuadran II Kategori sektor maju tapi tertekan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor industri pengolahan 2. Sektor perdagangan listrik dan gas 3. Sektor konstruksi 4. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 5. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 6. Real estate 7. Jasa perusahaan 	
	<p>Kuadran III Kategori sektor potensial yang masih bisa berkembang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor transportasi dan pergudangan 2. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 	<p>Kuadran IV Kategori sektor relatif tertinggal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor informasi dan komunikasi 2. Sektor jasa keuangan dan asuransi 	
	rik<ri		

(Sumber: data diolah dari tabel 4.3)

2. Hasil Analisis *Location Quotient* (*LQ*)

Analisis *LQ* digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi disuatu daerah, atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis/ sektor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi serta daya saingnya, dan sektor nonbasis/ sektor yang menyediakan barang maupun jasa untuk kebutuhan lokal tanpa melakukan kegiatan ekspor ke wilayah lainnya.

Analisis *LQ* membagi sektor perekonomian menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pertama, dikatakan sektor basis apabila suatu sektor pembentuk PDRB bernilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Purbalingga lebih berspesialisasi memproduksi sektor tersebut dibandingkan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kedua, dikatakan sektor non basis apabila suatu sektor pembentuk PDRB bernilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Purbalingga kurang berspesialisasi memproduksi sektor tersebut. Ketiga, dikatakan sektor swasembada apabila suatu sektor ekonomi pembentuk PDRB bernilai $LQ = 1$ spesialisasi produksi nilainya sama baik pada tingkat Kabupaten/ Provinsi.

Tabel 4.4 menyajikan hasil analisis rata-rata *LQ* sektor ekonomi pembentuk PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga 2016-2020.

Hasil analisis *LQ* menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga pada nilai $LQ > 1$ atau yang disebut sektor basis terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1,98%), sektor

pertambangan dan penggalian (1,85%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (1,77%), sektor transportasi dan pergudangan (1,08%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,02%), sektor jasa pendidikan (1,39%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,27%) dan sektor jasa lainnya (1,27%).

Berdasarkan perhitungan dan analisis *location quotient (LQ)* diketahui bahwa sektoral pembentuk PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020 yang memiliki nilai $LQ < 1$ atau yang disebut sektor non basis terdiri dari sektor industri pengolahan (0,76%), Pengadaan listrik dan gas (0,57%), sektor konstruksi (0,60%) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (0,95%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (0,80), sektor informasi dan komunikasi (0,52%), sektor jasa keuangan dan asuransi (0,80), sektor real estate (0,66%) dan sektor jasa perusahaan (0,49%). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Hasil Analisis *LQ* Sektor PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Sektor lapangan usaha	Tahun					Rata-rata LQ	Kategori
	2016	2017	2018	2019	2020		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	Basis
Industri Pengolahan	0,74	0,75	0,75	0,77	0,78	0,76	Non basis
Informasi dan Komunikasi	0,52	0,53	0,54	0,53	0,50	0,52	Non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,28	1,28	1,28	1,24	1,27	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,80	Non basis
Jasa Lainnya	1,27	1,27	1,28	1,27	1,28	1,27	Basis
Jasa Pendidikan	1,39	1,39	1,39	1,39	1,37	1,39	Basis
Jasa Perusahaan	0,49	0,49	0,49	0,49	0,51	0,49	Non basis
Konstruksi	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,75	1,76	1,79	1,80	1,75	1,77	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	Non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,79	0,79	0,79	0,83	0,80	Non basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	Non basis
Pertambangan dan Penggalan	1,88	1,80	1,84	1,86	1,86	1,85	Basis
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,96	1,97	2,00	2,00	1,96	1,98	Basis
Real Estat	0,66	0,65	0,66	0,66	0,65	0,66	Non basis
Transportasi dan Pergudangan	1,09	1,09	1,07	1,07	1,10	1,08	Basis

(Sumber: BPS, data diolah 2021)

3. Hasil Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Secara umum laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian seperti inflasi, fluktuasi dan lain sebagainya, sehingga sektor perekonomian bisa mengalami perubahan dari sektor basis ke non basis atau sebaliknya. Oleh karena itulah analisis *DLQ* penting digunakan untuk melihat posisi suatu perekonomian, dalam hal ini sektoral pembentuk PDRB yang memiliki potensi untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.

Analisis *DLQ* mengklasifikasikan sektor perekonomian kedalam 2 (dua) kategori yaitu apabila nilai $DLQ > 1$ maka sektor tersebut tergolong sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, dan apabila $DLQ < 1$ maka sektor tersebut tergolong sektor yang tidak memiliki prospek untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.

Pada tabel 4.5 menyajikan hasil analisis *DLQ* sektor pembentuk PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016-2020 menggunakan perbandingan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Jawa tengah.

Hasil analisis *DLQ* menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga menurut sektor pembentuk PDRB yang memiliki nilai $DLQ > 1$ atau merupakan sektor unggulan terdiri dari; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1,02%), sektor industri pengolahan (1,42%), sektor konstruksi (1,14%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

(1,24%), sektor jasa perusahaan (1,09%) dan sektor jasa lainnya (1,00%)

Tabel 4.5 Hasil Analisis DLQ Sektor PDRB ADHK 2010
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Sektor	Rata-rata DLQ	Klaifikasi	Kategori
1	1,02	DLQ >1	Sektor Unggulan
2	0,96	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
3	1,42	DLQ>1	Sektor Unggulan
4	0,92	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
5	0,97	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
6	1,14	DLQ>1	Sektor Unggulan
7	0,93	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
8	0,74	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
9	1,24	DLQ>1	Sektor Unggulan
10	0,86	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
11	0,89	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
12	0,92	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
13	1,09	DLQ>1	Sektor Unggulan
14	0,93	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
15	0,92	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
16	0,87	DLQ<1	Bukan Sektor Unggulan
17	1,00	DLQ>1	Sektor Unggulan

(Sumber: BPS, diolah 2021)

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sektor ekonomi pembentuk PDRB yang memiliki nilai $DLQ < 1$ atau sektor yang tidak memiliki prospek untuk dikembangkan di masa yang akan datang terdiri dari; sektor pertambangan dan penggalian (0,96%), sektor pengadaan listrik dan gas (0,92%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,97%), sektor perdagangan besar dan eceran; repari mobil dan sepeda motor (0,93%), sektor transportasi dan pergudangan (0,74%), sektor informasi dan komunikasi (0,86%), sektor jasa keuangan dan asuransi (0,89%), sektor real estate (0,92%),

sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (0,92%), sektor jasa pendidikan (0,92%) dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,87%).

4. Hasil Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi antar sektor ekonomi dan pergeserannya, dengan cara membandingkan pertumbuhan sektor di wilayah analisis dan sektor yang sama di wilayah acuan.

Analisis *shift share* memiliki 3 (tiga) komponen utama. Pertama, *national share* (N/ N_{ij}) menunjukkan laju sektor perekonomian berdasarkan tingkat teratas. Kedua, *propotional shift* (P/ M_{ij}) merupakan bauran industri di suatu wilayah yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap laju pertumbuhan sektor perekonomian. Ketiga, *differential shift* (D/ C_{ij}) menunjukkan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki keunggulan kompetitif. Dampak nyata dari ketiga komponen tersebut dinyatakan dalam nilai *regional share* (D_{ij}).

Tabel 4.6 menyajikan hasil analisis *shift share* sektor ekonomi PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga dengan perbandingan yang sama yaitu sektor ekonomi PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada nilai PDRB Kabupaten Purbalingga telah mengalami perubahan ke arah yang positif,

diketahui pada tahun 2016 nilainya sebesar Rp. 2.033.395,20 milyar dan pada tahun 2020 Rp. 2.358.119,43 milyar. Menurut perhitungan komponen *Nij* pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mencapai Rp. 2.033.359,20 milyar, nilai positif tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Purbalingga disemua sektor (17 sektor) masih bergantung pada perekonomian tingkat Provinsi Jawa Tengah atau pertumbuhan pada sektor tersebut secara positif dipengaruhi oleh perekonomian tingkat Provinsi Jawa Tengah. Artinya semua kebijakan yang dilakukan baik itu pajak, retribusi daerah dan arah pembangunan membawa dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (*Nij*), bauran industri (*Mij*) dan keunggulan kompetitif sektoral (*Cij*).

Pertama, komponen *Nij* yang mengalami pertumbuhan lebih cepat atau memiliki nilai teratas adalah sektor pertanian, kehutanan perikanan (Rp. 548.148,60), sektor industri pengolahan (Rp. 525.197,49) sektor konstruksi (Rp. 122.802,19), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Rp. 278.349,29) dan sektor jasa pendidikan (Rp. 105.021,25).

Kedua, komponen *Mij* atau bauran industri (*mix industry*) menunjukkan bahwa pengaruh bauran industri wilayah Provinsi Jawa Tengah membawa arah negatif bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dengan nilai Rp -212.613,97

milyar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa komposisi sektoral Kabupaten Purbalingga mengarah pada perekonomian yang pertumbuhannya lambat dibandingkan tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Komponen *Mij* yang bernilai positif atau tumbuh lebih cepat di wilayah analisis dibandingkan wilayah acuan adalah sektor pengadaan listrik dan gas (Rp. 496,62), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang (Rp. 996,61), sektor konstruksi (Rp. 9.386,29) sektor perdagangan besar dan eceran (Rp. 8.589,00), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (Rp. 6.701,57), sektor informasi dan komunikasi (Rp. 166.565,77), sektor jasa keuangan dan asuransi (Rp. 4.375,48), sektor real estate (Rp. 8.395,99), sektor jasa perusahaan (Rp. 2.190,70), sektor jasa pendidikan (Rp. 76.534,70), sektor jasa kesehatan (Rp. 35.225,75) dan sektor jasa lainnya (Rp. 17.575,20).

Sementara itu sektor yang memiliki nilai negatif atau memiliki pertumbuhan yang lambat di wilayah analisis dibanding wilayah acuan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp. -207.371,28), sektor pertambangan dan penggalan (Rp. -21.060,42), sektor industri pengolahan (Rp. -134.644,10), sektor transportasi dan pergudangan (Rp. -166.044,57) dan sektor administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Rp. -20.527,29).

Ketiga, komponen *Cij* atau keunggulan kompetitif, hasil perhitungan menunjukkan nilai sebesar Rp. 537.338,20 milyar, artinya

bahwa keunggulan kompetitif (daya saing) sektoral di Kabupaten Purbalingga membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonominya.

Komponen *Cij* yang memiliki nilai positif atau sektor yang lebih kompetitif di wilayah analisis dibandingkan wilayah acuan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp. 70.307,96), sektor pertambangan dan penggalian (Rp. 6.464,41), sektor industri pengolahan (Rp. 348.275,96), sektor pengadaan listrik dan gas (Rp. 48,57), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (Rp. 336,3), sektor konstruksi (Rp. 49.091,10), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Rp. 12.863,01), sektor transportasi dan pergudangan (Rp. 12.471,32), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (Rp. 6.701,57), sektor jasa perusahaan (Rp. 1.834,37), sektor real estate (Rp. 798,56), sektor jasa pendidikan (Rp. 4.003,06), sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Rp. 2.225,71) dan sektor jasa lainnya (Rp. 9.286,70).

Sementara itu komponen *Cij* yang memiliki nilai negatif atau memiliki pertumbuhan yang lambat di wilayah analisis dibandingkan wilayah acuan yaitu sektor informasi dan komunikasi (Rp. -11.695,79), sektor jasa keuangan dan asuransi (Rp. -969,39), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Rp. -2.227,27). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Lapangan usaha	<i>National shift</i>	<i>Propotional shift</i>	<i>Differential shift</i>	<i>Regional shift</i>
Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	56.492,90	-20.527,29	2.225,71	38.191,32
Industri pengolahan	525.197,49	-134.644,10	348.275,96	738.829,35
Informasi dan komunikasi	45.162,50	166.565,77	-11.695,79	200.032,48
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	21.283,61	35.225,75	-2.227,27	54.282,09
Jasa keuangan dan asuransi	45.692,82	4.375,48	-969,39	49.098,91
Jasa lainnya	40.897,34	17.575,20	9.286,70	67.759,24
Jasa pendidikan	105.021,25	76.534,70	4.003,06	185.559,01
Jasa perusahaan	3.583,17	2.190,70	1.834,37	7.608,24
Konstruksi	122.802,19	9.386,29	49.091,10	181.279,58
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2.484,12	996,61	336,3	3.817,03
Pengadan listrik dan gas	1.284,42	496,62	48,57	1.829,61
Penyediaan akomodasi dan makan minum	50.493,88	6.701,57	34.223,60	91.419,05
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	278.349,29	8.589,00	12.863,01	299.801,30
Pertambangan dan penggalian	87.422,14	-21.060,42	6.464,41	72.826,13
Pertanian, kehutanan dan perikanan	548.148,60	-207.371,28	70.307,96	411.085,28
Real estate	25.120,67	8.395,99	798,56	34.315,22
Transportasi dan pergudangan	73.958,79	-166.044,57	12.471,32	-79.614,46
PDRB	2.033.395,20	-212.613,97	537.338,20	2.358.119,43

(Sumber: BPS, data diolah 2021)

5. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP digunakan untuk melihat perbandingan laju pertumbuhan ekonomi pada skala yang lebih luas ataupun kecil, selain itu dapat digunakan untuk melihat deskripsi atau sektor ekonomi yang bersifat lebih makro dalam struktur ekonomi wilayah. Analisis MRP dibagi menjadi 2 (dua) yaitu RPr atau rasio pertumbuhan PDRB sektor *i* di wilayah referensi dan RPs atau rasio pertumbuhan PDRB sektor *i* di wilayah studi.

Analisis MRP membagi sektor ekonomi kedalam 4 kategori yaitu klasifikasi 1 untuk nilai RPr (+) dan nilai Rps (+) artinya sektor *i* di wilayah analisis maupun di wilayah acuan memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Klasifikasi 2 untuk nilai RPr (+) dan nilai RPs (-) artinya sektor *i* di wilayah referensi memiliki laju pertumbuhan yang cepat namun di wilayah analisis laju pertumbuhannya lambat. Klasifikasi 3 untuk nilai RPr (-) dan nilai RPs (+) artinya sektor *i* di wilayah referensi memiliki laju pertumbuhan yang lambat namun di wilayah analisis laju pertumbuhannya cepat. Klasifikasi 4 untuk nilai RPr (-) dan nilai RPs (-) artinya sektor *i* memiliki laju pertumbuhan yang lambat di wilayah referensi maupun wilayah acuan.

Pada tabel 4.7 menyajikan hasil analisis MRP sektor pembentuk PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga dengan perbandingan PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbandingan sektor ekonomi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Purbalingga hanya masuk ke klasifikasi 3 dan 4 sebagai berikut:

Klasifikasi 3 atau sektor yang memiliki nilai RPr (-) dan nilai RPs (+) tergolong sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki laju pertumbuhan yang cepat di wilayah Kabupaten Purbalingga. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan.

Klasifikasi 4 atau sektor yang memiliki nilai RPr (-) dan nilai RPs (-) tergolong sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang lambat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, demikian juga di wilayah Kabupaten Purbalingga laju pertumbuhannya lambat. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Sektor	Rpr	Tanda	Rps	Tanda	Klasifikasi
1	0,62	-	1,08	+	3
2	0,76	-	0,00	-	4
3	0,74	-	0,00	-	4
4	0,74	-	1,15	+	3
5	0,00	-	2,26	+	3
6	0,10	-	0,00	-	4
7	0,14	-	0,00	-	4
8	0,02	-	0,00	-	4
9	0,03	-	0,00	-	4
10	0,06	-	0,00	-	4
11	0,03	-	0,00	-	4
12	0,02	-	0,00	-	4
13	0,00	-	3,49	+	3
14	0,03	-	0,00	-	4
15	0,04	-	0,00	-	4
16	0,01	-	0,00	-	4
17	0,02	-	0,00	-	4

(Sumber: BPS, data diolah 2021)

6. Hasil Analisis *Overlay*

Analisis *overlay* digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan pada tingkat Provinsi atau dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya. Analisis *overlay* merupakan indeks perbandingan atau kombinasi dari hasil analisis *LQ* dan MRP dalam hal ini rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs).

Analisis *overlay* mengklasifikasikan sektor ekonomi menjadi 4 yaitu klasifikasi 1 untuk sektor ekonomi yang memiliki nilai pertumbuhan positif dan nilai dan nilai kontribusi positif ($LQ > 1$ dan RPs positif). Klasifikasi 2 untuk sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan positif dan kontribusi negatif ($LQ > 1$ dan RPs negatif).

Klasifikasi 3 untuk sektor yang memiliki pertumbuhan negatif dan kontribusi positif ($LQ < 1$ dan RPs positif). Klasifikasi 4 untuk sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan negatif dan RPs negatif ($LQ < 1$ dan $RPs < 1$).

Tabel 4.8 menyajikan hasil analisis MRP sektor pembentuk PDRB ADHK 2010 Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga di dominasi oleh sektor yang memiliki laju pertumbuhan positif dan kontribusi negatif (klasifikasi 2), selain itu sektor yang memiliki laju pertumbuhan negatif dan kontribusinya negatif (klasifikasi 4). Adapun klasifikasi analisis *overlay* sebagai berikut:

- a. Klasifikasi 1 sektor ekonomi yang memiliki nilai pertumbuhan positif dan nilai kontribusi positif yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
- b. Klasifikasi 2 sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan positif dan kontribusi negatif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.
- c. Klasifikasi 3 sektor yang memiliki pertumbuhan negatif dan kontribusi positif yaitu sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor jasa perusahaan.

d. Klasifikasi 4 sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan negatif dan kontribusinya negatif yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Hasil Analisis *Overlay*

Sektor	Rata-rata <i>LQ</i>	Tanda	Rps	Tanda	Klasifikasi
1	1,98	+	1,08	-	2
2	1,85	+	0,00	-	2
3	0,76	-	0,00	-	4
4	0,57	-	1,15	+	3
5	1,77	+	2,26	+	1
6	0,60	-	0,00	-	4
7	0,95	-	0,00	-	4
8	1,08	+	0,00	-	2
9	0,80	-	0,00	-	4
10	0,52	-	0,00	-	4
11	0,80	-	0,00	-	4
12	0,66	-	0,00	-	4
13	0,49	-	3,49	+	3
14	1,02	+	0,00	-	2
15	1,39	+	0,00	-	2
16	1,27	+	0,00	-	2
17	1,27	+	0,00	-	2

(Sumber: tabel 4.5 dan tabel 4.8 diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sektor perekonomian Kabupaten Purbalingga dari 17 sektor pembentuk PDRB hanya memiliki 1 sektor yang laju pertumbuhan dan kontribusinya cepat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Sektor tersebut yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang.

C. Pembahasan

1. Pembahasan Analisis Tipologi Klasen Sektoral

Hasil perhitungan dan analisis tipologi klasen sektoral menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga memiliki 6 (enam) sektor yang potensial untuk dikembangkan karena nilai rata-rata pertumbuhan dan nilai rata-rata kontribusinya lebih besar dibandingkan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa lainnya.

Penelitian ini menggunakan acuan dasar penelitian yang dilakukan oleh Irawaty Masloman pada tahun 2020 dengan judul penelitian “*Analisis Sektor Potensial Dan Unggulan Di Kota Tomohon*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Tomohon terdapat 6 (enam) sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri dan pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu analisis tipologi klasen dan analisis *LQ*.

2. Pembahasan Analisis *Location Quotient (LQ)*

Hasil perhitungan dan analisis *LQ* menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga memiliki 8 (delapan) sektor basis atau sektor penggerak diantara sektor yang lainnya. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Penelitian ini menggunakan acuan dasar penelitian yang dilakukan oleh Hernadianto, Thansi dan Afri Erisman pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Seluma*”. Hasil perhitungan dan analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma masih betumpu pada sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan corak kegiatan ekonomi masyarakat yang masih tradisional. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu analisis *LQ* dan *overlay*. Disamping itu sejalan dengan teori basis ekspor Douglas yang kemudian dikembangkan oleh Tibout bahwa teori ini membagi sektor produksi/ sektor pekerjaan menjadi 2 (dua) yaitu sektor basis (dasar) dan sektor non basis (pelayanan).

Sektor basis bersifat tidak terikat pada kondisi internal daerah dan berfungsi untuk mendorong jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor *service* atau pelayanan yang berfungsi sebagai sektor untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Terdapat penekanan pada teori ini yaitu bahwa suatu daerah tidak perlu menjadi kawasan industri untuk meningkatkan perekonomian, suatu daerah dapat tumbuh dengan cepat apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan manfaat dari keunggulan komparatif atau sektor basis ekspor, ketimpangan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh adanya potensi wilayah yang berbeda-beda.

3. Pembahasan Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Hasil perhitungan dan analisis *DLQ* menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga memiliki 6 (enam) sektor unggulan yang dapat digunakan sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Penelitian ini menggunakan acuan dasar penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwi Cahyono, Aisah Jumiaty dan Duwi Yunitasari pada tahun 2021 dengan judul "*Analisis Sektor Potensial Dalam Pengembangan Pembangunan Perekonomian Provinsi Gorontalo*". Hasil perhitungan dan analisis *DLQ* menunjukkan bahwa

Provinsi Gorontalo memiliki 10 (sepuluh) sektor unggulan atau berpotensi untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa pendidikan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor real estate. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu analisis *DLQ*, MRP dan skalogram.

4. Pembahasan Analisis *Shift Share*

Hasil perhitungan dan analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga secara agregat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sejalan dengan perekonomian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi terjadi tidak lepas dari 3 (tiga) komponen *shift share*. Pertama, komponen *national shift* tumbuh positif dengan nilai Rp 2.033.395,20. Kedua, komponen *propotional shift* atau bauran industri membawa dampak negatif terhadap perekonomian, sektor yang tumbuh negatif karena *mix industry* adalah sektor pertanian, kehutanan dan pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Ketiga, komponen *differential*

shift atau keunggulan kompetitif/ sektor yang berdaya saing terhadap perekonomian adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa perusahaan, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah dan jasa lainnya.

Penelitian ini menggunakan acuan dasar penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Analisis Potensi Sektoral Dalam Pengembangan Ekonomi*”. Penelitian ini menggunakan 3 teknik analisis yang terdiri dari analisis *LQ*, *shift share* dan tipologi klasen. Hasil perhitungan dan analisis penelitian ini yaitu kota kendari mempunyai 5 (lima) sektor ekonomi yang berdaya saing (*competitive advantages*). Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor administrasi pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

5. Pembahasan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Hasil perhitungan dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan cepat di wilayah Kabupaten

Purbalingga yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan.

Penelitian ini menggunakan acuan dasar penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwi Cahyono, Aisah Jumiati dan Duwi Yunitasari pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Sektor Potensial Dalam Pengembangan Pembangunan Perekonomian Provinsi Gorontalo*”. Hasil perhitungan dan analisis MRP menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki 9 (sembilan) sektor dengan pertumbuhan yang cepat di wilayah Gorontalo dibandingkan pertumbuhan di wilayah referensi. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate dan sektor jasa pendidikan

6. Pembahasan Analisis *Overlay*

Hasil perhitungan dan analisis *overlay* menunjukkan bahwa sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Purbalingga memiliki 1 (satu) sektor dengan laju pertumbuhan dan kontribusinya cepat di tingkat Provinsi dan Kabupaten yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Terdapat 7 (tujuh) sektor dengan laju pertumbuhan cepat di wilayah Provinsi dan lambat

diwilayah Kabupaten. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Terdapat 2 (dua) sektor yang memiliki laju pertumbuhan lambat di wilayah Provinsi namun kontribusinya cepat di wilayah Kabupaten Purbalingga. Sektor tersebut yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa perusahaan, terdapat 7 (tujuh) sektor dengan laju pertumbuhan dan kontribusi lambat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Sektor tersebut yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor real estate.

Penelitian ini menggunakan acuan dasar penelitian yang dilakukan oleh Hernadianto, Thansi dan Afri Erisman pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Keunggulan Kompetitif Sektoral Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Seluma*". Hasil perhitungan dan analisis pada penelitian ini bahwa Kabupaten Seluma masih betumpu pada sektor primer yaitu sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) dengan corak kegiatan ekonomi perdagangan dan buruh yang masih tradisional/ budaya lokal masih sangat mempengaruhi ekonomi Kabupaten Seluma.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu analisis *LQ* dan *overlay*.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas pada analisis tipologi klasen sektoral, analisis *location quotient (LQ)*, analisis *dynamic location quotient (DLQ)*, analisis *shift share* dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga penyajian 17 (tujuh belas) sektor di dominasi oleh kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Purbalingga sebagian besar ditopang oleh sektor primer/ sektor yang mengandalkan kekayaan alam secara langsung. Sektor primer merupakan sektor yang kebal terhadap kondisi perekonomian, selain itu produktivitas pada sektor primer didasarkan pada kondisi geografis wilayah seperti curah hujan, iklim atau cuaca, penggunaan lahan dan faktor manusia (SDM) dan lain sebagainya.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sub kategori sektor ini adalah pertanian, tanaman perkebunan dan peternakan. Pada sektor pertanian golongan pokok sub kategori pertanian adalah tanaman pangan dan tanaman hortikultura.

Pertama, tanaman pangan yaitu semua kategori kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan mencakup padi-padian (padi sawah, padi ladang) dan palawija; jagung, umbi-umbian, kacang tanah, kacang hijau dan lain sebagainya. Tanaman

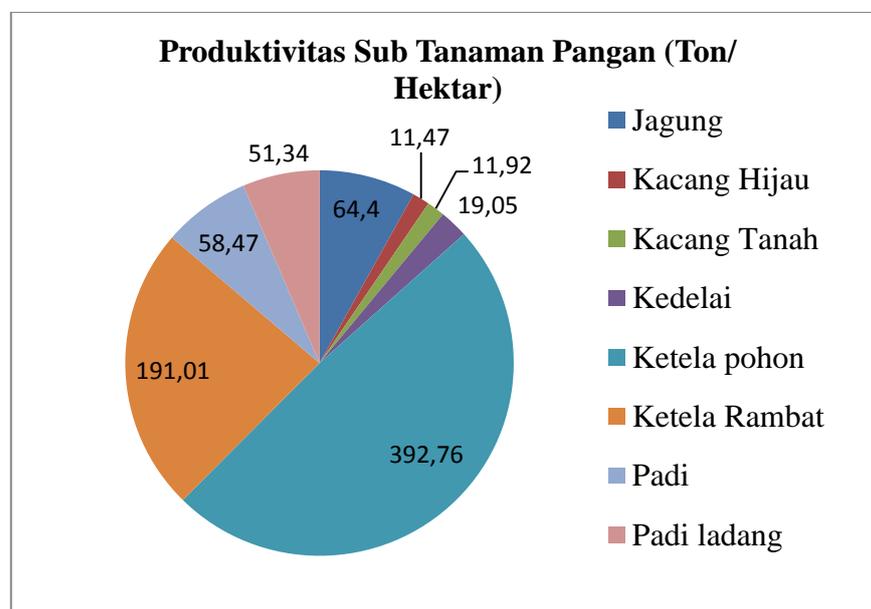
pangan tersebut termasuk ke golongan tanaman semusim dengan wujud produksi pada saat panen. Misalnya produksi padi dalam wujud gabah kering (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering dan umbi dalam wujud umbi basah.

Kategori pertanian sub kategori tanaman pangan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, kacang hijau.

1. Padi sawah dengan luas panen 32.352,70 hektar menyumbang nilai produksi 189.151,50 GKG dengan rata-rata produktivitas 58,47 ton/ hektar.
2. Padi ladang dengan luas 1,00 hektar menyumbang nilai produksi 5,13 ton (GKG) dengan rata-rata produktivitas 51,34 ton/hektar.
3. Jagung dengan luas panen 10.718,80 hektar menyumbang nilai produksi 69.029,42 ton pipilan kering dengan rata-rata produktivitas 64,40 ton/ hektar.
4. Ketela pohon dengan luas panen 1.513,70 hektar menyumbang nilai produksi 59.451,82 ton dengan rata-rata produktivitas 392,76 ton/ hektar; ketela rambat dengan luas panen 250,90 hektar menyumbang nilai produksi 4792,47 ton dengan rata-rata produktivitas 191,01 ton/ hektar.

5. Kacang tanah dengan luas panen 267,10 hektar menyumbang nilai produksi 318,48 ton dengan rata-rata produktivitas 11,92 ton/hektar.
6. Kedelai dengan luas panen 91,90 hektar menyumbang nilai produksi 175,08 ton dengan rata-rata produktivitas 19,05 ton/hektar.
7. Kacang hijau dengan luas panen 89,60 hektar menyumbang nilai produksi 102,77 ton dengan nilai rata-rata produktivitas 11,47 ton/hektar. Secara rinci dapat kita lihat pada gambar 4.7 dibawah ini:

Gambar 4.7 Produktivitas komoditi tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020



(Sumber: BPS, diolah 2021)

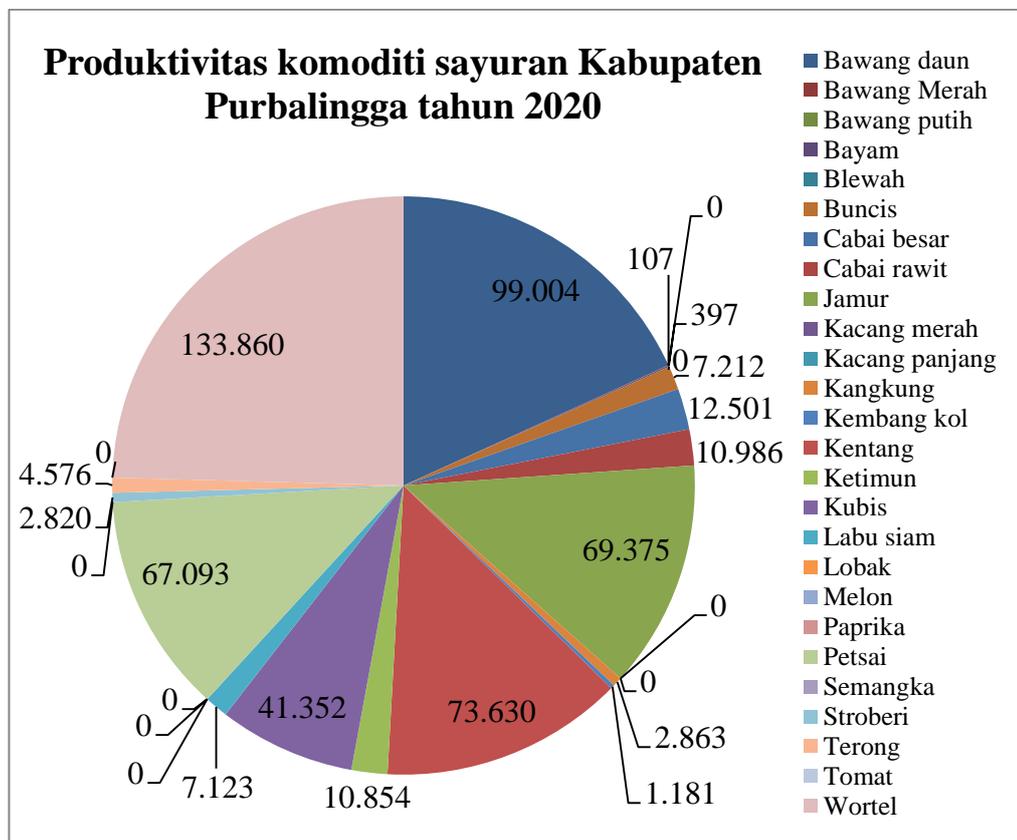
Sejalan dengan RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 tentang ketahanan

pangan yaitu terkait dengan ketergantungan kebutuhan pangan terutama beras, hal tersebut menyebabkan terjadinya tekanan terhadap produktivitas yang semakin tinggi dan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat semakin tinggi, disamping itu fakta empiris menyebutkan bahwa sub sektor tanaman pangan yang menjadi komoditi unggulan dengan nilai produktivitas tinggi adalah tanaman ketela pohon (palawija).

Kedua, tanaman hortikultura sub kategori pada tanaman ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tanaman semusim atau masa panen kurang dari 1 (satu) tahun dan tanaman tahunan dengan masa panen lebih dari 1 (satu) tahun. Komoditi tanaman hortikultura adalah sayuran, buah-buahan dan tanaman biofarmaka.

Produksi tanaman hortikultura pada tahun 2020 memiliki luas panen total sebanyak 4.463 hektar yang terbagi kedalam beberapa jenis sayuran dan didominasi oleh 5 (lima) sayuran dengan produktivitas tinggi. Sayuran tersebut yaitu wortel dengan nilai produktivitas 133.860 kwintal, bawang daun dengan nilai produktivitas 99.004 kwintal dan kentang dengan nilai produktivitas 73.630 kwintal, jamur dengan nilai produktivitas 69.375 kwintal dan *petsay* atau sawi dengan nilai produktivitas 67.093 kwintal. Secara rinci nilai produktivitas sayuran menurut jenisnya dapat kita lihat pada gambar 4.8 dibawah ini.

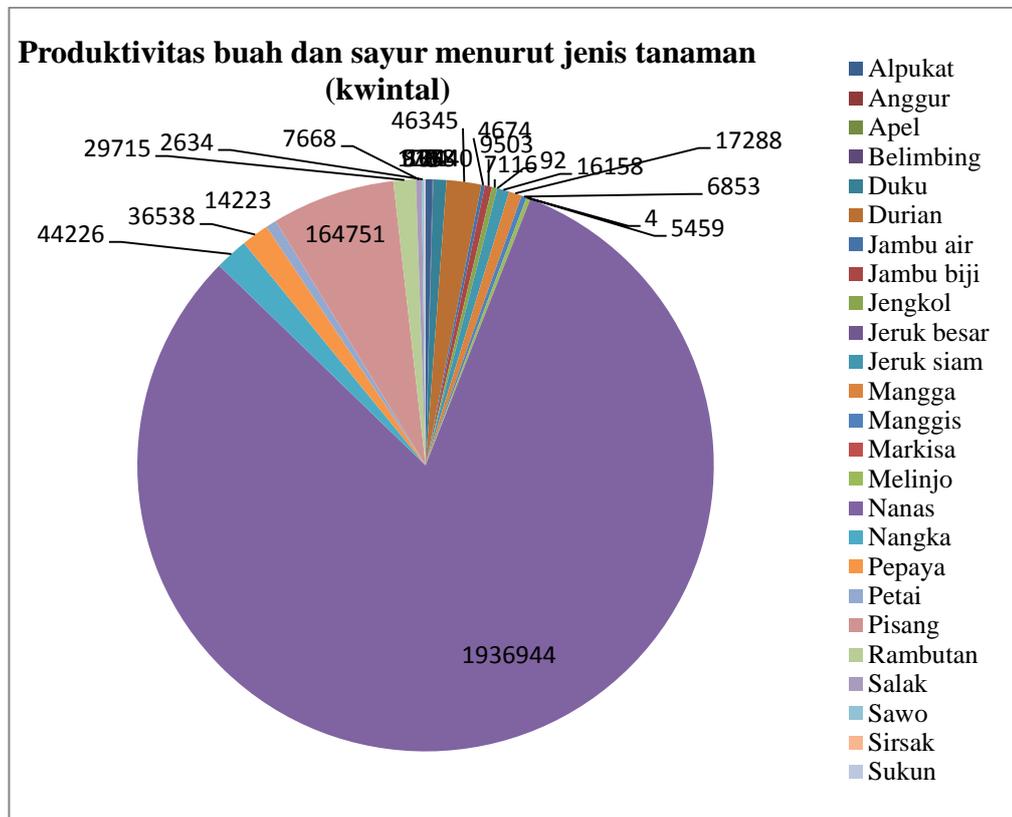
Gambar 4.8 Produktivitas komoditi sayuran di Kabupaten Purbalingga tahun 2020



(Sumber: BPS, diolah 2021)

Tanaman hortikultura kategori buah-buahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 memiliki 3 (tiga) komoditi buah yang menjadi primadona masyarakat umum yaitu buah nanas dengan pohon sebanyak 30.106.345 memiliki nilai produktivitas 1.936,944 kwintal, buah pisang dengan pohon sebanyak 230.424 memiliki nilai produktivitas 164,751 kwintal dan buah durian dengan pohon 44.423 memiliki nilai produktivitas 46.345 kwintal. Secara rinci dapat kita lihat pada gambar 4.9 dibawah ini.

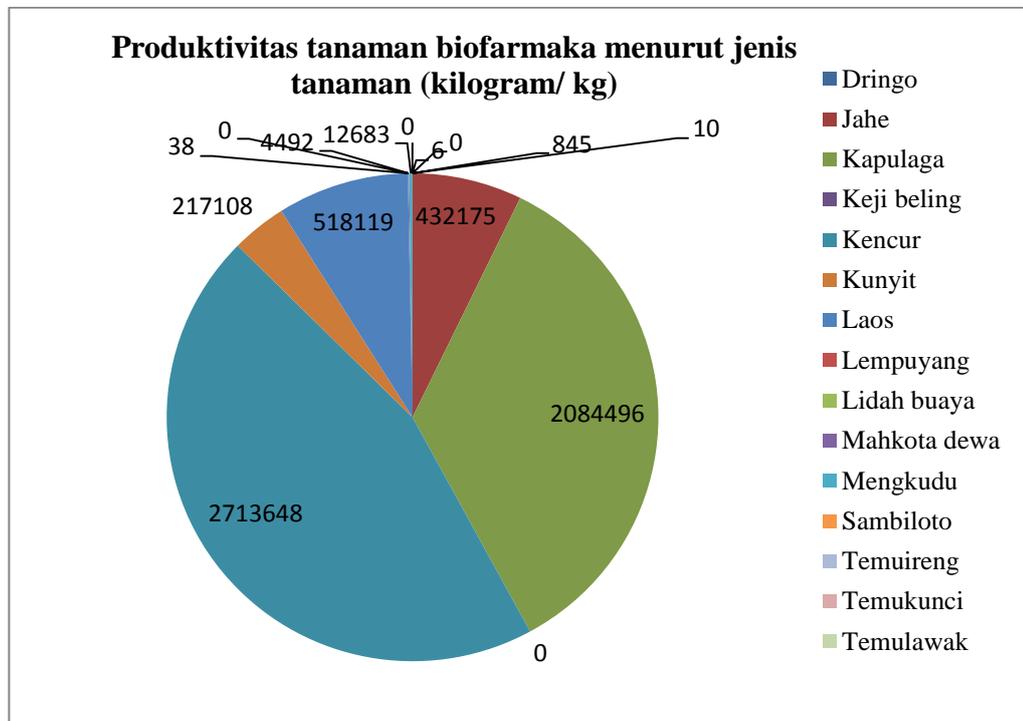
Gambar 4.9 Produktivitas komoditi buah dan sayur di Kabupaten Purbalingga tahun 2020.



(Sumber: BPS, diolah 2021)

Tanaman hortikultura kategori tanaman biofarmaka Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 memiliki luas panen total sebanyak 4.994.278 meter persegi yang terbagi kedalam beberapa tanaman biofarmaka dan didominasi oleh kapulaga dengan luas panen 3.225.493 meter persegi (m^2) menyumbang nilai produksi 2.084,496 kilo gram (Kg); dan kencur dengan luas panen 1.147.911 meter persegi (m^2) menyumbang nilai produksi 2.713.648 kilo gram (Kg). Secara rinci dapat kita lihat pada gambar 4.10 dibawah ini.

Gambar 4.10 Produktivitas tanaman biofarmaka Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



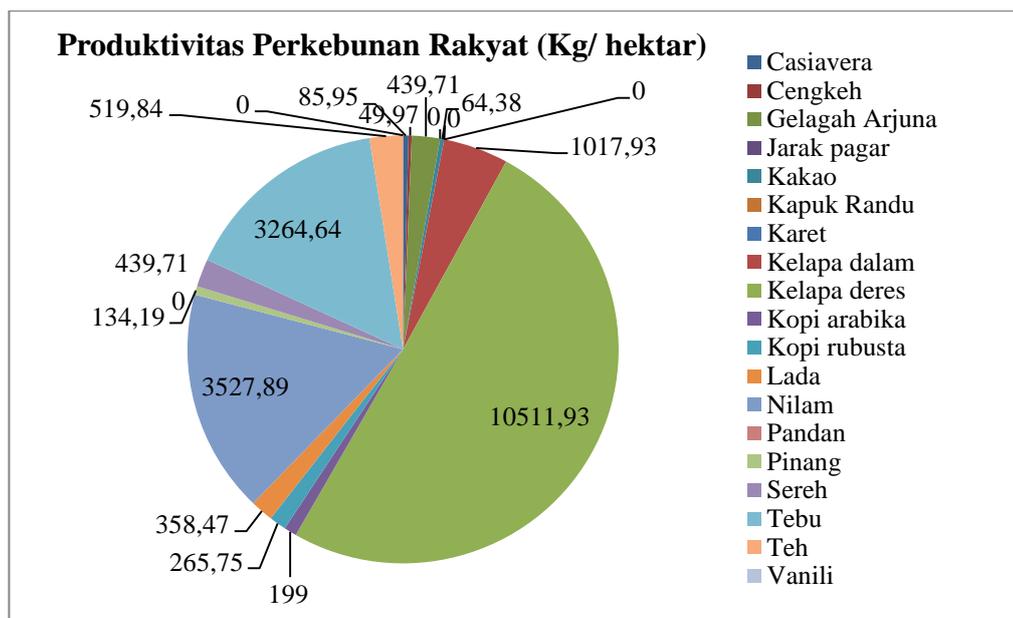
(Sumber: BPS, diolah 2021)

Tanaman Kehutanan sub kategori tanaman perkebunan yaitu terdiri dari tanaman perkebunan semusim atau dengan masa panen kurang dari 1 tahun dan tanaman tahunan atau masa panen lebih dari 1 tahun. Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengelolaan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen. Komoditas tanaman perkebunan mencakup kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete dan lain sebagainya. Tanaman perkebunan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 memiliki luas panen total sebanyak 19.421,31 hektar yang terbagi kedalam beberapa

jenis pertanian dan yang dominan ditanam oleh para petani adalah tanaman kelapa, kopi dan karet.

Pada tahun 2020 produksi kelapa mencapai 11.514,76 ton kopra dengan luas panen 11.311,98 hektar dan rata-rata produktivitas 1.017,93 kg/ hektar; kelapa deres menyumbang nilai produksi 55.600,94 ton dengan luas panen 5.289,32 hektar dan rata-rata produktivitas 10.511,93 kg/ hektar; tebu menyumbang nilai produksi 345,33 ton dengan luas panen 105,78 hektar dan rata-rata produktivitas 3.264,64 kg/ hektar. Selain itu kopi (kopi robusta dan kopi arabika) menyumbang nilai produksi 292 ton dengan luas panen 1.109,61 hektar dan rata-rata produktivitas 248,97 kg/ hektar. Secara rinci dapat kita lihat pada gambar 4.10 dibawah ini.

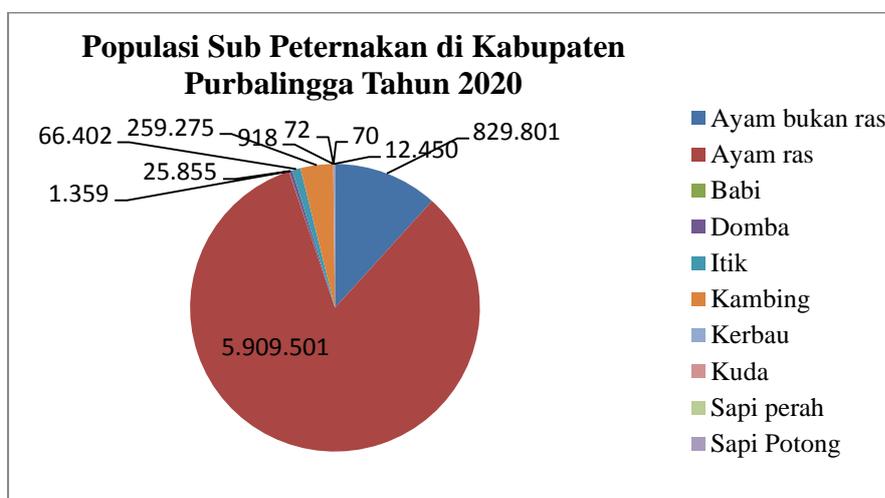
Gambar 4.11 produktivitas tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman di Kabupaten Purbalingga 2020



(Sumber: BPS, diolah 2021)

Sub kategori peternakan, sub kategori ini mencakup pengembangbiakan, budidaya ternak maupun unggas. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam ras, ayam bukan ras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik telur, dan susu. Populasi produk ternak dan unggas di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari 12.335 ekor menjadi 12.450 ekor sapi (sapi perah dan sapi potong), populasi kuda 72 ekor, populasi kerbau 918 ekor, populasi kambing 259.275 ekor, populasi domba 25.855 ekor, populasi babi 1.359 ekor. Selain itu pada unggas terdiri dari populasi ayam buras sebanyak 829.801 ekor dan itik 66.402 ekor. Secara Keseluruhan Kabupaten Purbalingga didominasi oleh ternak kambing dan unggas berupa ayam ras. Secara rinci dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.

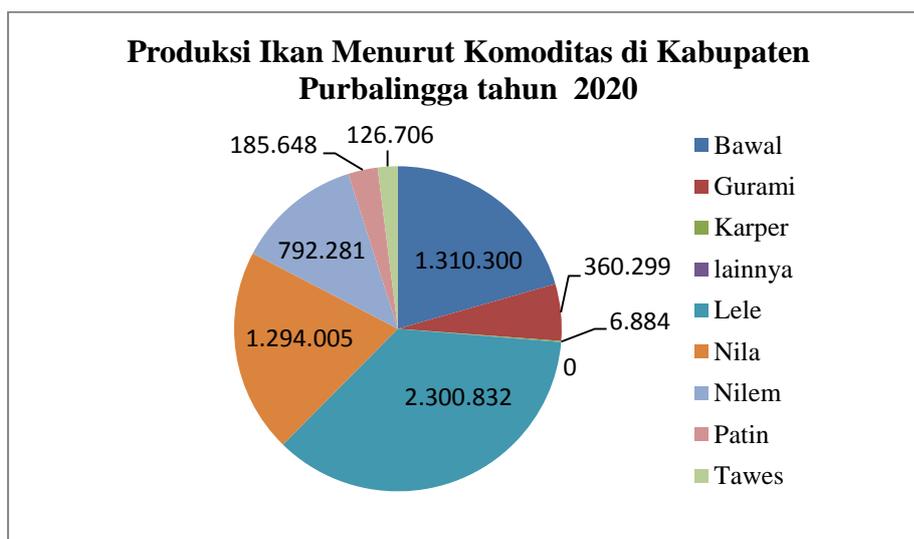
Gambar 4.12 populasi ternak dan unggas di Kabupaten Purbalingga tahun 2020



(Sumber: BPS, diolah 2021)

Sub kategori perikanan, sub kategori ini mencakup kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya baik yang berada di air tawar, air payau dan lain sebagainya. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan adalah segala jenis ikan, crustacea, moluska, dan lain-lain yang diperoleh dari penangkapan dan budidaya (laut, tambak, keramba, jaring apung, kolam dan sawah. Kegiatan perikanan tersebut adalah berupa jasa yang menunjang perikanan antas dasar balas jasa atau kontrak. Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 produksi ikan (kolam dan sungai) didominasi oleh ikan lele dengan jumlah sebanyak 2.300.832 ekor, ikan nila sebanyak 1.294.005 ekor dan ikan bawal 1.310.300 ekor. Secara rinci dapat kita lihat pada gambar 4.12 dibawah ini.

Gambar 4.13 produksi ikan menurut komoditas di Kabupaten Purbalingga tahun 2020



(Sumber: BPS, diolah 2021)

Berdasarkan pada hasil perhitungan dan analisis *overlay* diketahui bahwa sektor dengan pertumbuhan yang cepat di wilayah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang.

Kategori sektor ini berkaitan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah atau sampah seperti; limbah/ sampah padat dan sampah bukan padat baik berasal dari rumah tangga maupun industri yang dapat menyebabkan eksternalitas negatif atau pencemaran lingkungan.

Tercatat komposisi sampah di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terdiri dari sampah kertas 8,88 m³, kayu 2,32 m³, kain 2,32 m³, karet 5,20 m², plastik 18,25 m³, logam 0,72 m², kaca 0,89 m³, organik 60,55 m³ dan lain-lain 0,84 m³ dengan nilai produksi sampah perhari 2.368,25 m³ dan terangkut setiap harinya 345,03 m³.

Penumpukan sampah yang terjadi diakibatkan oleh kontraksi ekonomi yaitu wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan penumpukan sisa barang medis dan lain sebagainya, hal tersebut yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan dan kontribusi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang baik di lingkup wilayah/ regional sampai ke tingkat nasional/ Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengembangan hipotesis, hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kabupaten Purbalingga menurut 17 sektor lapangan usaha memiliki 6 (enam) sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor prioritas dengan nilai $Y_{ik} > Y_i$ dan $r_{ik} > r_i$ atau memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi cepat, kategori sektor maju dan cepat tumbuh. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Nilai kontribusi paling besar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (25,80%) nilai tersebut lebih unggul jika dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor yang sama pada tingkat Provinsi Jawa Tengah (12,99%).
2. Kabupaten Purbalingga menurut 17 sektor lapangan usaha memiliki 8 sektor penggerak/ basis ekonomi (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian;

sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya). Selain itu diperoleh 9 sektor non basis (sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate dan sektor jasa perusahaan). Terdapat 6 sektor potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya). Terdapat 14 sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor penadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa perusahaan; sektor real estate; sektor jasa pendidikan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa lainnya). Terdapat 4 sektor yang kompetitif di Kabupaten Purbalingga

(sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan) dan 1 sektor yang kompetitif baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi berdasarkan analisis overlay (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dengan melihat kondisi perekonomian yang semakin menurun diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan kinerja sektoral pembentuk PDRB Kabupaten Purbalingga, terutama pada sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, sektor yang masih tertinggal, sektor non basis agar mampu menjadi sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif.
2. Dengan melihat struktur perekonomian yang masih berorientasi pada sektor primer dengan laju pertumbuhan dan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, diharapkan pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam bidang pemberdayaan masyarakat (petani) melalui pelatihan dan bimbingan teknis dengan cara mengubah pola pertanian tradisional dengan pola pertanian kurtival strategis (komersial) atau pola transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern yang

didukung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas produktivitas pertanian baik itu pada sewa lahan, benih, pupuk/ obat-obatan, peralatan pertanian dan diservikasi tanaman unggulan.

3. Dengan melihat potensi alam yang melimpah di Kabupaten Purbalingga diharapkan pemerintah konsisten dalam mendukung usaha tani dengan cara mengembangkan produk lokal pertanian yang mendekatkan pada pasar lokal maupun global, agar arus perekonomian mampu meningkatkan pendapatan regional di wilayah Kabupaten Purbalingga, karena usaha pertanian yang ada saat ini yaitu masih dimainkan oleh para tengkulak yang mengakibatkan terjadinya arus perpindahan modal. Pembangunan ekonomi yang efisien di suatu wilayah harus membawa imbas ke wilayah yang bersangkutan (*trickling down effect*) sedangkan yang terjadi pada saat ini yaitu *polarization effect* atau adanya pengkutuban ekonomi antara wilayah pemasok/ petani ke wilayah pengepul/ tengkulak sehingga nilai tukar pertanian rendah.
4. Dengan melihat hasil analisis secara keseluruhan maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pola dukungan pemerintah pada sektoral pembentuk PDRB wilayah Kabupaten Purbalingga, berupa rencana pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, realisasi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Wilayah Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adissasmita, H. R. (2015). DASAR-DASAR EKONOMI WILAYAH. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi Poernomo *et.al.* (2019). IMPACT OF IMPLEMENTATION OF STRATEGIC CULTIVARS ON TRADITIONAL CULTIVARS IN THE TECHNICAL EFFICIENCY OF FARMERS AND WELFARE (THE CASE OF STRAWBERRY CORP FARMING IN SERANGVILLAGE. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 406 (1), 1-11. Diakses dari <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/406/1/012002/meta>.
- Agus Dwi Cahyono, A. J. (2021). ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN PROVINSI GORONTALO. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6 (3), 1-12. Diakses dari <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/1190>
- Aji Priambodo, R. R. (2021). KONTRIBUSI TINGKAT INDUSTRI TERHADAP ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN PURBALINGGA. *Perwira Journal of Economics and Business*, 1 (1), 1-5. Diakses dari <https://ejournal.unperba.ac.id/index.php/pjeb/article/view/3>
- Ariastuti, I. D. (2014). ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB PERIODE 2007-2011. *Skripsi*, 1-147. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret. Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35325251/Indah_Dwi_Ariastuti_F0108075-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1645715666&Signature=LF6wqkgM8AMWv8VUZBI7KMivSYUkVatxZHfzn9ue-CLLQ47umgnS1ivy7N-xzhOLCKKw~FPXZMqqjnKk1Rt7VEfajIbND7Ds7tEWUSqUXUt3dF9q9YCCSpSmZXOgshu1JsH4V0jyR6jW8ueGCQII8F9zr8ewSPXHdUhCLPxpuPrWlpfLOPFj8GPRhQT1CCJ6fDGHS2SIIIxVz5Iw9vpPxmYF4OfAzQPIJDMBtkOaBwaFotGSC1DLhp6Z2j6wgoAG8nsiiFCvZYypsoh~uqqjARtb9xwFloQ1fcrwHUuoGb7YQRGkVC3I0FNXkKMN-g1F0FbDi7PEO3MyY0DE693c4Q &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Ari Welianto. (2020,7,26). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/26/184500569/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). KABUPATEN PURBALINGGA DALAM ANGKA 2021. (33030.2101). Purbalingga: Badan Pusat Statistik

- Kabupaten Purbalingga . Diambil kembali dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT LAPANGAN USAHA 2016-2020. Diambil kembali dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). PROVINSI JAWA TENGAH DALAM ANGKA 2021. (33560.2102). Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Diambil kembali dari <https://jateng.bps.go.id/brs.html>
- Badan Pusat Statistik. (2009). PEDOMAN PRAKTIS PERHITUNGAN PDRB KABUPATEN/ KOTA PENGERTIAN DASAR BUKU 1. (07140.0804). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com>
- Badrudin, R. (2012). PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN/ KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGGUNAKAN TIPOLOGI KLASEN DAN LQ. *JRMB*, 7 (1), 17-37. Diakses dari <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/view/81>
- Bakar, A. U. (2018). ANALISIS DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN MIMIKA. *Jurnal Kritis(kebijakan, riset dan inovasi)*, 2(1), 1-35. Diambil kembali dari <https://www.ejournal.stiejb.ac.id>
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. (2019). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019. Diakses Ambil kembali dari <https://dinperindag.purbalinggakab.go.id>
- Dr Windhu Putra, S. (2018). PEREKONOMIAN INDONESIA PENERAPAN BEBERAPA TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN DI INDONESIA. Depok: Rajawali Pers.
- Dr. H. Muhammad Idris Paratai, M. (2016). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBUAH PENGANTAR. Makasar: De La Macca. Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/5866/>.
- Dr. Ridwan, S. M. (2017). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Bandung : Alfabeta. Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/5718/>.
- Eristian Wibisono, A. A. (2019). KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3 (2), 1-12. Diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/29052>.
- Etika Ari Susanti, I. H. (2014). PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DALAM SEKTOR PEREKONOMIAN (STUDI PADA KECAMATAN

- PAGELARAN KABUPATEN MALANG). *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (4), 31-40. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/74443/pengembangan-ekonomi-lokal-dalam-sektor-pertanian-studi-pada-kecamatan-pagelaran>
- Fahmi, I. (2018). PENGANTAR PEREKONOMIAN INDONESIA TEORI KONSEP DAN REALITA. Bandung : Alfabeta.
- Gunawan, M. A. (2019). ANALISIS PERAN SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN SINJAI. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses dari <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/id/eprint/15141>.
- Hajeri, E. Y. (2015). ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KUBU RAYA. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2) 253-269. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id>.
- Hakim, A. (2019). SEKTOR UNGGULAN DAN PERGESERAN SEKTORAL KABUPATEN GRESIK 2011-2017 DALAM PRESPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL. *OECONOMICUS Jurnal of economics* , 2 (2), 152-174. Diakses dari <https://Jurnalfebi.uinsby.ac.id>.
- Harsono, S. B. (2015). PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH UNTUK MENGUATKAN DAYA SAING DAERAH . Bogor : Regional Branding Institute. Diakses dari <https://at.academia.edu>.
- Hasan M,M Aziz. (2018). STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI LOKAL. Diakses dari <http://eprint.unm.ac.id>
- Hastarini Dwi Atmanti, J. T. (2018). ANALISIS SEKTOR POTENSIAL JAWA TENGAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 (1), 20-28. Diakses dari <https://Jdep.upnjatim.ac.id>.
- Hernadianto, T. A. (2016). ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN SELUMA. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 1 (2), 69-83. Diakses dari <https://itbsemarang.ac.id>.
- Huda, R. (2020). PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI DESA SERANG , KECAMATAN KARANGREJA, KABUPATEN PURBALINGGA. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial 1*, 11 (2), 157-170. Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id>.
- Kumba Digidowiseiso, S. (2019). TEORI PEMBANGUNAN. Jakarta Selatan: LPU UNAS. Diakses dari <http://repository.unas.ac.id>.

- Kuncoro, M. (2012). PERENCANAAN DAERAH BAGAIMANA MEMBANGUN EKONOMI LOKAL KOTA DAN KAWASAN. Jakarta : Salemba Empat.
- Masloman, I. (2020). ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DAN SEKTOR UNGGULAN DI KOTA TOMOHON. *Jurnal EMBA*, 8 (4). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Hastin, M. (2021). ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL UNTUK MENGUATKAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN KERINCI. *Jurnal Akrab Juara*, 6 (1), 16-29. Diakses dari <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1390>.
- Mucholifah. (2010). EKONOMI MAKRO. Surabaya: Unesa UP. Diakses dari <http://eprint.upnjatim.ac.id>.
- Nailatul Husna, I. N. (2013). ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL UNTUK MENGUATKAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1). Diakses dari <https://media.neliti.com>.
- Nurlina, T. M. (2017). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Samudera Ekonomika*, 1 (2),174-182. Diakses dari <https://ejurnalunsam.ac.id>.
- Porter, M. E. (1985). COMPETITIVE ADVANTAGES CREATING AND SUSTAINING SUPERIOR PERFORMANCE WITH A NEW INTRODUCTION. New York: The Free Press. Diakses dari <http://eprints.stiperdharma.wacana.ac.id>.
- Pradana, R. S. (2019). ANALISIS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PENGARUH REGIONAL, SPESIALISASI DAERAH, DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTORAL DI KABUPATEN ACEH JAYA. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2 (2), 17-17. Diakses dari <https://jurnal.sragenkab.go.id>.
- Risdiantanti, Z. (2020). ANALISIS POTENSI EKONOMI SEKTORAL SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2014-2018. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id>.
- Rismayanti. (2021). ANALISIS POTENSI SEKTORAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *Gorontalo development review*, 4 (2), 75-88. Diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id>.
- Rizani, A. (2017). ANALISIS POTENSI EKONOMI DI SEKTOR DAN SUBSEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15 (2). 137-156. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id>.

Saifulloh, E. (2020). ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR PEREKONOMIAN DALAM SEKTOR PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER DENGAN ANALISIS LQ DAN SHIFT SHARE PERSPETIF EKONOMI ISLAM. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>

Setiawan, D. (2013). ANALISIS KESEMPATAN KERJA SEKTORAL DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN PENDEKATAN PERTUMBUHAN SEKTOR BASIS. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id>.

Sugiyono. (2015). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. Bandung : Alfabeta.

Sumardi, D. P. (2020). ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB). Surakarta: CV. Djiwa Amarta. Diakses dari <https://repository.feb.uns.ac.id>.

Tarigan, D. R. (2015). EKONOMI REGIONAL TEORI DAN APLIKASI EDISI REVISI. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahidin, F. E. (2021). ANALISIS POLA DAN STUKTUR PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI KOTA MATARAM DAN HUBUNGAN KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN SEKITARNYA DI PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3 (1), 17-25. Diakses dari <https://elastisitas.unram.ac.id>.

Widjonarko, E. D. (2015). STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMODITAS SALAK DI KECAMATAN MADUKARA KECAMATAN BAJARNEGARA. *Jurnal Teknik PWK*, 4 (4), 514-529. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id>.

Yoan P.M Bahalau, A. G. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN DAYA SAING SEKTOR KABUPATEN KEPULAUAN NUSA UTARA TAHUN 2010-2019. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21 (2), 44-58. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016-2020

No	Lapangan usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,05	2,43	4,05	1,54	1,91
2	Pertambangan dan penggalian	0,24	1,01	4,80	4,52	0,71
3	Industri pengolahan	5,24	5,99	5,13	7,33	-0,24
4	Perdagangan listrik dan gas	3,95	4,63	4,79	5,62	3,24
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,10	6,80	6,73	5,38	0,81
6	Konstruksi	7,63	9,35	5,82	6,25	-2,19
7	Perdagangan besar dan eceran	4,91	6,44	5,56	6,50	-4,08
8	Transportasi dan pergudangan	5,56	6,31	5,08	9,12	-30,09
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,79	6,46	8,51	10,06	-1,81
10	Informasi dan komunikasi	8,35	15,95	12,80	11,65	10,11
11	Jasa keuangan	8,93	5,27	3,50	3,63	1,62
12	Real estate	6,73	6,08	5,92	5,69	-0,01
13	Jasa perusahaan	10,42	9,13	9,77	10,95	-2,83
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,39	1,97	3,54	3,74	-0,23
15	Jasa pendidikan	7,70	7,31	7,80	7,64	-0,22
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,70	9,29	8,76	6,99	6,15
17	Jasa lainnya	8,53	9,25	9,61	9,23	-6,16
	PDRB	4,85	5,37	5,42	5,65	-1,23

Lampiran 2

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribuan) Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten					
Cilacap	240,2	238,3	193,2	185,2	198,6
Banyumas	283,9	283,2	226,2	211,7	225,8
Purbalingga	171,8	171,9	144,2	140,1	149,5
Banjarnegara	158,2	156,8	141,7	136,1	144,9
Kebumen	235,9	233,4	208,7	201,3	211,1
Purworejo	99,1	98,6	83,6	82,2	84,8
Wonosobo	160,1	159,2	138,3	131,4	137,6
Magelang	158,9	157,2	143,4	137,5	146,3
Boyolali	117,0	116,4	98,2	93,8	100,6
Klaten	168,0	165,0	151,7	144,1	151,8
Sukoharjo	78,9	76,7	65,4	63,6	68,9
Wonogiri	124,8	123,0	102,8	98,3	104,4
Karanganyar	107,7	106,8	87,8	84,5	91,7
Sragen	126,8	124,0	116,4	113,8	119,4
Grobogan	184,1	181,0	168,7	161,9	172,3
Blora	113,9	111,9	102,5	97,9	103,7
Rembang	115,5	115,2	97,4	95,3	100,1
Pati	144,2	141,7	123,9	119,0	127,4
Kudus	64,2	64,4	60,0	58,0	64,2
Jepara	100,3	99,0	86,5	83,5	91,1
Demak	158,8	152,6	144,1	137,6	146,9
Semarang	80,7	79,7	75,7	73,9	79,9
Temanggung	87,1	86,8	75,4	72,6	77,3
Kendal	107,8	106,1	94,7	91,2	97,5
Batang	82,6	81,5	66,1	64,1	70,6
Pekalongan	113,3	111,6	89,5	87,0	91,9
Pemalang	227,1	225,0	208,3	200,7	209,0
Tegal	144,2	141,8	114,1	109,9	117,5
Brebes	348,0	343,5	309,2	293,2	308,8
Kota					
Magelang	10,6	10,6	9,6	9,1	9,3
Surakarta	55,9	54,9	47,0	45,2	47,0
Salatiga	9,7	9,6	9,2	9,2	9,7
Semarang	83,6	80,9	73,7	72,0	79,6
Pekalongan	23,7	22,5	20,5	20,2	22,2
Tegal	20,3	20,1	19,4	18,6	19,5
Jawa Tengah	4 506,9	4 450,7	3 897,2	3 743,2	3 980,9

Lampiran 3

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten					
Cilacap	68,8	68,90	69,56	69,98	69,95
Banyumas	70,49	70,75	71,30	71,96	71,98
Purbalingga	67,48	67,72	68,41	68,99	68,97
Banjarnegara	65,52	65,86	66,54	67,34	67,45
Kebumen	67,41	68,29	68,80	69,60	69,81
Purworejo	70,66	71,31	71,87	72,50	72,68
Wonosobo	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22
Magelang	67,85	68,39	69,11	69,87	69,87
Boyolali	72,18	72,64	73,22	73,80	74,25
Klaten	73,97	74,25	74,79	75,29	75,56
Sukoharjo	75,06	75,56	76,07	76,84	76,98
Wonogiri	68,23	68,66	69,37	69,98	70,25
Karanganyar	74,9	75,22	75,54	75,89	75,86
Sragen	71,43	72,40	72,96	73,43	73,95
Grobogan	68,52	68,87	69,32	69,86	69,87
Blora	66,61	67,52	67,95	68,65	68,84
Rembang	68,6	68,95	69,46	70,15	70,02
Pati	69,03	70,12	70,71	71,35	71,77
Kudus	72,94	73,84	74,58	74,94	75,00
Jepara	70,25	70,79	71,38	71,88	71,99
Demak	70,1	70,41	71,26	71,87	72,22
Semarang	72,4	73,20	73,61	74,14	74,10
Temanggung	67,6	68,34	68,83	69,56	69,57
Kendal	70,11	70,62	71,28	71,97	72,29
Batang	66,38	67,35	67,86	68,42	68,65
Pekalongan	67,71	68,4	68,97	69,71	69,63
Pemalang	64,17	65,04	65,67	66,32	66,32
Tegal	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Brebes	63,98	64,86	65,68	66,12	66,11
Kota					
Magelang	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99
Surakarta	80,76	80,85	81,46	81,86	82,21
Salatiga	81,14	81,68	82,41	83,12	83,14
Semarang	81,19	82,01	82,72	83,19	83,05
Pekalongan	73,32	73,77	74,24	74,77	74,98
Tegal	73,55	73,95	74,44	74,93	75,07
Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87

Lampiran 4

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (dalam milyar rupiah)

Lapangan usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, kehutanan dan perikanan	3.994.110,52	4.091.161,44	4.257.056,42	4.322.802,80	4.405.195,80
Pertambangan dan penggalian	637.005,56	643.426,01	674.324,65	704.794,37	709.831,70
Industri pengolahan	3.826.876,18	4.056.012,15	4.264.063,44	4.576.623,28	4.565.705,53
Perdagangan listrik dan gas	9.358,99	9.792,09	10.260,74	10.837,33	11.188,60
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	18.100,67	19.331,39	20.631,54	21.740,89	21.917,70
Konstruksi	894.803,92	978.435,37	1.035.413,62	1.100.157,61	1.076.083,50
Perdagangan besar dan eceran	2.028.205,20	2.158.812,12	2.278.740,86	2.426.913,41	2.328.006,50
Transportasi dan pergudangan	538.904,20	572.918,84	602.020,58	656.940,00	459.289,74
Penyediaan akomodasi makan dan minum	367.926,05	391.676,29	425.019,87	467.794,45	459.345,10
Informasi dan komunikasi	329.078,71	381.561,91	430.385,28	480.522,36	529.111,20
Jasa keuangan	332.942,88	350.492,03	362.765,81	375.939,34	382.041,79
Real estate	183.042,97	194.176,09	205.676,13	217.371,18	217.358,20
Jasa perusahaan	26.108,95	28.491,67	31.274,63	34.698,12	33.717,20
Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	411.638,18	419.766,71	434.617,66	450.857,89	449.829,50
Jasa pendidikan	765.242,28	821.155,97	885.247,01	952.921,19	950.801,30
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	155.084,01	169.497,56	184.348,34	197.243,50	209.366,10
Jasa lainnya	298.000,36	325.578,26	356.861,91	389.784,12	365.759,60
PDRB	14.816.429,63	15.612.285,90	16.458.708,49	17.387.941,84	17.174.549,06

Lampiran 5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (dalam milyar rupiah)

Lapangan usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, kehutanan dan perikanan	116.331.116,45	118.450.171,80	121.554.478,24	123.195.690,24	126.256.481,72
Pertambangan dan penggalian	19.367.597,22	20.356.483,14	20.855.981,92	21.557.115,27	21.385.267,52
Industri pengolahan	295.960.836,46	308.770.221,90	322.143.287,28	338.820.377,75	326.165.238,58
Pengadaan listrik dan gas	928.106,10	976.552,87	1.028.917,24	1.085.272,38	1.104.726,82
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	589.805,23	628.207,67	658.880,40	687.508,14	703.223,81
Konstruksi	86.589.002,31	92.762.018,26	98.393.741,01	103.262.318,14	99.380.707,83
Perdagangan besar dan eceran	121.970.807,00	129.133.507,05	136.581.237,15	144.729.667,37	139.226.504,11
Transportasi dan pergudangan	28.097.071,84	29.867.333,04	32.121.009,33	34.848.123,33	23.295.957,45
Penyediaan akomodasi dan makan minum	26.633.473,81	28.350.128,41	30.660.788,00	33.442.256,07	30.773.744,74
Informasi dan komunikasi	35.742.555,91	40.485.502,07	45.500.915,21	50.789.278,30	58.739.211,80
Jasa keuangan	23.533.409,64	24.749.918,39	25.635.546,80	26.535.007,28	27.072.388,78
Real estate	15.831.477,84	16.856.963,15	17.797.501,70	18.782.400,30	18.730.350,95
Jasa perusahaan	3.032.330,20	3.296.655,45	3.609.297,92	3.989.822,45	3.702.916,29
Administrasi pemerintah	22.720.443,65	23.304.537,35	24.137.857,84	25.033.502,31	24.705.572,20
Jasa pendidikan	31.479.474,13	33.674.587,45	36.286.321,69	39.040.754,78	38.948.070,88
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.929.495,92	7.525.669,87	8.187.908,80	8.738.367,78	9.454.459,00
Jasa lainnya	13.362.350,97	14.561.838,30	15.937.473,33	17.375.656,64	15.984.262,59
PDRB	849.099.354,68	893.750.296,17	941.091.143,86	991.913.118,53	965.629.085,07

Lampiran 6

Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klasen Sektoral Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Lapangan usaha	Tipologi klasen		Daerah analisis		Daerah acuan	
	2016	2020	Rata-rata pertumbuhan %	Rata-rata kontribusi %	Rata-rata pertumbuhan %	Rata-rata kontribusi %
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.994.110,52	4.405.195,80	2,48	25,80	2,07	12,99
Pertambangan dan Penggalian	637.005,56	709.831,70	2,76	4,12	2,53	2,23
Industri Pengolahan	3.826.876,18	4.565.705,53	4,55	26,11	2,53	34,31
Pengadaan Listrik dan Gas	9.358,99	11.188,60	4,57	0,06	4,46	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.100,67	21.917,70	4,93	0,12	4,51	0,07
Konstruksi	894.803,92	1.076.083,50	4,81	6,26	3,60	10,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.028.205,20	2.328.006,50	3,61	13,81	3,45	14,49
Transportasi dan Pergudangan	538.904,20	459.289,74	-2,39	3,57	-2,70	3,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367.926,05	459.345,10	5,81	2,59	3,92	3,24
Informasi dan Komunikasi	329.078,71	529.111,20	12,63	2,62	13,23	4,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	332.942,88	382.041,79	3,51	2,21	3,57	2,74
Real Estat	183.042,97	217.358,20	4,42	1,25	4,33	1,89
Jasa Perusahaan	26.108,95	33.717,20	6,75	0,19	5,39	0,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	411.638,18	449.829,50	2,26	2,65	2,14	2,58
Jasa Pendidikan	765.242,28	950.801,30	5,63	5,37	5,52	3,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.084,01	209.366,10	7,80	1,12	8,08	0,87
Jasa Lainnya	298.000,36	365.759,60	5,48	2,14	4,86	1,67
PDRB	14.816.429,63	17.174.549,06	3,80	100,00	3,33	100,00

Lampiran 7

Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klasen Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Lapangan usaha	Tipologi klasen		Daerah analisis		Daerah acuan	
	2016	2020	Rata-rata pertumbuhan %	Rata-rata kontribusi %	Rata-rata pertumbuhan %	Rata-rata kontribusi %
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	116.331.116,45	126.256.481,72	1,54	1,91	2,43	4,05
Pertambangan dan Penggalian	19.367.597,22	21.385.267,52	4,52	0,71	1,01	4,80
Industri Pengolahan	295.960.836,46	326.165.238,58	7,33	-0,24	5,99	5,13
Pengadaan Listrik dan Gas	928.106,10	1.104.726,82	5,62	3,24	4,63	4,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	589.805,23	703.223,81	5,38	0,81	6,80	6,73
Konstruksi	86.589.002,31	99.380.707,83	6,25	-2,19	9,35	5,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	121.970.807,00	139.226.504,11	6,50	-4,08	6,44	5,56
Transportasi dan Pergudangan	28.097.071,84	23.295.957,45	9,12	-30,09	6,31	5,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.633.473,81	30.773.744,74	10,06	-1,81	6,46	8,51
Informasi dan Komunikasi	35.742.555,91	58.739.211,80	11,65	10,11	15,95	12,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	23.533.409,64	27.072.388,78	3,63	1,62	5,27	3,50
Real Estate	15.831.477,84	18.730.350,95	5,69	-0,01	6,08	5,92
Jasa Perusahaan	3.032.330,20	3.702.916,29	10,95	-2,83	9,13	9,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.720.443,65	24.705.572,20	3,74	-0,23	1,97	3,54
Jasa Pendidikan	31.479.474,13	38.948.070,88	7,64	-0,22	7,31	7,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.929.495,92	9.454.459,00	6,99	6,15	9,29	8,76
Jasa Lainnya	13.362.350,97	15.984.262,59	9,23	-6,16	9,25	9,61
PDRB	849.099.354,68	965.629.085,07	5,65	-1,23	5,37	5,42

Lampiran 8

Hasil perhitungan *Location Quotient (LQ)*

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	3.994.110,52	14.816.429,63	116.331.116,45	849.099.354,69	0,269573077	0,137005	1,967610493
2017	4.091.161,44	15.612.285,90	118.450.171,80	893.750.296,17	0,262047561	0,132532	1,977245635
2018	4.257.056,42	16.458.708,49	121.554.478,24	941.091.143,86	0,258650697	0,129163	2,002508535
2019	4.322.802,80	17.387.941,84	123.195.690,24	991.913.118,53	0,248609228	0,1242	2,001683292
2020	4.405.195,80	17.174.549,06	126.256.481,72	965.629.085,07	0,256495573	0,13075	1,961717783

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	637.005,56	14.816.429,63	19.367.597,22	849.099.354,69	0,042993189	0,02281	1,884874446
2017	643.426,01	15.612.285,90	20.356.483,14	893.750.296,17	0,0412128	0,022776	1,809445747
2018	674.324,65	16.458.708,49	20.855.981,92	941.091.143,86	0,04097069	0,022161	1,848733569
2019	704.794,37	17.387.941,84	21.557.115,27	991.913.118,53	0,040533513	0,021733	1,865079023
2020	709.831,70	17.174.549,06	21.385.267,52	965.629.085,07	0,041330442	0,022146	1,866232286

3. Sektor Industri Pengolahan

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	3.826.876,18	14.816.429,63	295.960.836,46	849.099.354,69	0,258285989	0,348559	0,741011781
2017	4.056.012,15	15.612.285,90	308.770.221,90	893.750.296,17	0,259796174	0,345477	0,751992554
2018	4.264.063,44	16.458.708,49	322.143.287,28	941.091.143,86	0,25907643	0,342308	0,756851201
2019	4.576.623,28	17.387.941,84	338.820.377,75	991.913.118,53	0,263206728	0,341583	0,770550485
2020	4.565.705,53	17.174.549,06	326.165.238,58	965.629.085,07	0,265841363	0,337775	0,787037126

4. Sektor Perdagangan Listrik dan Gas

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	9.358,99	14.816.429,63	928.106,10	849.099.354,69	0,000631663	0,001093	0,577891497
2017	9.792,09	15.612.285,90	976.552,87	893.750.296,17	0,000627204	0,001093	0,574023059
2018	10.260,74	16.458.708,49	1.028.917,24	941.091.143,86	0,000623423	0,001093	0,570209137
2019	10.837,33	17.387.941,84	1.085.272,38	991.913.118,53	0,000623267	0,001094	0,569651182
2020	11.188,60	17.174.549,06	1.104.726,82	965.629.085,07	0,000651464	0,001144	0,569437214

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	18.100,67	14.816.429,63	589.805,23	849.099.354,69	0,001221662	0,000695	1,758737321
2017	19.331,39	15.612.285,90	628.207,67	893.750.296,17	0,001238216	0,000703	1,761609124
2018	20.631,54	16.458.708,49	658.880,40	941.091.143,86	0,001253533	0,0007	1,790445026
2019	21.740,89	17.387.941,84	687.508,14	991.913.118,53	0,001250343	0,000693	1,8039518
2020	21.917,70	17.174.549,06	703.223,81	965.629.085,07	0,001276173	0,000728	1,75237241

6. Sektor Konstruksi

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	894.803,92	14.816.429,63	86.589.002,31	849.099.354,69	0,060392682	0,101977	0,592215937
2017	978.435,37	15.612.285,90	92.762.018,26	893.750.296,17	0,062670859	0,10379	0,603825789
2018	1.035.413,62	16.458.708,49	98.393.741,01	941.091.143,86	0,062909773	0,104553	0,601703217
2019	1.100.157,61	17.387.941,84	103.262.318,14	991.913.118,53	0,063271296	0,104104	0,607768927
2020	1.076.083,50	17.174.549,06	99.380.707,83	965.629.085,07	0,062655706	0,102918	0,608791923

7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	2.028.205,20	14.816.429,63	121.970.807,00	849.099.354,69	0,13688893	0,143647	0,952951818
2017	2.158.812,12	15.612.285,90	129.133.507,05	893.750.296,17	0,138276492	0,144485	0,957030117
2018	2.278.740,86	16.458.708,49	136.581.237,15	941.091.143,86	0,138451985	0,145131	0,953981232
2019	2.426.913,41	17.387.941,84	144.729.667,37	991.913.118,53	0,139574507	0,14591	0,95658193
2020	2.328.006,50	17.174.549,06	139.226.504,11	965.629.085,07	0,135549789	0,144182	0,940128602

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	538.904,20	14.816.429,63	28.097.071,84	849.099.354,69	0,036372069	0,03309	1,099171488
2017	572.918,84	15.612.285,90	29.867.333,04	893.750.296,17	0,036696666	0,033418	1,098111304
2018	602.020,58	16.458.708,49	32.121.009,33	941.091.143,86	0,036577632	0,034132	1,071662632
2019	656.940,00	17.387.941,84	34.848.123,33	991.913.118,53	0,037781355	0,035132	1,075404294
2020	459.289,74	17.174.549,06	23.295.957,45	965.629.085,07	0,026742463	0,024125	1,108488457

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun	Vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	367.926,05	14.816.429,63	26.633.473,81	849.099.354,69	0,024832302	0,031366734	0,791676349
2017	391.676,29	15.612.285,90	28.350.128,41	893.750.296,17	0,025087696	0,031720413	0,790900691
2018	425.019,87	16.458.708,49	30.660.788,00	941.091.143,86	0,025823403	0,032580041	0,792614212
2019	467.794,45	17.387.941,84	33.442.256,07	991.913.118,53	0,026903382	0,033714905	0,797967038
2020	459.345,10	17.174.549,06	30.773.744,74	965.629.085,07	0,026745686	0,031869115	0,839235287

10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Tahun	Vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	329.078,71	14.816.429,63	35.742.555,91	849.099.354,69	0,022210392	0,042094669	0,527629573
2017	381.561,91	15.612.285,90	40.485.502,07	893.750.296,17	0,024439849	0,045298449	0,53952949
2018	430.385,28	16.458.708,49	45.500.915,21	941.091.143,86	0,026149396	0,048349106	0,540845487
2019	480.522,36	17.387.941,84	50.789.278,30	991.913.118,53	0,027635379	0,051203354	0,53971814
2020	529.111,20	17.174.549,06	58.739.211,80	965.629.085,07	0,030807866	0,060829994	0,506458466

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Tahun	Vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	332.942,88	14.816.429,63	23.533.409,64	849.099.354,69	0,022471195	0,027715731	0,810774023
2017	350.492,03	15.612.285,90	24.749.918,39	893.750.296,17	0,022449757	0,027692207	0,810688624
2018	362.765,81	16.458.708,49	25.635.546,80	941.091.143,86	0,022040965	0,027240238	0,809132595
2019	375.939,34	17.387.941,84	26.535.007,28	991.913.118,53	0,021620692	0,026751342	0,808209626
2020	382.041,79	17.174.549,06	27.072.388,78	965.629.085,07	0,022244648	0,028036012	0,793431226

12. Sektor Real Estate

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	183.042,97	14.816.429,63	15.831.477,84	849.099.354,69	0,012354054	0,018645024	0,662592544
2017	194.176,09	15.612.285,90	16.856.963,15	893.750.296,17	0,01243739	0,018860932	0,659426077
2018	205.676,13	16.458.708,49	17.797.501,70	941.091.143,86	0,012496493	0,01891156	0,660785923
2019	217.371,18	17.387.941,84	18.782.400,30	991.913.118,53	0,01250126	0,01893553	0,660201225
2020	217.358,20	17.174.549,06	18.730.350,95	965.629.085,07	0,012655832	0,019397045	0,65246183

13. Sektor Jasa Perusahaan

Tahun	Vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	26.108,95	14.816.429,63	3.032.330,20	849.099.354,69	0,001762162	0,003571231	0,493432628
2017	28.491,67	15.612.285,90	3.296.655,45	893.750.296,17	0,001824952	0,003688564	0,494759395
2018	31.274,63	16.458.708,49	3.609.297,92	941.091.143,86	0,001900187	0,003835227	0,495456331
2019	34.698,12	17.387.941,84	3.989.822,45	991.913.118,53	0,001995528	0,004022351	0,496109828
2020	33.717,20	17.174.549,06	3.702.916,29	965.629.085,07	0,001963207	0,003834719	0,51195596

14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Tahun	Vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	411.638,18	14.816.429,63	22.720.443,65	849.099.354,69	0,027782549	0,026758286	1,038278331
2017	419.766,71	15.612.285,90	23.304.537,35	893.750.296,17	0,026886947	0,026074998	1,031138995
2018	434.617,66	16.458.708,49	24.137.857,84	941.091.143,86	0,026406547	0,025648799	1,029543207
2019	450.857,89	17.387.941,84	25.033.502,31	991.913.118,53	0,025929342	0,025237596	1,027409354
2020	449.829,50	17.174.549,06	24.705.572,20	965.629.085,07	0,026191634	0,02558495	1,023712513

15. Sektor Jasa Pendidikan

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	765.242,28	14.816.429,63	31.479.474,13	849.099.354,69	0,051648224	0,037073958	1,393113293
2017	821.155,97	15.612.285,90	33.674.587,45	893.750.296,17	0,05259678	0,037677848	1,39596032
2018	885.247,01	16.458.708,49	36.286.321,69	941.091.143,86	0,053785934	0,038557712	1,394946191
2019	952.921,19	17.387.941,84	39.040.754,78	991.913.118,53	0,054803564	0,039359047	1,392400704
2020	950.801,30	17.174.549,06	38.948.070,88	965.629.085,07	0,055361063	0,040334401	1,372552012

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	155.084,01	14.816.429,63	6.929.495,92	849.099.354,69	0,01046703	0,008160995	1,282567783
2017	169.497,56	15.612.285,90	7.525.669,87	893.750.296,17	0,010856678	0,008420327	1,289341586
2018	184.348,34	16.458.708,49	8.187.908,80	941.091.143,86	0,011200656	0,008700442	1,287366394
2019	197.243,50	17.387.941,84	8.738.367,78	991.913.118,53	0,011343694	0,00880961	1,287650012
2020	209.366,10	17.174.549,06	9.454.459,00	965.629.085,07	0,012190486	0,009790984	1,2450726

17. Sektor Jasa lainnya

Tahun	Vi	vt	Vi	Vt	vi/vt	Vi/Vt	(vi/vt)/(Vi/Vt)
2016	298.000,36	14.816.429,63	13.362.350,97	849.099.354,69	0,020112832	0,015737088	1,278052995
2017	325.578,26	15.612.285,90	14.561.838,30	893.750.296,17	0,020853978	0,016292961	1,279937893
2018	356.861,91	16.458.708,49	15.937.473,33	941.091.143,86	0,021682255	0,016935101	1,280314482
2019	389.784,12	17.387.941,84	17.375.656,64	991.913.118,53	0,022416921	0,017517317	1,279700593
2020	365.759,60	17.174.549,06	15.984.262,59	965.629.085,07	0,021296606	0,016553212	1,286554309

Lampiran 9

Hasil Perhitungan Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Sektor	$1 + g_{ij}$	$1 + g_j$	$1 + g_{ij}/1 + g_j$	$1 + G_i$	$1 + G_j$	$1 + G_i/1 + G_j$	$(1 + g_{ij}/1 + g_j) / (1 + G_i/1 + G_j)$	Keterangan
1	3,48	4,80	0,73	3,06	4,32	0,71	1,02	DLQ>1
2	3,76	4,80	0,78	3,53	4,32	0,82	0,96	DLQ<1
3	5,55	4,80	1,16	3,52	4,32	0,81	1,42	DLQ>1
4	5,56	4,80	1,16	5,46	4,32	1,26	0,92	DLQ<1
5	5,92	4,80	1,23	5,50	4,32	1,27	0,97	DLQ<1
6	5,8	4,80	1,21	4,59	4,32	1,06	1,14	DLQ>1
7	4,6	4,80	0,96	4,45	4,32	1,03	0,93	DLQ<1
8	-1,39	4,80	-0,29	-1,70	4,32	-0,39	0,74	DLQ<1
9	6,8	4,80	1,42	4,92	4,32	1,14	1,24	DLQ>1
10	13,62	4,80	2,84	14,23	4,32	3,29	0,86	DLQ<1
11	4,5	4,80	0,94	4,57	4,32	1,06	0,89	DLQ<1
12	5,42	4,80	1,13	5,32	4,32	1,23	0,92	DLQ<1
13	7,75	4,80	1,61	6,38	4,32	1,48	1,09	DLQ>1
14	3,25	4,80	0,68	3,13	4,32	0,72	0,93	DLQ<1
15	6,63	4,80	1,38	6,52	4,32	1,51	0,92	DLQ<1
16	8,79	4,80	1,83	9,08	4,32	2,10	0,87	DLQ<1
17	6,48	4,80	1,35	5,85	4,32	1,35	1,00	DLQ>1
PDRB	3,48	4,80	0,73	3,06	4,32	0,71	1,02	DLQ>1

Lampiran 10

Hasil Perhitungan *Shift Share*1. Hasil Perhitungan Analisis *National Share*

Sektor	Daerah analisis		Daerah acuan		Er,i,t-n	EN,t/EN,t-n	(c)	<i>National Share</i>
	t-n	T	t-n	t	(a)	(b)	(a) x (b)	(c) - (a)
1	3.994.110,52	4.405.195,80	116.331.116,45	126.256.481,72	3.994.110,52	1,1372	4.542.259,12	548.148,60
2	637.005,56	709.831,70	19.367.597,22	21.385.267,52	637.005,56	1,1372	724.427,70	87.422,14
3	3.826.876,18	4.565.705,53	295.960.836,46	326.165.238,58	3.826.876,18	1,1372	4.352.073,67	525.197,49
4	9.358,99	11.188,60	928.106,10	1.104.726,82	9.358,99	1,1372	10.643,41	1.284,42
5	18.100,67	21.917,70	589.805,23	703.223,81	18.100,67	1,1372	20.584,79	2.484,12
6	894.803,92	1.076.083,50	86.589.002,31	99.380.707,83	894.803,92	1,1372	1.017.606,11	122.802,19
7	2.028.205,20	2.328.006,50	121.970.807,00	139.226.504,11	2.028.205,20	1,1372	2.306.554,49	278.349,29
8	538.904,20	459.289,74	28.097.071,84	23.295.957,45	538.904,20	1,1372	612.862,99	73.958,79
8	367.926,05	459.345,10	26.633.473,81	30.773.744,74	367.926,05	1,1372	418.419,93	50.493,88
10	329.078,71	529.111,20	35.742.555,91	58.739.211,80	329.078,71	1,1372	374.241,21	45.162,50
11	332.942,88	382.041,79	23.533.409,64	27.072.388,78	332.942,88	1,1372	378.635,70	45.692,82
12	183.042,97	217.358,20	15.831.477,84	18.730.350,95	183.042,97	1,1372	208.163,64	25.120,67
13	26.108,95	33.717,20	3.032.330,20	3.702.916,29	26.108,95	1,1372	29.692,12	3.583,17
14	411.638,18	449.829,50	22.720.443,65	24.705.572,20	411.638,18	1,1372	468.131,08	56.492,90
15	765.242,28	950.801,30	31.479.474,13	38.948.070,88	765.242,28	1,1372	870.263,53	105.021,25
16	155.084,01	209.366,10	6.929.495,92	9.454.459,00	155.084,01	1,1372	176.367,62	21.283,61
17	298.000,36	365.759,60	13.362.350,97	15.984.262,59	298.000,36	1,1372	338.897,70	40.897,34
PDRB	14.816.429,63	17.174.549,06	849.099.354,68	965.629.085,07	14.816.429,63	19,3331	16.849.824,83	2.033.395,20

2. Hasil Perhitungan *Propotional Shift*

Sektor	Daerah analisis		Daerah acuan		Er,i,t-n	EN,i,t/EN,i,t-n	EN,t/EN,t-n	(d)	<i>Proportional Shift</i>
	t-n	T	t-n	t	(a)	(b)	(c)	(b) - (c)	(a) x (d)
1	3.994.110,52	4.405.195,80	116.331.116,45	126.256.481,72	3.994.110,52	1,0853	1,1372	-0,0519	-207.371,28
2	637.005,56	709.831,70	19.367.597,22	21.385.267,52	637.005,56	1,1042	1,1372	-0,0331	-21.060,42
3	3.826.876,18	4.565.705,53	295.960.836,46	326.165.238,58	3.826.876,18	1,1021	1,1372	-0,0352	-134.644,10
4	9.358,99	11.188,60	928.106,10	1.104.726,82	9.358,99	1,1903	1,1372	0,0531	496,62
5	18.100,67	21.917,70	589.805,23	703.223,81	18.100,67	1,1923	1,1372	0,0551	996,61
6	894.803,92	1.076.083,50	86.589.002,31	99.380.707,83	894.803,92	1,1477	1,1372	0,0105	9.386,29
7	2.028.205,20	2.328.006,50	121.970.807,00	139.226.504,11	2.028.205,20	1,1415	1,1372	0,0042	8.589,00
8	538.904,20	459.289,74	28.097.071,84	23.295.957,45	538.904,20	0,8291	1,1372	-0,3081	-166.044,57
9	367.926,05	459.345,10	26.633.473,81	30.773.744,74	367.926,05	1,1555	1,1372	0,0182	6.701,57
10	329.078,71	529.111,20	35.742.555,91	58.739.211,80	329.078,71	1,6434	1,1372	0,5062	166.565,77
11	332.942,88	382.041,79	23.533.409,64	27.072.388,78	332.942,88	1,1504	1,1372	0,0131	4.375,48
12	183.042,97	217.358,20	15.831.477,84	18.730.350,95	183.042,97	1,1831	1,1372	0,0459	8.395,99
13	26.108,95	33.717,20	3.032.330,20	3.702.916,29	26.108,95	1,2211	1,1372	0,0839	2.190,70
14	411.638,18	449.829,50	22.720.443,65	24.705.572,20	411.638,18	1,0874	1,1372	-0,0499	-20.527,29
15	765.242,28	950.801,30	31.479.474,13	38.948.070,88	765.242,28	1,2373	1,1372	0,1000	76.534,70
16	155.084,01	209.366,10	6.929.495,92	9.454.459,00	155.084,01	1,3644	1,1372	0,2271	35.225,75
17	298.000,36	365.759,60	13.362.350,97	15.984.262,59	298.000,36	1,1962	1,1372	0,0590	17.575,20
PDRB	14.816.429,63	17.174.549,06	849.099.354,68	965.629.085,07	14.816.429,63	20,0312	19,3331	0,6981	-212.613,97

3. Hasil Perhitungan *Differential Shift*

Sektor	Daerah analisis		Derah acuan		Er,i,t	EN,i,t/E N,i,t-n	Er,i,t-n	(d)	<i>Differential Shift</i>
	t-n	T	t-n	t	(a)	(b)	(c)	(b) x (c)	(a) - (d)
1	3.994.110,52	4.405.195,80	116.331.116,45	126.256.481,72	4.405.195,80	1,0853	3.994.110,52	4334887,84	70.307,96
2	637.005,56	709.831,70	19.367.597,22	21.385.267,52	709.831,70	1,1042	637.005,56	703367,29	6.464,41
3	3.826.876,18	4.565.705,53	295.960.836,46	326.165.238,58	4.565.705,53	1,1021	3.826.876,18	4217429,57	348.275,96
4	9.358,99	11.188,60	928.106,10	1.104.726,82	11.188,60	1,1903	9.358,99	11140,03	48,57
5	18.100,67	21.917,70	589.805,23	703.223,81	21.917,70	1,1923	18.100,67	21581,40	336,30
6	894.803,92	1.076.083,50	86.589.002,31	99.380.707,83	1.076.083,50	1,1477	894.803,92	1026992,40	49.091,10
7	2.028.205,20	2.328.006,50	121.970.807,00	139.226.504,11	2.328.006,50	1,1415	2.028.205,20	2315143,49	12.863,01
8	538.904,20	459.289,74	28.097.071,84	23.295.957,45	459.289,74	0,8291	538.904,20	446818,42	12.471,32
9	367.926,05	459.345,10	26.633.473,81	30.773.744,74	459.345,10	1,1555	367.926,05	425121,50	34.223,60
10	329.078,71	529.111,20	35.742.555,91	58.739.211,80	529.111,20	1,6434	329.078,71	540806,99	-11.695,79
11	332.942,88	382.041,79	23.533.409,64	27.072.388,78	382.041,79	1,1504	332.942,88	383011,18	-969,39
12	183.042,97	217.358,20	15.831.477,84	18.730.350,95	217.358,20	1,1831	183.042,97	216559,64	798,56
13	26.108,95	33.717,20	3.032.330,20	3.702.916,29	33.717,20	1,2211	26.108,95	31882,83	1.834,37
14	411.638,18	449.829,50	22.720.443,65	24.705.572,20	449.829,50	1,0874	411.638,18	447603,79	2.225,71
15	765.242,28	950.801,30	31.479.474,13	38.948.070,88	950.801,30	1,2373	765.242,28	946798,24	4.003,06
16	155.084,01	209.366,10	6.929.495,92	9.454.459,00	209.366,10	1,3644	155.084,01	211593,37	-2.227,27
17	298.000,36	365.759,60	13.362.350,97	15.984.262,59	365.759,60	1,1962	298.000,36	356472,90	9.286,70
PDRB	14.816.429,63	17.174.549,06	849.099.354,68	965.629.085,07	17.174.549,06	20,0312	14.816.429,63	16637210,86	537.338,20



BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 15 Agustus 1998 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara (Ridho Yudi Setiawan dan Aulia Nur Rahmawati) dari pasangan Wahyu Sunandar dan Kartinah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Alamat e-mail: Chanyesina@gmail.com. Akun Instagram: Yesina98. Akun Facebook: Yesi Nur Alfiani. No Hp (083127082339).

Pendidikan SD ditempuh oleh penulis dimulai dari SD N 3 Candinata dan lulus pada tahun 2010. Pendidikan SMP ditempuh di SMP N 3 Kutasari dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan SMA ditempuh di SMA N 1 Kutasari dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis diterima di jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selama mengikuti kuliah di fakultas ekonomi UNUGHA penulis aktif menjadi anggota badan eksekutif mahasiswa fakultas ekonomi (BEM-FE). Himpunan mahasiswa program studi ekonomi pembangunan (HMPS-EP) serta mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa (UKM) diantaranya UKM olahraga divisi beladiri, UKM kewirausahaan dan *English start*. Disamping itu penulis aktif dalam keanggotaan ikatan mahasiswa ekonomi pembangunan Indonesia (IMEPI).